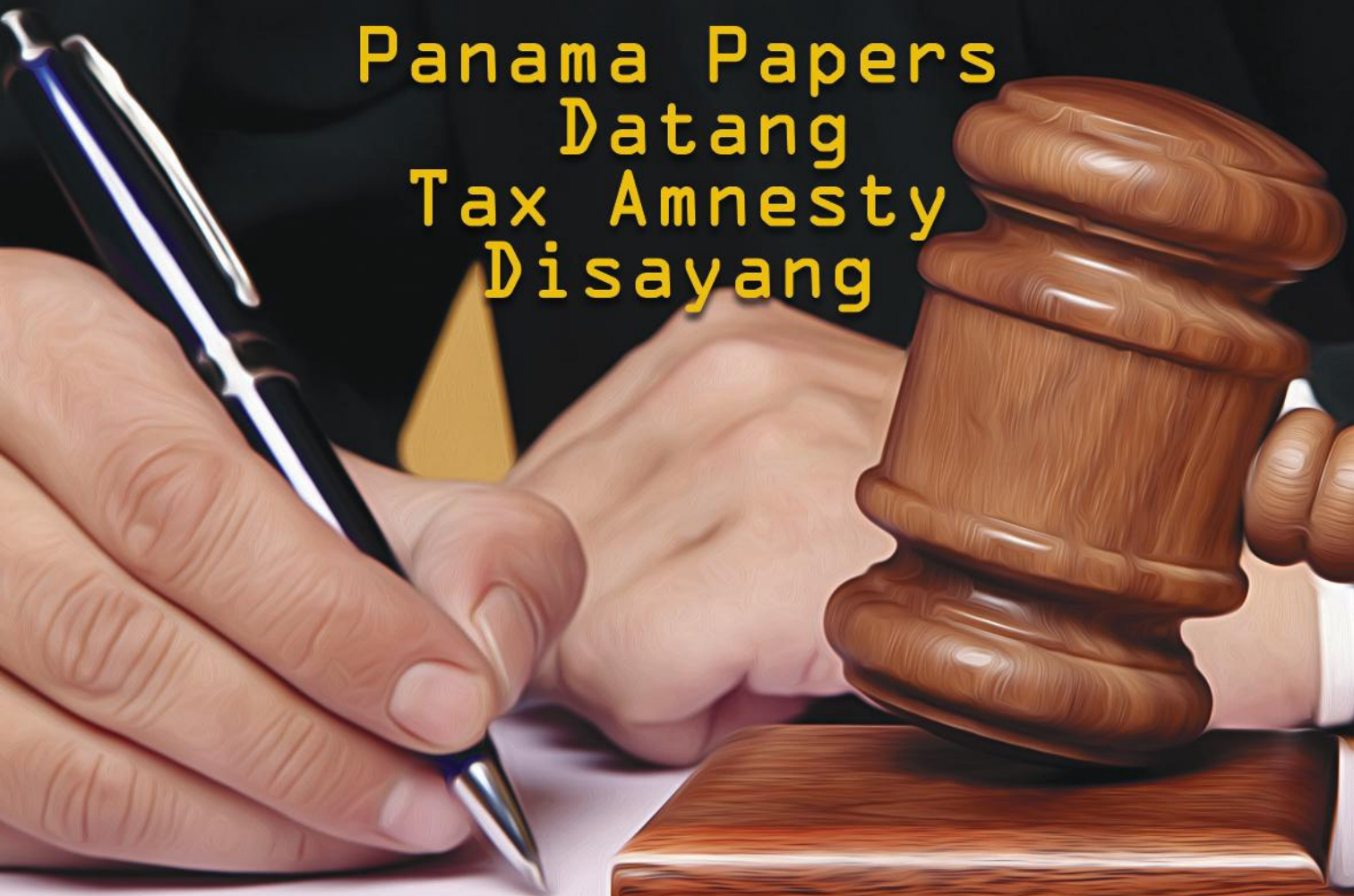


Sengkarut Kucuran Dana CDB Menjerat Bank BUMN

AKTUAL

Edisi 53 | April - Mei 2016

Panama Papers Datang Tax Amnesty Disayang



Panama Papers mampu
menggoyang rencana pengesahan
RUU Tax Amnesty di DPR.

ISSN 2337-8395



9 772337 839509

Rp. 30.000

WWW.AKTUAL.COM

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 Dedy **081 20 53 8776**
Rhiza **081 828 0941 009**

 marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

PENDIRI M. Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

REDAKTUR Wahyu Romadhony, Ferro Maulana, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M. Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan, Vivin Sri Wahyuni

STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Leonina K Lahama, Agung Rizki (Peristiwa), Dadangsaah (Ekonomi), Najamuddin Arafah (Ekonomi), Refli Mulyadi (Khasanah Islam), Fatah Hidayat Sidik (Peristiwa), Busthomi (Ekonomi)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi

NETWORK Tri Wahyudi (Hd), Rendra Muhammad Nur Islam

SMC Resya Muhammad Irgi, Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu), Nelson Nafis (Yogyakarta)

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P

HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji

MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Aditya, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

ADMIN MARKETING Yulita Trinanda Pangastuti

ALAMAT REDAKSI

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
Telp. 021 83794508 (Hunting)
Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
iklan@aktual.com

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

aktual

Panama Papers Datang, Tax Amnesty Disayang



Pembaca yang budiman.

Gelombang Panama Papers ternyata sampai ke Indonesia. Meski kelihatan datar dan sedikit beriak di permukaan, ternyata gelombang Panama Papers cukup keras di kedalaman.

Laporan utama kali ini, Aktual mencoba untuk melihat implikasi dan beberapa catatan penting Panama Papers buat Indonesia. Pada perkembangannya, ternyata ada keterkaitan yang cukup erat antara Panama Papers, pembahasan UU Tax Amnesty di DPR dan kejahatan pajak.

Ada fakta yang cukup mengejutkan DPR langsung menyambut isu Panama Papers dengan UU Tax Amnesty. Ditambah lagi dengan penangkapan buron kasus B LBI, Samadikun Hartono.

Soal Ahok di kasus reklamasi dan RS Sumber Waras tampaknya masih tetap jadi sorotan Aktual kali ini. Beberapa penelusuran investigatif Aktual ternyata menguatkan dugaan bahwa Proyek reklamasi di Jakarta sebenarnya sudah direncanakan

sejak Jokowi masih sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta.

Sebuah tulisan soal jejak Jokowi di proyek reklamasi kami sajikan agar tali temali sejarah proyek besar bernama reklamasi teluk Jakarta tidak terputus di Gubernur Basuki saja. Mantan Gubernur Foke dan Jokowi ternyata punya rekam jejak di proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Bahkan, Jokowi ingin pusat pemerintahan negara ini akan dipindahkan ke salah satu pulau jika proyek reklamasi teluk Jakarta ini selesai kelak. Ini adalah informasi yang ditemukan tim Aktual.

Di kasus Rumah Sakit Sumber Waras, media jarang menyorot peran istri Gubernur Basuki. Padahal, orang yang juga tahu dan paham bagaimana proses mendirikan rumah sakit kanker baru di Jakarta adalah Veronica Tan, istri Gubernur Basuki.

Dan, masih banyak beberapa tulisan menarik yang bisa pembaca nikmati di edisi kal ini.

Semoga bermanfaat...

Selamat membaca.

Redaksi

LAPORAN UTAMA

28 Menakar Nyali Jokowi Ungkap Pengemplang Pajak di Skandal "Panama Papers"

Pemerintah dituntut mengustut, apakah nama-nama yang ada di Panama Papers itu, termasuk Rini Soemarno melakukan pelanggaran hukum atau tidak.



34 Pembocoran Data Berbuah Pengampunan

Bocornya dokumen Panama Papers mengungkap data warga, yang memarkir dananya di luar negeri, antara lain untuk menghindari pajak. Namun kebocoran ini justru memberi momentum bagi pemerintah Jokowi untuk memajukan agenda pengampunan pajak.



36 Kemana Isu Panama Papers Hendak Dilabuhkan?

Mencuatnya fenomena Panama Papers, sama rentannya dengan bocornya WikiLeaks beberapa tahun yang lalu, untuk menciptakan aksi destabilisasi di negara sasaran, tak terkecuali di Indonesia.



18 AKTUAL REVIEW

Punahnya Geopolitik Sunda Kelapa

Pengusuran Kalijodo, Luar Batang maupun Pasar Ikan, sejatinya hanya gejala permukaan dari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Yaitu adanya gerakan berstrategi, berencana dan berprogram untuk merubah dan menghancurkan budaya dan kearifan lokal suatu daerah, sehingga muncul budaya baru yang memudahkan masuknya kapitalisme asing.

22 POLITIK

Jejak Jokowi di Reklamasi

Penelusuran Aktual.com menemukan sejumlah kaitan antara Presiden Jokowi dan reklamasi Teluk Jakarta. Salah satunya adalah bukti rekaman video Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi IV DPR tanggal 12 Desember 2013.

40 HUKUM

Mimpi Istri Sang Gubernur

Menurut Veronica Tan, pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta memang khusus dipersembahkan oleh Ahok untuk membangun rumah sakit khusus kanker yang akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

46 EKONOMI

Sengkarut Kucuran Dana CDB Menjerat Bank BUMN

Bahkan dana yang mengalir ke PT Medco group disinyalir akan digunakan untuk akuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui konsorsium.

52 INTERNASIONAL

Dari Separatis Idealis Jadi Tukang Culik

Kelompok Abu Sayyaf semula adalah sempalan dari gerakan separatis Moro, yang ingin merdeka dari Filipina. Namun, karena kebutuhan ekonomi dan operasional, mereka akhirnya terpecah-pecah dan menjadi pelaku kriminal biasa, termasuk menculik untuk minta tebusan.

56 RESENSI

Marxisme-Leninisme ala Indonesia

Buku yang terdiri dari enam bab ini coba menjelaskan perbedaan pemikiran Aidit tentang Marxisme-Leninisme dengan Marxisme-Leninisme yang berkembang di dunia.

58 LIFE

Siyono Salah Satu Kasus Penggangan HAM 2016!

Hasil autopsi terhadap jenazah terduga teroris Siyono memperlihatkan bahwa jenazah mengalami patah di lima iga bagian kiri, patah satu iga bagian kanan, dan tulang dada yang patah akibat benda tumpul di rongga dada mengarah ke jaringan jantung.

Lengkapi kebutuhan informasi terkini dengan mengunduh Portal berita Aktual di smartphone Android Anda. Berita tersaji selama 24 jam dalam 7 hari seminggu dengan standar jurnalisme berkualitas yang meliputi berbagai peristiwa nasional maupun internasional.

3	Tatap Redaksi	8	Lensa Aktual	43	Kilas Ekonomi
5	Terkini	12	Kilas Peristiwa	52	Kilas Life
6	Kaki Hari	14	Kilas Politik	54	Oase
8	Hot News	36	Kilas Hukum		

BPK: Ada Penyimpangan Sempurna dalam Pembelian Lahan Sumber Waras

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memastikan tidak ada muatan politis terkait hasil audit tentang pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada 2014.

"Saya tegaskan, ini tidak ada muatan politik. Ini adalah fakta. Fakta ada penyimpangan yang sempurna," ujar Anggota III BPK, Prof Eddy Mulyadi Soepardi, di kantornya, beberapa waktu lalu.

Guru besar Ilmu Akutansi ini menyatakan demikian, karena dikerjakan melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Kemudian, penyusunan audit tersebut di bawah komandonya yang notabene lebih dari 30 tahun menjadi auditor dan terlibat dalam pengungkapan 6.800 kasus korupsi saat masih bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Alasan lain audit tidak disusun atas pretensi politik, mengingat turut dilakukan di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi, audit disusun bukan berdasarkan logika, namun fakta dan data di lapangan.

"Kalau ada penyimpangan dan penyimpangan sempurna, saya jamin adanya kerugian negara itu," tegas Prof Eddy.

Karenanya, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini heran, bila BPK dianggap menyembunyikan data atas audit pembelian lahan HGB atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) seluas 3,6 ha tersebut. Terlebih, audit investigasi dikerjakan menyusul adanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ingin tanya balik, yang masuk akal, yang menyembunyikan data itu yang mencari data atau yang punya data? BPK itu memeriksa untuk mencari data dan fakta. Jangan dibolak-balik," paparnya.

Data dan fakta ini didapatkan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang diaudit, khususnya pengguna anggaran. Cara memperolehnya pun dengan berbagai cara, baik diskusi maupun ekspose.

"Sekali lagi, jangan dibalik-balik. Mau korupsi jenis apa lagi, saya paham. Saya membantu pimpinan KPK sejak awal berdiri. Saya berkeliling pengadilan sebagai ahli membantu penyidik Polri, Kejaksaan, maupun KPK," tandas peraih gelar doktor dari Unpad ini. *Sukardjito*

Hasyim Muzadi: Negara Tidak Bersalah di Tragedi 1965

Salah satu "rekomendasi" dari Simposium Korban '65 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa saat lalu adalah permintaan maaf negara kepada korban tragedi 1965.

Pro kontra terjadi soal itu. Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi menyarankan agar Presiden Joko Widodo, atas nama negara, untuk tidak meminta maaf.

Menurut Hasyim, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, negara tidak pernah bersalah di kasus 65. Kalau ada yang salah, yang perlu disalahkan adalah rezim yang memerintah saat itu. "Negara itu bersifat permanen sedangkan rezim bersifat temporer," kata Hasyim.

Jadi, menurut dia, salah alamat jika kejadian yang terjadi saat rezim Soeharto memerintah namun yang harus meminta maaf adalah Rezim

Jokowi. "Mengapa kejadian zaman pemerintahan Pak Harto harus Pak Jokowi yang meminta maaf?,"



tambahnya.

Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menyarankan agar permintaan maaf diselesaikan lewat pendekatan HAM. Namun, dia juga mengkritik soal proses penanganan kasus-kasus HAM yang terjadi. Dia melihat proses penanganan HAM juga harus berdasarkan UUD 1945. Tidak berdasarkan tekanan-tekanan dari pihak luar atau internasional.

"Komnas HAM kita masih kalah dengan LSM HAM yang dipandu dan dibiayai gerakan HAM internasional," katanya.

Hasyim meminta Jokowi berhati-hati soal ini. Desakan untuk meminta maaf itu bisa jadi akan jadi beban politik, ekonomi bahkan keamanan nasional. "Bahkan (negara) bisa terjadi keguncangan," tutupnya.

Presiden Minta Kejagung Segera Proses Hukum Samadikun Hartono

Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP, mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk segera memproses buron BLBI Samadikun Hartono.

Permintaan ini setelah presiden mendapat laporan dari BIN mengenai penangkapan Samadikun di China saat hendak nonton F1

"Presiden sudah mendapatkan laporan mengenai penangkapan Samadikun. Presiden sudah memerintahkan Kepala BIN dan Jaksa Agung untuk melakukan langkah-langkah sesuai koridor hukum," kata Johan Budi, Senin (18/4).

Setelah nanti tiba di tanah air, Samadikun yang telah divonis 4 tahun itu akan langsung dieksekusi oleh pihak Kejagung.

"Proses pemulangnya dilakukan berdasarkan mekanisme internasional yang disepakati dan sesuai dengan hukum negara China. Proses ini tentu memerlukan waktu," ucap dia. *Karel Stefanus Ratulangi*



Bela Negara dengan Kecerdasan Kewargaan

Komitmen bela negara sangat dituntut ketika negara saat ini menghadapi banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dengan segala macam krisis yang ditimbulkannya. Hal ini sejalan dengan imperatif konstitusi kita. Menurut pasal 30 (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

Meski demikian, usaha bela negara tidaklah identik dengan wajib (latihan) militer. Pengertian bela negara yang lebih luas daripada wajib militer itu makin terasa relevansinya dalam era peperangan non-konvensional, yang kerap disebut sebagai “proxy war”.

Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, melainkan berupa serangan ideologis dan “kekuatan lunak” lainnya dengan menggunakan “pemain pengganti” untuk mempengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (the center of gravity) dan para pemuka pendapat (critical mass), yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan “pemain-pemain” kuat (major powers).

Dalam peperangan non-konvensional ini, sumber ancaman yang memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara (korporatokrasi).

Bela Negara dalam Konteks Keamanan Insani

Perkembangan ini juga memaksa kita untuk meninjau ulang pemahaman tentang keamanan (security). Dengan berakhirnya perang dingin, bersamaan dengan meluasnya pengaruh globalisasi peran aktor-aktor

non-negara, pengertian tradisional tentang keamanan yang berfokus pada keseimbangan dan kapabilitas militer mulai bergeser menuju konsep baru yang mencakup ‘keamanan dari berbagai ancaman kronis yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti kelaparan, penyakit, dan represi’ dan juga ‘proteksi dari gangguan seketika dan menyakitkan dalam pola hidup sehari-hari. Maka muncullah istilah “Human security” (keamanan insani) yang secara luas dapat didefinisikan sebagai “proteksi individual dari pelbagai risiko terhadap keselamatan fisik dan psikologis, martabat dan kesejahteraan”.

Konsepsi keamanan insani mentransformasikan persoalan “security” dari pengertian tradisionalnya yang berfokus pada keselamatan negara dari ancaman militer menuju perhatian pada keselamatan orang dan komunitas. Meski hal ini tidaklah berarti mengabaikan keamanan negara. Keamanan insani menjanjikan fokus pada individual dan masyarakat, tetapi lebih dari itu juga pada nilai (values) dan tujuan (goals) seperti martabat (dignity), kesederajatan (equity), dan kerukunan (solidarity). Human security meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.”

Dengan pergeseran-pergeseran tersebut, terbentanglelah di hadapan kita medan bela negara yang amat luas. Setiap warga bila mengambil peran yang berbeda dalam usaha bela negara sesuai dengan potensi, tugas dan fungsinya. Yang diperlukan di sini adalah kemampuan untuk mensinergikan peran-peran individual tersebut ke dalam kesatuan kepentingan dan ketahanan nasional dengan cara memperkuat “kecerdasan

kewargaan” (civic intelligence).

Bela Negara Melalui Kecerdasan Kewargaan

Banyak orang menawarkan jalan keluar dengan visi yang kabur. Krisis multidimensional yang melanda bangsa dicoba dicari akarnya pada persoalan jatidiri. Namun, konseptualisasi jatidiri itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas. Akibatnya, obat yang diberikan tidak berdasarkan diagnosa penyakit yang cermat.

Setelah ukuran-ukuran kecerdasan diri berbasis Intelligent Quotient (IQ) dianggap tak memadai untuk menjawab krisis kedirian, program pendidikan dan pelatihan kepribadian berpaling pada pengembangan jenis-jenis kecerdasan lain, terutama yang berbasis Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ).

Usaha menyelesaikan persoalan jatidiri dengan ukuran-ukuran tersebut memang patut diapresiasi. Persoalannya, apakah faktor-faktor IQ, EQ dan SQ itu sudah tepat menyasar sisi terlemah dari kedirian bangsa ini?

Untuk memberikan kerangka penilaian, kita harus ingat bahwa diri manusia terdiri dari dua bagian: kedirian yang bersifat privat (private self)—kedirian yang bersifat personal dan khas, dan kedirian yang bersifat publik (public-self)—kedirian yang melibatkan relasi sosial. Keduanya bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan.

Dengan kerangka itu kita bisa melihat bahwa problem kedirian manusia Indonesia pada dasarnya tidaklah bersumber dari kecerdasan diri yang bersifat privat. Secara IQ, manusia Indonesia bukanlah kategori kelompok manusia dengan defisit kepintaran. Tandanya bisa dilihat dari berbagai ajang olimpiade internasional di bidang matematika, fisika dan

kimia. Anak-anak Indonesia bukan saja bisa bersaing dengan utusan negara-negara terpandang seperti Amerika Serikat, Jepang dan China, bahkan berungki berhasil merebut predikat juara umum.

Manusia Indonesia juga secara umum relatif memiliki kematangan emosional. Berbagai tradisi budaya Indonesia sudah teruji dalam kesanggupannya menanamkan ketahanan emosional seperti kemampuan pengendalian diri untuk tidak berlebihan (ngono yo ngono ning ojo ngono), menjunjung tinggi yang positif, memendam yang negatif (mikul dhuwur, memendam jero), serta ketahanan dalam menghadapi kesulitan.

Kecerdasan spiritual manusia Indonesia juga relatif kuat. Manusia Indonesia pada umumnya bersifat “religius”. Dalam ukuran yang paling kasat mata, kita bisa melihat bagaimana rumah-rumah ibadah dan partisipasi ibadah yang makin meningkat, pertumbuhan calon haji dan umrah yang makin melambung, serta mejamurnya majelis-majelis zikir, penghayat tarekat, yoga, dan berbagai ajaran spiritualitas lainnya.

Sisi terlemah dari manusia Indonesia justru mencolok pada aspek kedirian yang bersifat publik. Hal ini dengan mudah dilihat, bagaimana orang-orang dengan latar pribadi yang baik dengan mudah hanyut dalam arus keburukan begitu terjun ke dalam politik. Kita juga bisa menyaksikan, hampir semua hal yang bersifat kolektif mengalami dekadensi: partai politik sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparat penegak hukum dan keamanan-pertahanan sakit, bahkan organisasi-organisasi keagamaan yang bersekala besar pun mulai menunjukkan gejala sakit.

Krisis pada kedirian yang bersifat publik ini mencerminkan kelalaian dunia pendidikan dan kebudayaan dalam mengembangkan “kecerdasan kewargaan” (Civic Intelligence Quotient). Pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal, dengan mengabaikan usaha mempertautkan keragaman kecerdasan personal itu ke dalam kecerdasan

kolektif-kewargaan. Masing-masing individu dibiarkan menjadi deret “huruf” alfabet, tanpa disusun secara kesatuan dalam perbedaan (bhinneka tunggal ika) ke dalam “kata” dan “kalimat” bersama. Akibatnya, banyak manusia yang baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya).

Pada hal, bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk, dengan pecahan yang banyak jumlahnya, tidak mungkin bisa dijumlahkan menjadi kebaikan bersama kalau tidak menemukan bilangan penyebut yang sama (common denominator), sebagai ekspresi identitas dan kehendak bersama. Oleh karena itu, pendidikan “kecerdasan kewargaan” berlandaskan Pancasila merupakan jurus pamungkas yang paling dibutuhkan.

Pengembangan “kecerdasan kewargaan” lebih fundamental bagi suatu bangsa yang ingin membebaskan diri dari kolonisasi individualisme yang mendorong kapitalisme dan kolonialisme. Postulat dasar dari individualisme meyakini bahwa relasi sosial bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Relasi sosial memang sesuatu yang terjadi pada individu namun tidak dipandang sebagai sesuatu yang mendefinisikan identitas dan mengkoordinasikan eksistensi individu. Ungkapan yang sangat terkenal dari individualisme menyatakan: “Kamu datang ke dunia seorang diri, dan meninggalkan dunia seorang diri.” Meski kenyataannya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia secara sendirian. Selalu ada ibu dan budaya komunitas yang menyertainya, bahkan mengantarnya hingga ke “tempat peristirahatan yang terakhir”.

Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang, bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, tergantung pada bentuk-

bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, pengembangan jatidiri bukan saja harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai “perwujudan khusus” (“diferensiasi”) dari alam. Pengembangan jatidiri juga harus memberi wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter perseorangan berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Maka dari itu, pengembangan “kecerdasan kewargaan” berbasis Pancasila merupakan kunci integrasi dan kemajuan bangsa. Namun, justru pada titik itulah simpul terlemah dari proses pendidikan dan pembangunan selama ini.

Kecerdasan kewargaan bisa dibangun dengan pendalaman dan perluasan wawasan kebangsaan dengan pandangan hidup Pancasila yang dikembangkan dengan semangat gotong-royong. Dalam realitas kehidupan bangsa saat ini, praktik gotong-royong masih berjalan, namun acapkali dalam konotasi toleransi negatif, “tolong-menolong dalam kejahatan dan pengrusakan”. Gerakan revolusi mental harus menempatkan gotong-royong itu dalam konteks toleransi positif, “tolong-menolong dalam kebaikan dan pembangunan”. Semangat toleransi yang memadukan kemandirian dan kerjasama dalam menunaikan pelayanan publik dan kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab dan bermutu sebagai wujud bela negara. ◻



Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4). Rapat tersebut membahas soal RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Jokowi: Pemerintah Tegas Tetap Ingin RUU Tax Amnesty Segera Disahkan

Presiden Joko Widodo menegaskan sikap pemerintah terkait pengampunan pajak yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty yang kini sedang dibahas di DPR.

“Saya sampaikan bahwa posisi pemerintah terkait tax amnesty sangat jelas bahwa pemerintah ingin ‘tax amnesty’ bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional, bagi kepentingan rakyat kita terutama dalam hal penerimaan negara,” kata Presiden Joko Widodo ketika memimpin Rapat Terbatas dengan topik “tax amnesty” di Kantor Presiden Jakarta, Senin (25/4).

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap menghormati proses legislasi yang sedang berlangsung mengingat RUU Tax Amnesty yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Hal kedua yakni bahwa Presiden juga ingin memperluas “tax based” Indonesia sehingga ke depan Indonesia akan mempunyai data yang lebih banyak lagi untuk wajib pajak di Tanah Air.

“Dengan ‘tax amnesty’ ini sebetulnya yang kita inginkan adalah repatriasi modal dari luar menuju ke dalam, ada ‘capital inflow’, ada arus uang masuk,” katanya.

Mantan Gubernur DKI itu mengharapkan ada arus uang yang kembali masuk ke Tanah Air nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Tujuan pemerintah dalam menerapkan “tax amnesty” sendiri sebelumnya ditegaskan oleh Kementerian Keuangan yakni untuk repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.

Selain itu untuk meningkatkan pertumbuhan nasional dan meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang.

Hal selanjutnya yakni bahwa “tax amnesty” bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

/Arbie Marwan

Jokowi: Sah Atau Tidak RUU Tax Amnesty, Reformasi Perpajakan Harus Tetap Jalan

Presiden Joko Widodo meminta agar reformasi perpajakan terus dilakukan terkait dengan pembahasan RUU Tax Amnesty yang sedang dibahas di DPR.

“Dengan atau tanpa ‘tax amnesty’ dan repatriasi saya juga memerintahkan pada Dirjen Pajak agar reformasi perpajakan terus dilakukan,” kata Presiden Joko Widodo ketika memimpin Rapat Terbatas dengan topik “tax amnesty” di Kantor Presiden Jakarta, Senin (25/4).

Ia juga menegaskan pentingnya untuk terus melakukan penegakan hukum kepada wajib pajak.

Khususnya jika ditemukan data-data terbaru mengenai ketidakbenaran dalam hal pelaporan pajak terkait rencana penerapan pengampunan pajak di Tanah Air.

“Selanjutnya juga penegakan hukum untuk wajib pajak juga terus dilakukan terutama apabila di kemudian hari ditemukan data baru mengenai ketidakbenaran dalam pelaporan pajak untuk pengampunan tersebut,” kata Presiden.

Namun, Presiden kembali menegaskan, jika nantinya Undang-Undang (UU) Tax Amnesty nantinya disahkan maka pemerintah harus segera menyiapkan instrumen investasi untuk menyambut masuknya modal ke Indonesia.

“Kita juga ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan,” katanya.

Presiden memperkirakan ada kemungkinan arus uang yang masuk bisa saja dalam posisi besar-besaran sehingga harus segera disiapkan investasi dalam bentuk portofolio maupun langsung.

Oleh karena itu, ia meminta jajarannya termasuk Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BKPM, hingga Kementerian BUMN untuk menyiapkan instrumen investasi yang bisa mengakomodasi masuknya arus uang tersebut. /Arbie Marwan

Menkopolhukan Belum Terima Laporan Adanya Konflik Sosial di Tolikara

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan, belum ada laporan tentang konflik sosial yang terjadi di Tolikara, Papua.

“Tidak ada konflik namun saya akan mengecek dulu,” kata Menkopolhukam setelah membuka rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM Papua, Senin (25/4).

Menkopolhukam kepada wartawan juga menjelaskan tentang keberadaan sejumlah penggiat HAM yang sedang melakukan pemetaan tentang dugaan kasus pelanggaran yang terjadi di Papua.

“Pemerintah akan berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang diawali dengan pemetaan sehingga tidak lagi menjadi beban bagi generasi muda,” tegas Luhut Pandjaitan.

Sementara itu Pangdam XVII



Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian dan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw secara terpisah membantah terjadinya konflik sosial di Tolikara.

“Laporan yang disampaikan Kepala BPBD Tolikara tidak benar,” tegas keduanya yang dihubungi secara terpisah.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan, dari laporan Danramil Karubaga tidak ada konflik sosial apalagi sampai membawa korban jiwa dan harta benda.

Dari laporan terungkap 9 April lalu

ditemukan jenazah Deki Wanimbo (29 th) yang diduga meninggal akibat dibunuh sehingga untuk meredam aksi balas dendam tanggal 15 April 2016, rombongan aparat keamanan TNI dan Polri untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat agar tidak terjadi insiden balas dendam.

Bahkan saat pertemuan berlangsung Kepala BPBD Tolikara tidak turut serta, tegas Mayjen TNI Siburian.

Hal senada juga dinyatakan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw yang menegaskan situasi di Tolikara aman dan tidak ada konflik sosial.

“Laporan itu tidak benar,” tegas Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw.

Sementara itu Kepala BPBD Tolikara dalam laporannya menyatakan konflik sosial antara penduduk Distrik Gika dengan Distrik Panaga, terjadi sejak awal April itu telah menyebabkan satu warga tewas, 32 orang luka luka dan puluhan rumah dibakar. /Nebby

Sunny: Ahok Selalu Dengarkan Masukan Pengembang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pernah mengesampingkan masukan-masukan dari para pengembang, yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Demikian disampaikan staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (25/4).

“Antara pak Ahok dengan semua orang sama, selalu dia mendengarkan masukan-masukan dari mereka (pengembang). Kemudian dipertimbangkan. Seperti itu semua, selalu,” kata Sunny, di gedung KPK.

Kendati demikian, Sunny enggan menjelaskan secara detil soal bagaimana pertimbangan itu dilakukan. “Untuk semuanya (dipertimbangkan).”

Pernyataan soal Ahok yang selalu mengakomodir kepentingan pengembang jadi menarik untuk

ditelusuri. Pasalnya, diketahui PT Agung Podomoro Land, salah satu pengembang dalam proyek reklamasi Pantura Jakarta, terungkap menyuap Ketua Komisi D DPRD Mohamad Sanusi.

Suap itu guna mempercepat proses pembahasan atau bahkan hingga ke pengesahan dua Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Jakarta. Dua raperda itu adalah payung hukum pelaksanaan reklamasi Pantura Jakarta.

Terkait suap-menyuap PT APL itu diduga merupakan hasil kesepakatan antara Chairman PT Agung Sedayu Grup Sugiyanto Kusuma dengan pimpinan DPRD DKI.

Informasi yang dihimpun, Aguan memang memerintahkan langsung Presiden Direktur PT APL untuk ‘menyelesaikan’ segala hal ke DPRD agar dua raperda terkait reklamasi itu dapat

disahkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang sendiri telah angkat bicara ihwal pertemuan pimpinan DPRD dengan Aguan. Dikatakan Saut, pihaknya kini sedang mendalami pertemuan tersebut.

Bahkan, Saut menyebut pertemuan itu masuk ke dalam rangkaian proses suap PT APL ke DPRD DKI.

“Apa isi pertemuan itu masih didalami oleh penyidik, tapi dipercaya pertemuan tersebut merupakan rangkaian pertemuan proses dan penyertaan masing-masing pihak terkait konstruksi kasus,” kata Saut dalam pesan singkatnya saat dikonfirmasi, Senin (25/4).

Pertemuan yang diduga digelar Januari 2016 dan dua hari sebelum tertangkapnya Sanusi itu, dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua M Taufik, Ketua Fraksi Hanura di DPRD DKI Muhammad Sangaji serta Selamat. /Wisnu Yusep



KPK Buat Analisa Aliran Uang Kasus RS Sumber Waras

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah membuat sebuah analisa soal aliran uang pengadaan tanah RS Sumber Waras, yang memiliki luas 3,6 hektar.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat ditanya soal dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bernilai Rp 800 miliar.

“Masih juga buat analisis,” ujar Saut lewat pesan singkatnya kepada Aktual.com, Senin (25/4).

Tapi sayangnya, Saut mengaku tidak tahu ketika dikonfirmasi secara detail apa saja yang dibahas dalam analisa tersebut. “Belum tahu (detilnya).”

Sebelumnya, ada dua ahli hukum yang berbicara mengenai subtransi pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah RS Sumber Waras. Keduanya, memfokuskan soal aliran keuntungan setelah peralihan hak atas tanah RS Sumber Waras terjadi.

Guru Besar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita salah satunya. Dia meminta KPK untuk menelusuri kemanakah keuntungan setelah Pemerintah Provinsi DKI membayar biaya peralihan hak tanah kepada RS Sumber Waras.

“Kalau sekarang masih dikuasai, masalahnya siapa yang rugi? Siapa yang memanfaatkan hasil dari tanah itu? Pasti penjual. Kemana uangnya? Masuk ke negara-kah, karena sudah dilepaskan kepada negara? Atau masuk kantong pribadi-kah? Ini KPK harus telusuri,” ujar Romli dalam sebuah diskusi di salah satu tv nasional, 12 April 2016.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda lebih berbicara kearah proses pengadaan, seperti halnya SK Tim Kajian yang dibuat tanggal mundur.

“Informasi yang saya terima, sejumlah dokumen dalam proses pengadaan tanah dimaksud, dibuat setelah Akta pelepasan hak ditandatangani,” ujar dia lewat pesan singkatnya, Rabu (20/4).

Hal itu, kata Chairul jadi fakta bahwa ada pelanggaran dalam pengadaan tanah Rp 800 miliar itu. “Jadi, dokumen-dokumen tersebut dibuat backdate, yang menggambarkan adanya perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana korupsi.” /Wisnu Yusep



Lapas Banceuy Kebakaran, Kerugian Capai Rp6 Miliar

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan kerugian akibat kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy mencapai Rp6 miliar.

“Kerugiannya sekitar lebih dari Rp6 miliar akibat kerusakan,” kata Yasonna dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Minggu (24/4).

Selain itu, Menkumham Yasonna juga menyebutkan ada beberapa pihak internal lapas dan warga binaan yang tidak nyaman dengan Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) yang kemudian memicu kerusakan dan kebakaran di Lapas Banceuy.

“Kemenkumham dengan Operasi Bersinar membuat ketidaknyamanan di beberapa lapas karena terus operasi, bahkan ada juga yang terganggu kepentingannya, baik internal maupun penghuninya. Tapi kami tidak mundur,” kata dia.

Yasonna menyatakan pihaknya akan terus melakukan upaya penguatan pemberantasan narkoba dan telepon genggam di lapas-lapas.

Khusus Lapas Banceuy, Yasonna mengatakan saat ini sudah dilakukan pembersihan. Personel polisi juga sedang melakukan penjagaan dan memberlakukan tanggap darurat



selama satu minggu sembari pembersihan.

Sebelumnya, Lapas Kelas II A Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat, terbakar, Sabtu (24/4) pagi, akibat kerusakan oleh para warga binaannya.

Kebakaran yang terjadi di enam titik lokasi tersebut menghanguskan beberapa bangunan lapas, salah satunya bagian administrasi.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Agus Toyib, pada Sabtu (24/4), menyatakan dokumen narapidana kasus narkoba di Lapas Banceuy ludes terbakar akibat kerusakan. /Ismed

KPK Cekal Sekretaris MA ke Luar Negeri

KPK mengirim surat permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, agar Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tidak bisa bepergian keluar negeri selama enam bulan.

“Baru saja ada surat perintah untuk pencegahan dari pimpinan KPK. Ditjen Imigrasi telah menindaklanjuti dan dicegah berdasarkan keputusan Pimpinan KPK No KEP-484/01-23/042016 atas nama Nurhadi, jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil),” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie di Jakarta, Kamis (21/4).

Pencegahan itu berlaku selama enam bulan efektif terhitung sejak tanggal 21 April 2016. “Status yang bersangkutan sebagai saksi.”

Pencegahan Nurhadi tersebut terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji yang diduga terkait dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KPK melakukan operasi Tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/4) di hotel Accacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat dan mengamankan panitia/sekretaris Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Edy Nasution dan seorang swasta Doddy Aryanto Supeno.

Penangkapan dilakukan sesuai Doddy memberikan uang Rp50 juta kepada Edy terkait pengaduan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di PN Pusat antara dua perusahaan dalam kasus perdata.

Setelah penangkapan, KPK juga mengeledah empat tempat yaitu di kantor Paramount Enterprise International di Centra Business District Jalan Gading Serpong Boulevard, Tangerang; kedua di kantor Edy Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; ketiga rumah Sekretaris MA Nurhadi di Jalan Hang Lekir; dan keempat ruang Nurhadi gedung MA Jakarta Pusat.

“Kami menyita dokumen dan uang yang belum dihitung dan akan dikonfirmasi ke sejumlah pihak,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

KPK juga masih akan mendalami perkara ini karena dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka hanyalah pembuka untuk kasus yang lebih besar lagi.

“Kami harapkan ini sebagai pembuka karena di belakangnya ada kasus cukup besar. Ada indikasi kuat berdasarkan keterangan-keterangan yang kita tangkap kemarin. Status berikutnya kita belum tahu akan tapi tergantung fakta dan data yang kita

kumpulkan dan alat bukti yang kita dapatkan.”

Dalam perkara ini KPK menetapkan dua tersangka yaitu panitera/ sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi suap adalah Doddy Aryanto Supeno dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan lama lima tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. /Wisnu Yusep

PPATK Akan Sandingkan Data Panama Papers, Offshore Lake Papers, dan PPATK Papers



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku saat ini tengah berkoordinasi dengan Dirjen Pajak

terkait penelusuran dana WNI yang ‘diparkir’ di luar negeri. Pihaknya akan menyandingkan antara data Panama Papers, Offshore Leaks Papers, dan PPATK Papers.

“Yang jelas kita punya data yang bisa disandingkan dengan Panama Papers, ada Offshore Leaks Papers dan ada PPATK Papers,” ujar Kepala PPATK Muhammad Yusuf di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/4).

Yusuf mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melaporkan transaksi-transaksi yang ada di dokumen Panama tersebut dengan

melihat tiap-tiap nama. Sampai saat ini baru ada kecurigaan saja tentang adanya unsur pidana.

“Tidak gampang mencari alat buktinya,” tambah Yusuf.

PPATK lanjut Yusuf memprioritas menelusuri antara lain profil, wilayah penyimpanan dana, jumlah uang, frekuensi transaksi, dan mata uang yang digunakan dari orang-orang yang ada di daftar tersebut.

Dia pun membenarkan ada nama sejumlah pejabat yang masuk di daftar-daftar itu. “Dari Panama ada, tapi tidak otomatis dia salah. Pejabatnya sekian, dari data offshore kita sekian. Enggak boleh disebut,” pungkas Yusuf. /Arbie Marwan



Mahasiswa Dari 80 Kampus Se-Indonesia Minta Jokowi Copot Rini Soemarno

Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dari Kabinet Kerja. Seruan ini disampaikan oleh gabungan mahasiswa pasca terbongkarnya dokumen Panama Papers yang menyeret nama Rini sebagai salah satu pemilik perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Dalam pernyataan persnya di Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (24/4) gabungan mahasiswa dari 80 universitas di seluruh Indonesia ini juga meminta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz untuk mundur.

“Ini sudah menjadi etika, di luar negeri para pejabat yang terlibat mengundurkan diri. Karena itu, kita minta Presiden Jokowi memecat Rini Sumarno. Kita juga minta Ketua BPK RI Harry Azhar mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya,” kata Koordinator Aksi Septian dari Universitas Muhammadiyah Ciputat, Jakarta, Minggu (24/4).

Menurut Septian, pihaknya konsisten dengan tuntutan yang



disuarakan sejumlah mahasiswa di Malaysia, Singapura bahkan sejumlah mahasiswa yang melakukan mogok makan di depan Gedung DPRD,

Yogyakarta. “Kami meyakini data-data yang diperoleh, Rini Soemarno menyimpan sejumlah uang Rp 67,4 miliar dengan status bebas pajak. Tapi kami percaya jumlah itu masih terlalu kecil,” terangnya.

Sekalipun begitu, kata dia, tentu saja azas praduga tak bersalah mesti dijunjung tinggi dalam negara hukum. “Karena itu, kita minta diperiksa dan diadili secara hukum sehingga bisa diketahui duduk perkara sebenarnya,” katanya.

Di sisi lain, besarnya jumlah uang dari orang-orang Indonesia yakni Rp 11.400 triliun yang tercantum dalam dokumen Panama Papers, jika direpatriasi atau dipulangkan dan dikenakan pajak, sangat berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Terlebih uang yang jumlahnya 6 kali lipat Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp 1.936 triliun jika dipulangkan akan melunasi utang Indonesia per 2015 yang mencapai Rp 4.376 triliun.

Dalam seruannya, para mahasiswa mengatakan, siap melakukan aksi besar atas nama Mahasiswa Indonesia pada 2 Mei 2016 bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional. Mereka juga menyerukan pada Presiden Joko Widodo melakukan repatriasi atau menarik pulang uang dari Indonesia sebesar Rp 11.400 triliun seperti tercantum dalam dokumen Panama Papers. “Kewajiban pajak atas uang sebesar Rp 11.400 triliun bisa digunakan bagi kesejahteraan rakyat, membangun sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya,” imbuhnya.

“Kami juga meminta Presiden Joko Widodo menyita dan memerintahkan aparat hukum mengusut tuntas asal muasal uang sebesar Rp 11.400 triliun yang ditengarai bisa saja berasal dari kegiatan melanggar hukum seperti korupsi, pencucian uang, hasil kejahatan narkoba dan lain-lain,” kata Septian menambahkan.

/Wahyu Romadhoni



Balai Konservasi Borobudur Berencana Gugat Red Bull

Balai Konservasi Borobudur melalui “legal standing” Dirjen Kebudayaan atau Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud, bakal melakukan gugatan terhadap “Red Bull” atas video yang berisi aksi atlet parkour di Candi Borobudur.

Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Marsis Sutopo di Magelang, Senin (25/4), mengatakan berdasarkan masukan dari hasil koordinasi dengan sejumlah pihak intinya tidak ingin mendinginkan begitu saja kasus tersebut, tetapi tetap akan ada tindakan.

Ia mengatakan hal tersebut usai rapat dengan berbagai pihak yang terkait dengan Candi Borobudur, antara lain BKB, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Direktorat Pewarisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Sekretariat Ditjen Kebudayaan, Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud.

Dalam konteks tindakan, katanya, bisa saja peneguran pada pihak Red Bull, somasi, dan bisa juga melakukan penuntutan secara hukum, karena melakukan aktivitas di cagar budaya itu harus ada izin.

Ia menuturkan dalam rapat tersebut belum diputuskan siapa nanti yang akan menjadi legal standing, namun pihaknya akan melaporkan hasil rapat tersebut pada

Dirjen Kebudayaan.

Seperti diwartakan sebelumnya video Red Bull di Candi Borobudur diunggah di media sosial pada Jumat (18/3). Red Bull memosting video yang menampilkan atlet parkour melakukan berbagai aksi parkour atau free running.

Berdasarkan hasil investigasi, BKB menyakini bahwa video tersebut diambil secara ilegal karena tidak melalui izin resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Vidio berdurasi satu menit 22 detik tersebut, antara lain berisi seorang atlet berlari di pagar langkan, memanjat stupa dan sebagainya yang dapat membahayakan.

Marsis mengatakan meskipun hanya berdurasi pendek, berdasarkan analisis video kegiatan tersebut dilakukan pada 27, 28, dan 29 Februari 2016.

Ia mengatakan tindakan tersebut berpotensi pelanggaran hukum, tindakan yang tidak pantas atau tidak menyenangkan, karena sebagai candi warisan dunia digunakan untuk aksi seperti itu.

“Aksi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mencari celah yang kosong pada pagi hari setelah pengunjung ‘sunrise’ turun dan pada waktu pagi itu terjadi pergantian petugas dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk aksi,” katanya. /Nebby

Ini 34 Nama Bacagub DKI dari PDI-P



Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP DKI Gembong Warsono mengatakan ada 34 nama yang tercatat di hari terakhir pendaftaran bakal calon gubernur DPD PDI-P DKI, Senin (25/4).

Yakni dua nama dari kader internal PDI-P, dan 32 nama dari pendaftar yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran.

Berikut nama-nama tersebut:

Nama bakal Cagub DKI usulan kader PDI-P yakni: Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan 32 nama calon yang sudah mendaftar yakni:

1. Yusril Izha Mahendra
2. Hasnaeni
3. Riza Vilano Satria Putra
4. Teguh Santosa
5. Hasniati
6. Margono
7. Sugiman
8. Mahfud Djaelani
9. S. Azhari
10. Edysa Girsang
11. Dedi Irianto
12. Farhat Abbas
13. Gusjoy
14. M. Idrus
15. Pitrimawati
16. Harun Al Rasyid
17. Firdaus Djaelani
18. Beny Mokal
19. Marco Kusumawijaya
20. Adek Efril Manurung
21. Pardi
22. Zainal Arifin
23. Audy IZ Tambunan
24. Sukimin
25. Akhmad Syakhroza
26. Kaspudin Noor
27. Bambang Sungkono
28. Lulung
29. Sandiaga Uno
30. Luluk Nurhamidah
31. Endang Darmawan
32. Kwiee Siong Wey /M Vidia Wirawan



Menkes Janjikan Fasilitas Kesehatan untuk Daerah Tertinggal

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menjanjikan fasilitas kesehatan untuk daerah tertinggal lewat program Nusantara Sehat yang memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

“Bengkulu akan masuk dalam prioritas kami untuk program Nusantara Sehat yang dikhususkan melayani daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” kata Menteri Kesehatan, saat menyampaikan sambutan dalam peringatan ‘Hari Malaria Sedunia’ yang dipusatkan di Kabupaten Seluma, Bengkulu, Senin (25/04).

Menteri menyampaikan hal itu setelah mendengar pemaparan dari Bupati Seluma Bundra Jaya dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti tentang kondisi pelayanan kesehatan di daerah ini.

Menurut Menteri, program Nusantara Sehat digagas untuk melayani daerah yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena minimnya sarana dan prasarana.

“Penanganan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, harus ditangani secara holistik, dalam hal ini akses jalan menuju lokasi intervensi,” ucapnya.

Menurut Menteri, wilayah Kabupaten Seluma yang merupakan

daerah kabupaten tertinggal di Bengkulu akan masuk prioritas dalam program Nusantara Sehat pada 2017 mendatang.

Pada tahun ini, kata dia, program tersebut diterapkan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan daerah terluar dan terdepan Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar dan terdepan lebih sulit dilakukan karena keterbatasan infrastruktur dasar.

“Masih ada 100 desa tertinggal di Bengkulu yang membuat pelayanan kesehatan tidak optimal,” ucapnya.

Ketertinggalan desa-desa tersebut menurut Gubernur antara lain disebabkan infrastruktur jalan, listrik atau penerangan dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih sulit.

Untuk menjawab hal itu, Gubernur Bengkulu berharap pemerintah pusat turut mendukung pemerintah daerah melalui program Nusantara Sehat tersebut, selain komitmen pemerintah daerah mengentaskan ketertinggalan itu.

“Ada tiga program prioritas yang kami canangkan untuk lima tahun ke depan yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan,” kata ia menambahkan. // *Ferro Maulana*

Hari Pertama Kerja, Mabes Polri Prihatin Kantor Irjen Anton Charliyan Terbakar

Mabes Polri menyampaikan rasa prihatin terhadap Irjen Anton Charliyan, yang baru saja dilantik menjadi Kapolda Sulselbar atas kejadian kurang mengenankan di hari pertama dia bekerja.

Peristiwa kurang mengenankan itu adalah kantor Polda Sulselbar dilahap si jago merah pada Senin (25/4) pukul 04.00 WIT dini hari tadi.

“Kami menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi di Mapolda Sulselbar. Di saat hari pertama mungkin bapak Kapolda akan melaksanakan tugas ada peristiwa ini,” kata Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto dikantornya, Jakarta.

Dia menjelaskan, bagian yang terbakar adalah lantai dua dan tiga Mapolda Sulselbar. Sebanyak lima ruangan, yakni tiga di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan dua di ruangan Direktorat Reserse Narkoba, habis terbakar.

Bahkan menurut Agus, sebagian ruang arsip Polda Sulselbar juga turut terbakar. “Arsip sebagian besar memang ikut terbakar. Mudah-mudahan file masih ada. Nanti kami lihat karena memang di situ ruangan penyidik.”

Agus memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sementara itu, Agus mengaku, pihaknya hingga saat ini belum bisa menaksir jumlah kerugian akibat dari amukan si jago merah. // *Wisnu Yusep*





Fahri Hamzah Dipecat, Ini Sikap Kammi

Presidium Nasional Keluarga Alumni Kammi, Fitra Arsil menyatakan, akan menjaga nama baik Fahri Hamzah sebagai bentuk melindungi aset KAMMI.

“Semua aset harus kita lindungi dan pastikan aset-aset terjaga,” ucapnya usai acara Deklarasi Keluarga Alumni KAMMI Jabodetabek, Hotel Oasis Amir, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (24/4).

Sebab itu, Fitra menyarankan kepada seluruh elemen KAMMI untuk tidak mencampurkan proses persidangan Fahri Hamzah dengan emosi.

“Oleh karena itu hal-hal yang merusak ketokohnya dan *leadership*-nya harus dihindari. Misalnya, menghindari bahwa proses yang terjadi secara emosional sehingga merusak citra Fahri sendiri harus kita hindari karena merusak ketokohan Fahri Hamzah,” tambah Fitra.

Karenanya, lanjut Fitra, mengenai persidangan Fahri Hamzah dengan partainya, PKS yang telah mencopotnya, pihaknya akan menghormati proses persidangan dan menghormati keputusan persidangan. /Ismad



Yaqut Resmi Dilantik Sebagai Ketua Umum GP Anshor

Anggota DPR RI Yaqut Cholil Qoumas resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor.

Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, GP Anshor dibawah kepemimpinannya mengusung tema mewujudkan kemandirian organisasi untuk kemakmuran negeri.

Berikut susunan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor (PP-GP Anshor) Masa Khidmat 2015-2020:

Dewan Penasihat

Ketua : Dr. KH. As'ad Said Ali
Wakil Ketua : Prof. Dr. M. Nasir
Wakil Ketua : Sri Sultan Hamengku Bawono X
Sekretaris : Fahmi Akbar Idris

Dewan Instruktur

Ketua : H. Nusron Wahid
Sekretaris : Dr. H. Muhammad Aqil Irham

Pengurus Harian

Ketua Umum : Yaqut Cholil Qoumas
Waketum : Dhohir Al Farisi, Benny Ramdhani, Aam Haerul Amri
Sekretaris Jenderal : Adung Abdul Rahman
Bendahara Umum : Zainal Abidin

awal sebagai Ketua Umum GP Anshor, Yaqut bahwa GP Anshor memiliki anggota kepemudaan terbesar di Indonesia yaitu sekitar 1,7 juta. Menurut dia, yang harus pertama dimakmurkan yaitu organisasi pemudanya sebelum kemandirian sebuah negara.

“GP Anshor tetap mempertahankan posisi dalam Pancasila, tetap menjadi benteng utama UUD 1945. Posisi ini tegas tidak bisa ditawar lagi,” ungkap Yaqut.

Dia juga menjelaskan, ada anggota baru yang juga berasal dari elemen suporter yakni Ricard Ketua The Jakmania (suporter klub sepakbola Persija). Dia menginginkan kumpulan supporter lain seperti Viking (Persib), Bonek (Persebaya) akan bergabung pula.

“Semua kita ajak ke Anshor untuk menjadi pembela Pancasila dan UUD 1945,” pungkas dia.

perlu diketahui, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan ini. Fahri Hamzah terlihat datang berbarengan dengan Nusron Wahid, lalu diikuti Hasto Kristianto, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Yenny Wahid, Wakil Ketua DPR Oesman Sapta Odang, Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan sejumlah tokoh lainnya. /Sukardjito

Sementara itu, dalam pernyataan

A photograph of Samadikun Hartono, a man in a bright blue suit and tie, waving his right hand. He is walking through a crowd of people, some of whom are wearing dark clothing. The background is dark and out of focus.

LENSA AKTUAL

Buronan Kasus BLBI Samadikun Hartono Tiba di Indonesia

Terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono (tengah) dikawal Kepala BIN Sutiyoso (kedua kiri) serta pengawal lainnya usai turun dari pesawat di Bandara Halim PK, Jakarta, Kamis (21/4/2016) malam. Samadikun Hartono akhirnya ditangkap di Shanghai, China setelah buronan selama 13 tahun terkait penyalahgunaan dana BLBI sebesar Rp 169,4 Miliar di tahun 2003.

Munzir - Aktual



Bukan soal semata pengusuran Pasar Ikan yang membuat kegelisahan. Kesan kuat adanya aksi berstrategi, berencana dan berprogram untuk menghilangkan ingatan sejarah terhadap geopolitik Sunda Kelapa, asal muasalnya Kota Jakarta, kiranya jauh lebih mengganggu benak pikiran.

Ini salah satu bukti nyata betapa telah terjadi de-spiritualisasi agama yang kemudian membawa dampak dalam pengambilan kebijakan strategis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bukan saja rakyat kecil jadi korban sekaligus tumbal kepentingan kapitalisme berbasis korporasi dari asing, yang kemudian kawin-mawin dengan para kapitalis komprador lokal, dan didukung oleh kaki-tanganannya, yaitu kaum feodal modern yang antara lain bercokol sebagai aparat-aparat birokrasi Pemda DKI.

Melainkan menunjukkan adanya gerakan berstrategi, berprogram dan berencana untuk menciptakan sebuah budaya baru yang mendukung kawin-mawin antara kapitalis berbasis korporasi, kapitalis komprador dan kaum feodal modern yang menjelma sebagai para aparat birokrasi pemerintahan.

Dalam kaitan ini, Ahok hanya sekadar puncak gunung es.

Maka itu saya senang masih ada sejarawan seperti Bung JJ Rizal yang mampu mengkritisi pengusuran pasar ikan melalui sudut pandang yang cukup mengena. Bahwa pengusuran tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pelestarian warisan sejarah dari daerah-daerah yang jadi mata-rantai dari Wilayah Sunda Kelapa. Bahkan, menurut saya, justru ini merupakan prakondisi untuk memunahkan ingatan sejarah.

Seperti kata Juri Lina, penulis Swedia. Kalau ingin menaklukkan sebuah negeri, tanpa melalui sarana militer, cukup lakukan tiga langkah:

1. Kaburkan sejarahnya.
2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya.
3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan



Punahnya Geopolitik Sunda Kelapa

bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif.

Mengapa Pemerintah Pemda DKI Jakarta bisa begitu keblinger sampai-sampai bermaksud mengusur Pasar Ikan maupun salah satu lokasi di Luar Batang di kawasan Jakarta Utara?

Menurut saya ada hal yang jauh lebih krusial dibanding sekadar didorong oleh pertimbangan-pertimbangan komersial untuk

mengkosmopolitikan kota Jakarta. Pengusuran Kalijodo, Luar Batang maupun Pasar Ikan, sejatinya hanya gejala permukaan dari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Yaitu adanya gerakan berstrategi, berencana dan berprogram untuk merubah dan menghancurkan budaya dan kearifan lokal suatu daerah, sehingga muncul budaya baru yang memudahkan masuknya kapitalisme



Warga mengamankan barang-barang mereka saat eksekusi Penertiban kawasan Pasar Ikan Luar Batang di Jalan Pasar Ikan, RW04, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (11/4/2016).

asing dan gaya hidup hedonism kota besar atas nama arus globalisasi.

Yang harus kita cermati sekarang ini terkait campur-tangan asing di negara-negara berkembang, termasuk negeri kita, yaitu maraknya peran penting dari yang namanya para konseptor Pengembangan Budaya. Gejala ini sudah terlihat rancangan skemanya pada akhir musim panas 1998.

Sepertinya istilah Pengembang Budaya ini asyik-asyik saja, tapi sesungguhnya mereka-mereka ini terdiri dari para pakar berbagai bidang keilmuan, yang dipandu melalui satu gagasan pokok: Negara-Negara Berkembang hanya bisa maju, kalau mengikuti pola pemikiran,

nilai-nilai dan sikap yang diterapkan negara-negara di Amerika, Kanada dan Eropa Barat.

Visi-misinya adalah: Mengintegrasikan perubahan budaya ke dalam pembangunan politik-ekonomi yang berkonsep, berstrategi, berencana dan berprogram. Maka apa yang terlihat secara kasatmata melalui fenomena penggusuran Kalijodo, Luar Batang dan Pasar Ikan, sejatinya hanya merupakan pilot project atau proyek perintis belaka.

Strateginya, mendukung elemen-elemen strategis suatu negara, yang bermaksud memprakarsai perubahan budaya, sehingga model perekonomian liberal, demokrasi liberal berbasis multi-partai

parlementer, persaingan dalam dunia usaha dan sebagainya.

Jadi menarik ketika Sunny Tanuwijaya sejak 2010 ditempatkan sebagai staf magang di Pemda DKI Jakarta, bisa dibaca sebagai bagian dari adanya strategi seperti yang saya maksud tadi? Entahlah..

Yang jelas, pada tataran global, Lawrence E Harrison dan Samuel Huntington, sudah merancang hal ini sejak musim panas pada 1998 lalu. Melalui simposium yang digelar oleh Harvard University's Academy for International and Area Studies.

Secara lengkap hal ini bisa disimak dalam buku yang disunting Huntington dan Harrison, *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Yang amat mengganggu dan tersirat dalam buku ini adalah: Tidak mungkin anda bisa jadi bangsa yang maju sekaligus tetap berkepribadian sesuai dengan tradisi dan budaya bangsanya.

Buku yang aslinya bertajuk *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, saya kira sudah cukup menjelaskan terjadinya liberalisasi ekonomi politik besar besaran menyusul kejatuhan Suharto pada Mei 1998 dan berawalnya era reformasi. Segalanya memang serba berencana dan berprogram. Fakta bahwa UUD 1945 produk cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sejatinya sekarang sudah berubah menjadi UUD 2002 yang kodratnya sudah berubah menjadi liberal.

Terputusnya keterkaitan Pancasila sebagai wujud nyata kepribadian bangsa (dari segi budaya, adat dan keagamaan) dengan pasal-pasal yang jadi batang tubuh konstitusi UUD 1945, berarti tepatlah ungkapan Prof Dr Kaelan, Guru Besar Filsafat Universitas Gajah Mada: Bahwa kitalah satu-satunya bangsa di dunia, yang telah mengubur jatidiriya sebagai bangsa. • Hendrajit

Sembilan Wanita Mengaku Akan Terus Lakukan Aksi Menolak Pembangunan Pabrik Semen

Sembilan wanita asal Rembang, Jawa Tengah, mengaku akan terus melakukan aksi mengecor kakinya. Hal ini dilakukan sebagai aksi penolakan atas rencana pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jateng.

Rencana sembilan wanita ini karena aksi mereka di depan Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu kemarin, tidak membuahkan hasil nyata.

“Yang penting, kami akan terus melanjutkan aksi-aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang,” kata salah seorang wanita yang mengecor kakinya Giye, ketika tiba di Stasiun Tawang, Semarang, Jateng, Kamis (14/4).

Dalam aksinya selama di Jakarta, sembilan wanita itu tidak ditemui langsung oleh Presiden Jokowi Widodo, namun hanya ditemui Staf



Kepresidenan Teten Masduki dan Mensesneg Pratikno.

Giye mengungkapkan, perwakilan Presiden itu mengatakan, Presiden, berjanji akan memroses ulang izin pembangunan pabrik semen di Rembang. Salah satunya mengusahakan proyek pabrik semen batal dibangun di Rembang.

“Pak Presiden juga ngomong lewat utusannya kalau sedang mengusahakan supaya tidak ada pabrik semen di pegunungan Kendeng,” ungkapnya.

Kedatangannya sembilan wanita itu, disambut suka cita oleh warga gunung Kendeng yang menjemputnya di Stasiun Tawang Semarang. /Zaenal Arifin

Adik Bungsu Ahok ‘Terseret’ Skandal “The Panama Papers”

Ada ribuan individu maupun perusahaan di Indonesia, diduga ‘terseret’ skandal “The Panama Papers”.

Berdasarkan penelusuran Aktual.com, ternyata adik bungsu Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lety Indra, adalah salah satunya.

Sebab, dalam situs resmi Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) saat memasukkan kata kunci “Indonesia” di kolom pencarian, link: [https://offshoreleaks.icij.org/](https://offshoreleaks.icij.org/search?country=ID&q=&ppl=on&ent=on&adr=on-)

[search?country=ID&q=&ppl=on&ent=on&adr=on-](https://offshoreleaks.icij.org/search?country=ID&q=&ppl=on&ent=on&adr=on-), tertulis Fifi Lety Indra & Partners.

Hal ini terkonfirmasi ketika Aktual.com mengaitkan alamat kantor hukum Fifi Lety yang ada di situs ICIJ dengan di sejumlah website pribadi maupun resmi di beberapa blog yang dibuatnya, <https://fifilety.wordpress.com/> dan <http://fliandpartners.blogspot.co.id/>.

Dalam ketiga situs itu, tertulis kantor Fifi Lety Indra & Partner berada di Jl Bendungan Hilir IV No. 15, Jakarta Pusat. /Zaenal Arifin



Ribuan Massa Demo Soal Politisasi Dana Desa

Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa mempersoalkan dana desa dan pendamping desa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/4).

Massa yang mengatasmakan sebagai Badan Nasional Pendamping Desa (BNPD) berasal dari dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Adapun identitas massa yakni menggunakan ikat kepala dengan tulisan beragam. Ada juga berbagai macam spanduk bertuliskan suara-suara tuntutan terkait beberapa hal, di antaranya politisasi dan diskriminasi pendamping dana desa.

“Di balik baju hijau, kau coba merampas hak-hak kami, politisasi, dan nepotisme hingga upeti sana-sini,” teriak massa dalam yel-yel sembari berjalan menuju Istana Negara. /Sukardjito

Pemerintah Anggarkan Rp44 Triliun Tingkatkan Kompetensi TKI

Pemerintah mengusulkan untuk mengalokasikan Rp44 triliun guna mempercepat upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional melalui pelatihan dan pendidikan vokasional untuk lima tahun mendatang.

“Soal anggaran, diperkirakan untuk lima tahun ke depan perlu sekitar Rp44 triliun. Itu kurang dari 10 persen dari anggaran pendidikan umum yang sebesar Rp414 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/4).

Rizal se usai pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di kantornya, mengatakan pihaknya mengusulkan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar menjadi tenaga profesional Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasional yang masif.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan akan dibahas dalam rapat kabinet.

Menurut Rizal, dasar analisa anggaran pelatihan dan pendidikan vokasional yang diusulkannya itu lantaran selama ini program kejuruan itu secara fisik sudah tersedia berupa sekolah kejuruan atau Balai Latihan Kerja (BLK).

“Fisiknya sudah ada. Yang penting itu ‘trainer’-nya (pelatihnya). Nanti di tiap BLK akan ada ‘country partner’ dan ‘corporate associate’,” katanya.

Rizal menjelaskan, “country partner” adalah kerja sama dengan negara lain dalam hal pelatihan seperti penyediaan instruktur, kurikulum dan peralatan kerja.

“Misal, Jerman yang bagus di permesinan atau otomotif. Nanti infrastruktur dan peralatan kita kerja sama dengan Jerman,” katanya.

Sedangkan “corporate associate” adalah peran perusahaan di industri terkait dari negara pemberi bantuan yang turun langsung menyesuaikan pengajaran sesuai tren industri yang



ada.

“‘Corporate associate’ itu perusahaan yang terkait, misalnya perusahaan terkait seperti BMW, Mercy, pengajarnya akan langsung dari perusahaan itu,” katanya.

Rizal menambahkan, meski secara fisik lembaga pelatihan dan pendidikan vokasional sudah tersedia, skalanya yang kecil akan dibuat lebih masif.

Ia juga menginginkan agar ada spesialisasi lembaga pelatihan sesuai sektor unggulan di daerah setempat.

“Jadi ada spesialisasi masing-masing. Terutama di sektor unggulan kita agar dapat kompensasi dan pengkajian lebih tinggi,” katanya.

Menaker Hanif Dhakiri, dalam kesempatan yang sama, mengatakan selama ini dua pola pelatihan dan pendidikan berupa “country partner” dan “corporate associate” tersebut telah dilakukan pihaknya.

“Pengalaman di Kemenaker, kami sudah pakai pola itu. Tapi ini yang hendak kami dorong menjadi masif. Pokonya agenda kami mau dorong percepatan dan masifikasi,” katanya.

/Arbie Marwan

Moratorium Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli mengatakan rapat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyepakati penghentian pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

“Kami meminta untuk sementara kita hentikan, moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta, sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi,” terang Rizal dalam jumpa pers usai rakor dikantornya, Senin (18/4).

Disampaikan, dalam setiap kebijakan publik adanya tarik-menarik kepentingan itu sebenarnya hal yang wajar terjadi. Akan tetapi, setiap kebijakan yang berkaitan dengan publik hendaknya mengakomodir tiga kepentingan besar. Pertama, kepentingan negara, kedua kepentingan publik atau rakyat, dan terakhir kepentingan swasta atau pengembang.

“Jadi tidak bisa kita merumuskan kebijakan hanya mementingkan satu pihak, kalau negaranya saja, rakyat belum tentu dapat apa-apa. Kalau rakyat saja, bisa-bisa tidak jalan. Kalau swasta saja juga enggak betul,” jelasnya.

Rizal berharap hasil rakor yang berlangsung sangat kondusif tidak disikapi secara emosional oleh pihak-pihak tertentu. Boleh saja debat secara terbuka maupun debat panas namun kepala harus tetap dingin.

“Kita semua sepakat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Jadi kita biasakan membahas masalah kontroversial untuk tetap berfikir, berhati dingin, debat keras boleh, tetapi tetap berhati dingin tidak emosional karena karena kita bisa cari solusi terbaik,” terangnya.

Jumpa pers sendiri diikuti Menteri LHK Siti Nurbaya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmanya Satyamurti Poerwadi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karel Stefanus Ratulangi



Jejak Jokowi di Reklamasi

Jumat pagi (8/4) Presiden Joko Widodo mengundang seluruh kepala daerah untuk mendapat arahan di Istana Negara, Jakarta. Sebanyak 471 kepala daerah hadir dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran menteri Kabinet Kerja. Tapi tidak ada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam acara itu.

Padahal Ahok tengah menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

mengungkap suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Zonasi terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ia baru muncul siang hari di Istana Negara. Tidak seperti kepala daerah yang lain Ahok memang istimewa di mata Jokowi.

Jokowi tampaknya selalu membuka pintu kapanpun bila Ahok ingin bertemu. Termasuk siang itu. Ahok diketahui berada di Istana dari mobil dinas bernomor B 1966 RFS yang parkir di dekat pintu

masuk Istana Negara, sekitar pukul 13.00 WIB. Suasana Istana relatif sepi, setelah acara rapat sebelumnya berakhir sekitar pukul 10.30 WIB.

Ahok yang berbatik cokelat terlihat lalu keluar sekitar pukul 14.00 WIB dari Istana Negara seorang diri. Saat ditanya keperluan menemui Presiden Jokowi, Ahok mengatakan melaporkan *groundbreaking* proyek Semanggi yang baru pagi tadi dilakukan.

"Laporin *groundbreaking* Semanggi, nanti tanggal 17 Agustus

Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4).



Menko Maritim Rizal Ramli (tengah), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri), dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan), memberikan keterangan pers se usai rapat koordinasi terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (18/4). Rapat koordinasi antara pemerintah dengan Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.

udah *clear* enggak masalah. Kalau soal peraturan itu sudah *clear*, tahu kok beliau. Cuma bicara soal reklamasi soal kemungkinan seperti apa, ya saya sampaikan secara aturan tidak ada masalah," kata Ahok.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum menanggapi polemik seputar proyek reklamasi Teluk Jakarta. Meskipun sejumlah menteri kabinet meminta Pemprov menghentikan proyek yang saat ini tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Sebut saja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara proyek reklamasi tersebut sampai seluruh persyaratan terpenuhi. "Kalau saya bukan lebih baik ditunda dulu, malahan sesuai fakta-fakta lapangan dan sesuai penemuannya, itu harus dihentikan sementara," ungkap Siti.

Hal tersebut disampaikan di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (18/4).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mencapai kesepakatan dengan Komisi IV DPR untuk merekomendasikan penghentian proyek reklamasi. Namun rekomendasi yang disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut tidak membuat Ahok tunduk.

"Beliau hanya rekomendasi loh, kalau rekomendasi hentikan itu artinya beda," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/4).

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah meminta agar reklamasi di 17 pulau yang izinya dikeluarkan oleh Ahok tersebut tidak dilanjutkan untuk waktu sementara. Permintaan JK tersebut malah ditanggapi keras oleh Ahok. Mantan Anggota Komisi II DPR RI ini meminta JK menunjukkan dasar hukum penghentian proyek reklamasi.

"Kalau Pak JK (Jusuf Kalla) minta dihentikan (sementara), maka saya bilang banyak juga yang minta dihentikan, dasar hukumnya mana? Kalau kirim surat ke saya resmi ya saya akan pelajari kalau enggak saya digugat," ujar Ahok di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (17/4).

2017 diresmikan," ucap Ahok sebelum masuk mobil.

Pertemuan berlangsung empat mata. Tidak lama kemudian Ahok sempat menjawab pertanyaan wartawan. Ia mengaku sempat membahas proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan Jokowi yang sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut. Khususnya terkait perbedaan pendapat antara Ahok dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal izin reklamasi.

"Beliau tanya kalau soal Bu Susi

Pemerintah pusat seperti tidak memiliki daya untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Terakhir bahkan Ahok menyebut Presiden Joko Widodo menyetujui proyek reklamasi yang saat ini menuai polemik.

“Secara prinsip presiden pernah jadi Gubernur, bagi presiden reklamasi nggak ada yang salah. Seluruh dunia ada reklamasi,” ungkap Ahok di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/4).

Benarkan Jokowi mendukung tindakan Ahok memberikan izin reklamasi Teluk Jakarta? Dan seberapa besar peran Jokowi selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Penelusuran Aktual.com menemukan sejumlah kaitan antara Presiden Jokowi dan reklamasi Teluk Jakarta. Salah satunya adalah bukti rekaman video Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi IV DPR tanggal 12 Desember 2013.

Dalam rapat tersebut Jokowi hadir saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hadir bersama dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI terkait memaparkan proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta. RDP digelar di ruang rapat Komisi IV itu dipimpin oleh Muhammad Romahurmuziy atau Romy yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV dan dihadiri oleh sejumlah anggota. Tidak tampak Ahok dalam rapat tersebut.

Paparan Pemprov DKI Jakarta dalam RDP tersebut berjudul “Pengembangan Pantura Jakarta” disampaikan oleh Jokowi. Tidak semua anggota komisi IV DPR yang menyetujui konsep reklamasi yang disodorkan oleh Jokowi saat itu.

Salah satunya yang menjadi pertanyaan anggota komisi IV saat itu tentang nasib nelayan jika proyek reklamasi izinya disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta. Jokowi pun menjanjikan akan memberikan lahan sebesar 5 persen dari total lahan hasil reklamasi untuk pemukiman nelayan berupa rumah susun siap huni.

“Tentang nelayan kita tidak ingin

Ribuan Nelayan dari berbagai wilayah melakukan aksi dan penyegelan pulau “G” sebagai simbol penolakan reklamasi teluk Jakarta di proyek reklamasi pulau “G”, Jakarta, Minggu (17/4/2016). Dalam aksinya mereka menuntut agar seluruh proyek reklamasi di teluk Jakarta dihentikan dan Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perpres 54 Tahun 2008 yang melegitimasi proyek reklamasi dicabut.



mengusik nelayan karena nantinya ada pintu-pintu untuk masuk dan keluar dalam area itu. Kemudian yang paling penting. Bahwa dari 5.100 hektar yang akan dikerjakan untuk reklamasi ini. Nantinya 5 persen akan diberikan kepada pemerintah provinsi. Dan 5 persen itulah, jadi sebanyak kurang lebih 250 hektar diberikan ke kita inilah yang nanti akan kita pakai untuk membangun rusun yang akan kita berikan pada nelayan,” ujar Jokowi.

Sejumlah fakta terungkap tentang proyek reklamasi dalam pertemuan

tersebut. Termasuk soal perizinan yang diklain merupakan warisan Gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo semua terjawab. Jejak Jokowi di reklamasi dengan nilai investasi sebesar Rp500 triliun tergambar dalam rapat tersebut, sebelum akhirnya empat bulan kemudian Jokowi diusung sebagai Capres oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Jokowi dalam rapat itu juga menjelaskan perihal perizinan untuk melakukan reklamasi di 17 pulau. “Mengenai izin sekali lagi



saya sampaikan, izin reklamasi baru kita berikan pada satu pulau. Dan ini diberikan oleh gubernur yang lama (Foke). Baru yang lainnya baru diberikan izin prinsip,” ujar Jokowi .

Pernyataan Jokowi ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ahok beberapa waktu lalu. Ahok menyebut izin reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta hanya melanjutkan izin yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta era Fauzi Bowo.

“Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan. Karena sifatnya bukan kasih izin baru kan?

Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (11/2).

Faktanya Foke hanya mengeluarkan satu izin reklamasi yang pada tahun 2013 sudah kadaluwarsa.

Jokowi juga sempat menyampaikan wacana untuk memindahkan pusat pemerintahan di lahan reklamasi.

“Kalau pemerintah pusat keputusan politik dan keberanian memutuskan saya kira ditempat inipun bisa untuk memindahkan

pusat pemerintahan, bukan memindahkan Jakarta. Pusat pemerintahan bisa kita pindahkan di situ, karena kita punya lahan 5.100 hektar,” ujarnya seperti dikutip dalam video tersebut.


Selain memindahkan pusat pemerintahan Jokowi mengatakan reklamasi di Teluk Jakarta juga akan mengurangi banjir rob yang sering melanda Pantai Utara Jakarta. Jokowi juga mengklaim reklamasi akan berguna untuk penyediaan air bersih yang selama ini dipasok dari waduk Jatiluhur.

Dalam paparannya di depan Komisi IV DPR kala itu Jokowi mengatakan dilahan reklamasi akan juga dibangun pelabuhan, rumah susun hingga bandara. Ia sempat menyebut sejumlah negara yang sukses melaksanakan reklamasi.

“Kita bukan ngopi atau tiru-tiru, kita bisa belajar dari sana dan yang kita punya nanti jauh lebih baik dari mereka,” ujarnya.

Jokowi juga menambahkan reklamasi 17 pulau juga akan membuka 500 ribu lapangan pekerjaan baru. Paparan itu disampaikan Jokowi empat bulan sebelum akhirnya ia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Calon Presiden pada tanggal 14 Maret 2014.

Dua tahun berselang baru terungkap proyek reklamasi Teluk Jakarta menuai polemik. Puncaknya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan pihak pengembang dari PT Agung Pudomoro Land (APL).

Proyek yang akan bernilai investasi Rp500 triliun itu ternyata banyak menyalahi aturan. Izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai catat secara hukum. Belum lagi penolakan kelompok nelayan. Sampai yang terbaru adalah tindakan pengegelan yang dilakukan LSM dan nelayan pada pulau G atau yang dikenal dengan Pluit City karena dinilai telah merusak lingkungan. 

Wahyu Romadhony

Setya Novanto: Data Pengusaha Yang Simpan Dana di Luar Negeri Ada di Laci Presiden



Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4). Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto yang hadir dalam pertemuan mengatakan bahwa semua fraksi di DPR mendukung pembahasan RUU Tax Amnesty, terutama Fraksi Golkar.

“Tidak hadir Demokrat. Semua fraksi sangat mendukung kebijakan presiden. Terutama ketua fraksi Golkar,” ujar Novanto di kompleks

parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (14/4).

Menurutnya, semua pihak mendukung *capital flow*, sehingga orang yang masukkan uangnya dari luar mendapat jaminan keamanan dan jaminan secara hukum. Namun, harus pula dirumuskan oleh pihak terkait.

Tax Amnesty, lanjutnya, diyakini akan membantu keadaan investasi di Indonesia, baik didalam masalah infrastruktur, pertanian, maupun investasi lainnya.

“Dan sudah melalui pengkajian bukan saja pemerintah tapi yang terkait yaitu BKP perindustrian, perdagangan untuk diikuti dengan UU lalu lintas devisa negara,” katanya.

Novanto menyebutkan, Tax Amnesty akan menjadi prioritas karena penting untuk menangani

keterlambatan ekonomi Indonesia. Selain itu, dirinya juga mendukung usulan RUU Repatriasi Modal. Namun, kata dia, wajib pajak juga harus berhati-hati, sebab dikhawatirkan ada yang membonceng masalah tersebut.

“Jadi jangan ada yang bonceng tapi bener dilakukan dan presiden sudah mengetahui data-data yang akurat dana yang terparkir diluar negeri di semua negara,” ungkapnya.

Menyinggung darimana sumber data yang didapat Presiden Jokowi, Novanto mengatakan sudah ada di laci presiden. Untuk itu, diharapkan para pengusaha sudah siap melaporkan uangnya yang diparkir diluar negeri.

“Ya beliau sudah sangat mengetahui semua. Rahasiannya ada di laci presiden. Diharapkan pengusaha sudah menyiapkan pelaporan pajak karena presiden sudah mengetahui bukan hanya di Panama tapi negara lain juga,” tandas Novanto. /Karel Stefanus Ratulangi

Komisi VII DPR: Pinjaman Bank Untuk Akuisisi Newmont Melanggar Hukum

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai alokasi pinjaman Bank Pembangunan China merupakan pelanggaran kesepakatan, bahkan pelanggaran hukum.

“Kan dulu katanya untuk infrastruktur. Tapi kalau diperjanjikan untuk infrastruktur lalu dipergunakan untuk tujuan lain itu pelanggaran. Pelanggaran kesepakatan bisa masuk pelanggaran hukum,” ujar Gus Irawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Mantan Dirut Bank Sumut ini menegaskan, pinjaman kredit tak boleh dipergunakan untuk membeli saham atau mengakuisisi suatu perusahaan. Sebab, hal itu dilarang dalam dunia perbankan Indonesia.

“Sepanjang yang saya tahu kredit perbankan itu tak boleh untuk membeli saham termasuk akuisisi, itu kan beli saham. Itu dilarang di perbankan Indonesia,” ungkap Gus



Irawan.

Mantan Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan ini menjelaskan, meminjam dana untuk tujuan beli saham itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Menurutnya, peminjaman uang untuk mengakuisisi, membeli saham atau mengambil alih perusahaan sesungguhnya tidak lazim dilakukan.

“Karena peminjaman itu kan diberikan dalam sebuah analisis bahwa dari kegiatan usaha itu akan bisa dikembalikan. Intinya perbankan nasional kita tidak mengakomodir yang sifatnya spekulatif,” pungkasnya.

Diakui, hingga kini belum ada pembahasan terkait persoalan

tersebut dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM sebagai pengawas perusahaan tambang, yakni PT Newmont Nusa Tenggara maupun PT Medco Energi Internasional Tbk.

“Belum ada. Pemerintah belum kasih informasi,” tandas Politikus Partai Gerindra itu.

Diketahui, Pinjaman uang sebesar US\$3 miliar atau sekitar Rp40 triliun dari Bank Pembangunan China (CDB) yang ditanam di tiga bank pemerintah, akan dialokasi untuk menutup biaya proyek infrastruktur.

Namun nyatanya, ketiga bank penerima pinjaman yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) malah mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk industri manufaktur.

Bahkan, dua bank nasional yakni Bank Mandiri dan BNI disebut-sebut mendanai akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. Artinya, Medco meminjam dana kepada Bank Mandiri dan BNI. /Karel Stefanus Ratulangi

Mabes Polri Mutasi Lima Kapolda dan Sejumlah Perwira Tinggi

Mabes Polri kembali melakukan mutasi dan promosi di jajaran pejabat tinggi dan perwira menengah, di pertengahan April 2016 ini.

Salah satu pejabat utama Polri yang mendapat rotasi ialah Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan yang menempati Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat.

Jabatan Kapolda Sulselbar sebelumnya dijabat oleh Irjen Pudji Hartanto. Namun ia telah memasuki masa pensiun dan kini Pudji diangkat sebagai Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto membenarkan adanya telegram rahasia pergeseran sejumlah perwira tinggi dan pejabat di lingkungan Mabes Polri.

“Hari ini Mabes Polri mengeluarkan TR mutasi lima Kapolda dan beberapa pejabat utama,” kata dia melalui pesan singkat Kamis (14/4).

Dalam TR bernomor ST/936/IV/2016 dan ditandatangani ASSDM Polri Irjen Pol Sabar Rahardjo itu terdapat 25 pati serta pamen yang dimutasi.

Adapun yang mendapat mutasi ialah Komjen Pol Djoko Mukti Haryono sebagai Kabaintelkam, dia dimutasi menjadi Pati Baintelkam Polri dalam rangka pensiun. Komjen Djoko Murti merupakan perwira paling senior jika dilihat dari lulusan Akademi Kepolisian 1991.

Posisi dia digantikan oleh Irjen Pol Noer Ali yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Sementara posisi Noer Ali diisi oleh Irjen Pol Condro Kirono yang kini masih menjabat sebagai Kakorlantas Polri.

Kekosongan di Kakorlantas akan diisi oleh Brigjen Pol Agung Budi Maryoto. Agung sendiri kini masih menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen



Pol Erwin Triwanto akan mengisi Kapolda Kalsel.

Posisi Erwin akan digantikan Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat yang kini masih menjabat Karorenmin Baintelkam. Kemudian Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Endaryoko akan mengisi tempat Wahyu Hidayat.

Lalu Kapusiknas Bareskrim Polri Brigjen Hendrawan akan menjadi Wakapolda Kaltim. Posisi yang ditinggalkannya akan diisi oleh Kombes Mohammad Hasan Amrozi yang sebelumnya menjabat Sespusiknas Bareskrim Polri.

Anton Charliyan yang menjabat sebagai Kapolda Sulsel akan digantikan oleh Brigjen Pol Boy Rafli Amar yang kini masih menjabat sebagai Kapolda Banten. Lalu Brigjen Ahmad Dofiri yang menjabat Karobinkar SSDM Polri akan menempati posisi Boy Rafli.

Kemudian Kombes Priyo Widyanto yang kini menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Selatan akan mengisi posisi Ahmad Dofiri.

Untuk posisi penting lainnya ialah Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Mochammad Taufik digeser menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol Polri. Posisi dia diisi oleh Kombes Nana Sujana yang sebelumnya menjabat Wakapolda Jambi.

Lalu Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Bambang Waskito digeser menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol Polri. Posisinya akan digantikan oleh anak buahnya yakni Kombes Agung Setya yang merupakan Waditripideksus. /Wahyu Romadhoni

Dubes Sebut China Akui Perairan Natuna Milik RI

Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo menilai Indonesia harus melibatkan diri secara aktif untuk menjaga stabilitas kawasan laut China Selatan.

Menurutnya, kawasan itu merupakan jalur strategis dalam perputaran roda perekonomian dan distribusi energi. Untuk itu dia mendorong penyelesaian secara dialog di tiap persengketaan demi menjaga kepentingan bersama pada kawasan itu. “Jalur laut China ini jalur penting, jalur ekonomi dan jalur energi yang harus diselamatkan,” tutur dia, di Jakarta, Senin (18/4).

Pria kelahiran Jawa Barat itu menegaskan apa yang terjadi belakangan ini, ada kapal nelayan China masuk ke perairan Indonesia, hanya masalah ‘overlapping’ atau tumpang tindih semata.

Dia membantah kalau itu disebut sebagai bentuk aksi klaim wilayah oleh China. Sebab kedaulatan Indonesia pada perairan Natuna dengan tegas telah diakui China di tahun 1990 saat normalisasi hubungan kedua negara.

“Disampaikan Menteri Luar Negeri Tiongkok ke Menlu RI Almarhum Ali Alatas di tahun 1990 saat normalisasi hubungan kedua negara. Mereka (China) dengan jelas mengatakan posisi Natuna bagian dari kedaulatan Indonesia dan mereka tidak memiliki persengketaan di kawasan itu,” imbuhnya.

Lalu disampaikan kembali pada saat Hassan Wirajuda dan diulangi lagi saat Menlu Marty Natalegawa. “Lalu disampaikan ke ketua komisi satu di Tiongkok. Tidak ada klaim segala macam dari Tiongkok atas wilayah perairan Natuna,” pungkas mantan Atase Republik Indonesia untuk Third Committee PBB itu.

/M Vidia Wirawan

MENAKAR NYALI JOKOWI UNGKAP PENGEMPLANG PAJAK DI SKANDAL "PANAMA PAPERS"



Panama, negeri mungil di bentangan Laut Karibia itu belakangan menyita perhatian publik dunia, termasuk Indonesia. Bukan gara-gara eksotisme alam maupun Terusan Panama-nya yang populer itu, melainkan karena disulut terbongkarnya daftar nama-nama para kalangan superkaya dari belahan negara yang menyembunyikan dananya di sana.

Nama-nama itu mencuat dalam sebuah dokumen ikutan dari yang disebut *The Panama Papers* (Dokumen Panama) yang diungkap International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dokumen itu mengungkap aksi para kalangan super kaya yang memendam kekayaannya di negeri suaka pajak (*tax havens*) atau surga pajak (*tax heaven*) dengan menggunakan perusahaan cangkang (*shell companies*), hanya untuk mengelabui pihak otoritas negaranya.

Adalah firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca yang didirikan oleh Jorgen Mossack dan Ramon Fonseca ini yang memfasilitasi para kalangan berduit itu. Mossack Fonseca inilah yang dengan rapih menyembunyikan ratusan ribu rekening perusahaan cangkang itu dengan membentuk *special purpose vehichal* (SPV) atau *offshore companies* ketika mereka menanam dananya di negeri suaka pajak.

Firma hukum ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa-jasa perserikatan dan perwalian aset dari suatu perusahaan. Karena fokus utama dari Mossack Fonseca ini adalah sebagai perlindungan aset, perencanaan pajak dan properti. Firma ini juga menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain dan pengelolaan perusahaan luar negeri.

Sejatinya, dokumen *Panama Papers* bersifat sangat rahasia. Namun, dokumen yang memuat 11,5 juta dokumen rahasia dari 214.000 perusahaan luar negeri itu bocor karena kena diretas oleh seorang yang

menggunakan nama sandi, John Doe.

Para empunya dana itu berasal dari banyak kalangan. Mulai dari pebisnis sampai politisi, dari kalangan agen rahasia sampai kaum pesohor dan berasal dari banyak negara, termasuk Indonesia.

Sedikitnya ada 12 kepala negara, baik presiden ataupun perdana menteri yang masih menjabat maupun sudah lengser tersangkut bocoran data ini yang disinyalir mengemplang pajak. Sedang lima nama pemimpin negara yang masih aktif, yaitu Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab.

Selain itu, ada juga pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan dari kurang lebih 40 negara lain. Seperti Brasil, China, Perancis, India, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya.

Sepintas, mekanisme yang ada di Mossack Fonseca itu dianggap lazim dan lumrah bagi kalangan pebisnis. Namun jika ditapaki lebih dalam, ternyata penempatan dana di negeri suaka pajak itu tak sedikit yang dilatarbelakangi oleh beragam modus kejahatan.

Pasalnya, dengan mereka menyimpan dananya di sana, bisa jadi dimotivasi oleh aksi kejahatan sektor keuangan. Sebut saja seperti *money laundering* (pencucian uang) atau *tax avoidance* (penghindaran pajak atau bahkan pengemplangan pajak).

Demi menghindari tarif pajak tinggi, kaum berduit ini dengan sengaja memboyong fulusnya itu ke negeri surga pajak seperti Panama yang memang menawarkan tarif pajak minimal atau bahkan bebas pajak (*free tax*).

"Fenomena *Panama Papers* ini adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia, termasuk di Indonesia," sebut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA), dalam sebuah diskusi, Sabtu (9/4) lalu.

Ada nama ribuan perorangan dan perusahaan dari Indonesia. Tercatat ada 2.961 nama dari Indonesia di *Panama Papers* ini. Namun dari total itu, ada sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia yang mengamankan kekayaannya di Mossack Fonseca. Hampir semua pengusaha yang kerap wara-wiri sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes Indonesia ada di sana.

Nama-nama yang berasal dari klan konglomerat negeri ini nyaris ada semua. Seperti klan Widjaja (Grup Sinar Mas), klan Ciputra (Grup Ciputra), klan Hartono (Grup Djarum), klan Salim (Grup Salim), klan Sampoerna (Grup Sampoerna), klan Halim (Grup Gudang Garam), klan Tanoto (Grup Raja Garuda Mas), klan Katuari (Grup Wings).

Juga ada klan Riady (Grup Lippo), klan Rachmat (Grup Triputra/Adaro), klan Angkosubroto (Grup Gunung Sewu), klan Pangestu (Grup Barito Pacific), klan Panigoro (Grup Medco) klan Soeryadjaya (Grup Saratoga Investama), klan Bakrie (Grup Bakrie), serta klan Aksa (Grup Bosowa).

Namun demikian, di mata pengusaha ternyata fenomena *Panama Papers* dengan hiruk-pikuk aksi penanaman dananya itu masih dianggap wajar. Skema SPV, *shell companies*, maupun *offshore companies* disebut sesuatu yang biasa ketika mau berbisnis di luar negeri.

"Banyak pengusaha Indonesia, bahkan perusahaan BUMN yang menggunakan SPV saat bertransaksi di luar negeri tu. Jadi itu wajar," kilah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani seusai acara seminar, Rabu (6/4) lalu.

Di mata Chairman Grup Rekapital ini, perusahaan swasta dan BUMN ketika mau menerbitkan surat utang atau obligasi tidak membawa badan hukum Perseroan Terbatas (PT) seperti yang terjadi di Indonesia, tapi menggunakan badan hukum SPV.

Jadi, SPV ini sudah menjadi semacam kebiasaan pebisnis internasional. Cerita dia, ketika

satu perusahaan di Indonesia, membentuk usaha di luar negeri atau mengakuisisi perusahaan di luar negeri, untuk mencari pendanaannya itu menggunakan bank-bank asing. Sehingga untuk menyiasatinya dengan menggunakan skema SPV.

Apalagi untuk perusahaan-perusahaan swasta itu, ketika merambah ke pasar global, memakai jasa konsultan untuk mencari pendanaannya itu. Dan orientasi mereka semata-mata karena bisnis. Dalam arti, hanya mencari keuntungan.

"Makanya, dalam konteks ini (*Panama Papers*), mesti dilihat secara keseluruhan," pinta Ruslan.

Betulkah pernyataan Ruslan itu? Pasalnya, jika ditelisik secara teori, pembentukan SPV atau *special purpose company* biasanya sebagai perusahaan "bentukan" untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan *treaty partner* itu. Sehingga si perusahaan itu bisa lebih sedikit membayar pajaknya dari yang semestinya.

Tax treaty sendiri adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Erwin Aksa, pengusaha yang berasal dari grup bisnis Bosowa yang disebut-sebut di *Panama Papers* ini mengamini pernyataan Ruslan itu. Bahkan ia menepis, pembentukan SPV itu bukan untuk menghindari pajak tapi sebagai *tax saving*.

Meski begitu, menurut Wakil Ketua Umum Kadin bidang Konstruksi dan Infrastruktur ini, jika pemerintah tidak percaya dapat masuk menelisik lebih jauh nama-nama yang ada di *Panama Papers* ini. Pemerintah dengan segala kemampuannya bisa membedah para pengusaha atau pribadi yang memiliki *offshore asset* itu.

"Ini kesempatan baik bagi pemerintah untuk mengkoreksi laporan-laporan pajak pribadi itu,"

Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (PANAMA) melakukan aksi mogok makan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (14/4). Dalam aksi mogok makan yang telah berlangsung selama 6 hari itu mereka meminta agar Presiden Jokowi memecat dan menangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang masuk dalam daftar The Panama Papers dan disinyalir melarikan hartanya ke negara-negara tax haven dengan bantuan sebuah kantor firma hukum Mossack Fonseca melalui perusahaan offshore atau Special Purpose Vehicle (SPV) atau perusahaan yang tidak aktif

ujar pengusaha muda dari Sulawesi Selatan ini.

Muslihat para pemegang dana dari Indonesia yang difasilitasi oleh Mossack Fonseca ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, ada 17 perusahaan masuk jenis *officers & master clients*. Kategori ini berupa korporasi yang memakai identitas jelas lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Ada dua perusahaan terbuka (Tbk) di jenis ini, serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang.

Kategori kedua, *offshore entities* menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan bayangan ini memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik dalam negeri. Seperti Paving Investment, Lilac Swiss, atau Capsec Ltd. Pasalnya, di kategori ini dari sisi aset juga sulit dilacak siapa pemiliknya.

Kategori ketiga, perusahaan-perusahaan terdaftar yang menanamkan modal di banyak negara-negara surga pajak dengan polesan firma hukum ini. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Mayoritas perusahaan itu berkantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, atau di kawasan segitiga emas, Kuningan-Sudirman-Thamrin.

Menteri Rini Jadi Pengemplang Pajak?

Tak hanya kalangan pengusaha dalam negeri yang ada dalam daftar *Panama Papers* itu. Ada juga para pejabat negara, salah satunya yang mencengangkan adalah sosok Menteri BUMN, Rini Soemarno. Dianggap mencengangkan bukan berarti selama ini dia dianggap



baik, lalu tiba-tiba mencuat di daftar dokumen itu yang terindikasi melakukan pencucian uang dan pengemplangan pajak.

Melainkan Menteri Rini yang selama ini sudah kontroversial itu semakin teramini dengan adanya daftar itu. Artinya, preseden publik yang selama ini menganggap minor kinerjanya, ternyata sebanding lurus dengan *track record*-nya itu.

Maka tak aneh jika banyak publik yang menyorot minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak cepat menelusuri dokumen ini dan memecat Menteri BUMN tersebut.

"Kami minta Presiden Jokowi membersihkan 'orang dalam' yang terlibat dalam skandal *Panama Papers* ini," sembur Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Supriyanto



kepada Aktual.com, belum lama ini.

Di mata Fitra, Jokowi harus punya nyali terhadap menteri seperti itu. Sehingga sikap Jokowi itu tidak boleh melindungi para pengemplang pajak itu yang merupakan pihak-pihak pendosa negara dan telah merugikan negara akibat tindakannya itu.

Bahkan jika Jokowi tetap bungkam tak mau bersikap tegas, malah tetap bersikukuh mempertahankan dan mendukung Rini, meski skandal *Panama Papers* melibatkan Menteri BUMN itu, sama saja dengan Presiden telah mengorbankan nurani, rakyat, bangsa dan negara.

"Jangan sampai Presiden ngotot mempertahankan Menteri Rini. Itu sama saja mengorbankan kepentingan rakyat," cetusnya.

Namun sayangnya, Jokowi masih tanpa respon apa-apa. Padahal di negara lain, sudah mengambil kebijakan tegas terhadap nama-nama yang terlibat skandal *Panama Papers*.

Menurut wanita berdarah Jawa ini, bahkan di negara asalnya itu, Panama, telah dibentuk komisi independen untuk mengevaluasi sistem transparansi dan hukum di Panama.

Bahkan yang paling revolusioner terjadi di Islandia, negara kecil di Eropa yang dekat kutub utara ini telah melengserkan Perdana Menteri-nya yang terlibat. Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, langsung mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

Di Inggris, pemerintah negara

tersebut membentuk tim khusus untuk menyelidiki persoalan *Panama Papers*. Pun demikian di negara Menara Eiffel Prancis. Di sana, telah memasukan Panama sebagai daftar hitam negara pengemplang pajak.

Termasuk Negeri Paman Sam Amerika Serikat (AS) sendiri, kata Yenny, telah mengeluarkan aturan untuk memaksa bank mencari identitas orang yang bertanggung jawab pada perusahaan cangkang itu yang tercatat dalam dokumen tersebut.

"Artinya pemerintah di banyak negara merespon cepat dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani kasus bocornya dokumen *Panama Papers*. Sayangnya, Presiden Jokowi masih bungkam," papar Yenny.

Fitra juga meminta Jokowi melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membuka secara transparan terhadap nama-nama yang masuk dalam daftar *Panama Papers* itu. Berapa aset yang dimilikinya di luar negeri, berapa keuntungannya, itu semua harus diekspos ke publik.

Dari Senayan, ikut juga menyorot sosok Menteri Rini yang ada di daftar itu. Meski tidak sekeras Fitra, anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyebut, adanya Rini Soemarno di *Panama Papers* sangat tidak etis dalam kacamata etika.

"Dalam konteks ini, secara etis sangat tidak bagus. Karena mereka (termasuk Rini Soemarno) sengaja memindahkan dananya ke luar negeri. Inilah yang tentu menjadi problem," tandas politisi Golkar ini.

Pasalnya, tanpa melihat aspek penghindaran pajak atau pencucian uang pun, dengan memboyong uang ke luar negeri, apalagi dalam jumlah besar, telah menggerus likuiditas sistem keuangan nasional.

Untuk itu, pemerintah perlu mengusutnya. Sehingga jelas di mata publik, apakah nama-nama yang ada di *Panama Papers* itu, termasuk Rini Soemarno melakukan pelanggaran hukum atau tidak.

Apalagi, sosok Rini itu dulunya

sebagai seorang pengusaha yang menurut Misbakhun tentu melakukan perencanaan pajak yang menguntungkan. Sehingga dia, sebagai pengusaha, mencari negara surga pajak atau suaka pajak.

Perlu Peran PPAATK

Sikap Jokowi terhadap dokumen panas ini memang terus dinanti publik. Bahkan perlu melibatkan pihak otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Yustinus melihat, selama ini para pengusaha yang tertarik untuk menyimpan dananya di negara yang menawarkan tarif pajak rendah atau bahkan bebas pajak (tax havens) hanya untuk menghindari bayar pajak di Indonesia.

Apalagi memang aksi-aksi untuk mengelak pajak ini tak hanya terjadi di Indonesia, bahkan juga terjadi di negara maju seperti AS dan Jerman.

Di negeri yang pernah ada Tembok Berlin itu, pada tahun 2009 pernah terungkap nama Gunther sebagai salah satu pengemplang pajak. Namun ternyata nama itu adalah nama seekor anjing, bukan nama seorang manusia.

Sementara di AS, perusahaan-perusahaan kelas dunia kerap melakukan pengemplangan pajak dengan siasat-siasat yang jitu. Perusahaan seperti Apple, kata Yustinus, setiap tahun mengemplang pajak sebesar Rp250 triliun.

Untuk itu dengan tangan PPAATK dan DJP, Presiden Jokowi harus terus menelusuri dokumen Panama ini untuk mengejar nama-nama orang Indonesia di dokumen itu.

"Karena aksi *tax avoidance* dari pengemplang pajak itu sangat masif. Maka pemerintah jangan terus bersikap lugu mau dibohongi para pengemplang pajak," cetus Yustinus.

Dalam kedok yang terungkap di *Panama Papers* ini, Yustinus memecah tiga kategori perusahaan yang terkait dokumen itu. Pertama, aksi korporasi murni di mana

seorang mendirikan perusahaan di negara Tax Havens untuk keperluan, misalnya, menjual obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis. Kategori ini merupakan praktik legal.

Kedua, pendirian perusahaan di negara suaka pajak dengan motivasi menyembunyikan aset hasil bisnis ilegal seperti korupsi. Hal ini jelas adalah pelanggaran hukum.

Dan kategori ketiga, mereka yang melakukannya dengan tujuan menghindari pajak, sehingga perusahaan dapat lebih efisien karena membayar pajaknya lebih rendah.

Modus yang kedua dan ketiga ini, disebut pengamat yang lulusan akuntansi dan filsafat ini, biasanya dilakukan pengusaha untuk merahasiakan uang mereka di negara-negara surga pajak ini.

"Biasanya mereka terdiri dari banyak pengusaha, politisi, dan pejabat menyimpan uangnya di sana. Karena memang mereka tidak mau bayar pajak," cetus dia lagi.

Ia juga menyarankan, agar prosesnya berjalan lebih cepat, pemerintah juga mesti merevisi UU Perbankan agar pihak pemerintah bisa masuk ke data rekening para pengemplang pajak terus.

Kenapa Direspon dengan Tax Amnesty?

Menteri Keuangan mengakui, data-data yang dibocorkan oleh *Panama Papers* akan dijadikan sebagai salah satu referensi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya. Apalagi beberapa nama yang disebut-sebut dirilis di dokumen itu punya *account* atau rekening yang bermasalah.

"Ada sebagian nama (di *Panama Papers*) yang kami cek itu memang punya *account* di luar negeri yang memang belum pernah dilaporkan," kata Menkeu, Jumat (8/4).

Namun, ia buru-buru menambahkan, kalau data dari *Panama Papers* bukan satu-satunya data yang dipegang pemerintah. Justru ada sumber data lain lagi yang lebih kuat dan terpercaya yang dikantongi pemerintah.

Ketika dikonfirmasi, apakah data itu berasal dari Internal Revenue Service (IRS), lembaga semacam direktorat pajak dari Amerika Serikat (AS) yang terkenal sangat ditakuti itu, Menkeu enggan untuk menjawabnya secara pasti.

"Pokoknya ada sumber datanya (yang diterima pemerintah). Saya gak mau nyebutin (sumber data itu)," ketus Bambang.

Namun demikian, dalam rangka menarik dana itu agar mau membayar pajak, Menkeu tetap akan melakukan dengan opsi repatriasi atau memulangkan dana itu ke negara asalnya, yaitu Indonesia. Berarti, cara yang pemerintah lakukan tetap ngotot untuk menggolkan RUU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

"Iya, *tax amnesty* adalah cara yang paling baik. Karena tentunya kami berharap repatriasinya, bukan hanya untuk membayar pajaknya," dalih mantan Wakil Menkeu ini.

Setali tiga uang dengan Menkeu disebutkan Dirjen Pajak yang baru, Ken Dwijugiasteady. Menurut Ken, *tax amnesty* sebagai senjata jitu yang dapat mengerek dana di luar negeri yang kabarnya berjumlah belasan ribu triliun itu.

"Makanya pemerintah sangat membutuhkan aturan *Tax Amnesty*. Apalagi jumlahnya di atas PDB (Produk Domestik Bruto). Tapi sayangnya, kita tak punya *tax treaty* dengan negara itu," tandas dia.

Jika memang nilainya di atas PDB, maka tentunya saja jumlahnya sangat besar. PDB Indonesia sendiri, saat ini berjumlah sekitar Rp11.400-an triliun.

Namun demikian, Ken enggan menyebut data *Panama Papers* ini sebagai data yang lengkap. Justru ia mengklaim data yang dikantongi pihaknya lebih komplrit. Satu hal yang membuat data di *Panama Papers* tak lengkap karena tidak disebutkan jumlah dana yang ada si rekening orang-orang Indonesia di sana.

"Kalau data kami lebih lengkap. Kami ada nama-nama orang yang



Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri), Dirjen Pajak Ken Dwijugasteady (tengah) dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi (kanan) mengikuti keterangan pers usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3). Rapat tersebut membahas soal pencucian uang dan penggelapan pajak.

memiliki jumlah uang tertentu, ada emailnya, dan jumlah SPV -nya," dalih Ken.

Bahkan nama-nama tersebut, kata Ken, tidak hanya ada di satu negara surga pajak atau suaka pajak, melainkan tersebar di 18 negara *tax havens*. Ke-18 negara itu tak hanya Panama, tapi juga ada Singapura, Swiss, Cook Island, Cyman Island, dan banyak lagi.

Bagi pihak DJP, semua data bisa digunakan, termasuk *Panama Papers* ini. Karena data itu akan menjadi referensi siapa saja para wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya.

"Yang jelas data itu bisa kami gunakan selama ada obyek pajaknya," jelas Ken.

Tolak Tax Amnesty

Akan tetapi, dengan adanya respon pemerintah terhadap *Panama Papers* itu justru dengan semakin menggeber pembahasan RUU *Tax Amnesty*, di mata Fitra bukanlah langkah yang bijak.

"Ini logika macam apa yang coba dihadirkan pemerintah? Ada skandal *Panama Papers*, malah mau kebut pembahasan *tax amnesty*," dengus Yenny lagi.

Dengan adanya *tax amnesty* ini, seperti membuat karpet merah bagi para pendosa negara, yang selama ini

sudah mengemplang pajak.

Untuk itu, pihaknya sangat menolak adanya pembahasan *tax amnesty* itu. Karena bukan solusi untuk membangun sistem perpajakan di Indonesia.

"Seharusnya para pengemplang pajak dan pelaku *money laundry* itu ditindak tegas secara hukum bukan malah diampuni," kecam dia.

Forum Pajak Berkeadilan (FPB) menganggap saat ini sudah memasuki masa darurat kejahatan pajak. Untuk itu, mereka meminta pemerintah agar membatalkan rencana pemberian *tax amnesty* kepada wajib pajak super kaya.

"Karena langkah itu akan kontra-produktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak," tandas Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, salah satu anggota FPB, Jumat (8/4).

Berdasar data Koalisi PWYP Indonesia, Indonesia ternyata berada pada posisi ke-7 dari negara-negara yang memiliki aliran uang haram tertinggi di dunia.

Menurut dia, dalam rentang 2003-2012, Indonesia tercatat mengalirkan dana sebesar Rp1.699 triliun atau rata-rata per tahun mencapai Rp167 triliun.

Untuk itu, dengan metode penghitungan yang sama, PWYP Indonesia mencatat dugaan total

aliran uang haram di Indonesia di tahun 2014 sebesar Rp227,75 triliun atau setara dengan 11,7% dari total APBN-P tahun 2014.

Dan khusus di sektor pertambangan, nilai aliran uang haram diperkirakan mencapai Rp 23,89 triliun, di mana Rp 21,33 triliun berasal dari transaksi perdagangan ilegal dan Rp2,56 triliun berasal dari aliran uang panas.

"Di tengah rendahnya *tax ratio* sektor pertambangan yang hanya mencapai 9,4% mengindikasikan masih maraknya praktik penghindaran dan pengemplangan pajak di sektor ini," keluh Maryati.

Sehingga, dengan pemberlakuan *Tax Amnesty* juga bisa disebut sebagai langkah mundur penegakan hukum perpajakan dan pencucian uang. Apalagi pengampunan pajak itu akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Sementara data Global Financial Integrity (GFI) pada tahun 2015 setiap tahun negara berkembang kehilangan US\$1 triliun akibat korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang.

Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko menambahkan, tingginya aliran uang haram dari Indonesia diakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak baik dari kelompok kaya, superkaya, maupun korporasi.

Makanya, dia mengkritik, dengan tingginya prevalensi korupsi pajak, praktik penggelapan dan penghindaran pajak dengan metode perekrayaan keuangan yang rumit itu, membuktikan rendahnya kinerja otoritas pajak Indonesia.

"Sehingga saat ini yang prioritas bukan UU *Tax Amnesty*, tetapi benahi kinerja otoritas pajak itu," sebutnya. ■ Bushthomi

PEMBOCORAN DATA BERBUAH PENGAMPUNAN

Bocornya dokumen Panama Papers mengungkap data warga, yang memarkir dananya di luar negeri, antara lain untuk menghindari pajak. Namun kebocoran ini justru memberi momentum bagi pemerintah Jokowi untuk memajukan agenda pengampunan pajak.



Semua dimulai dari kehebohan bocornya 11,5 juta dokumen investasi berkapasitas 2,6 terabit milik Mossack Fonseca ke media Jerman, *Suddeutsche Zeitung* dan dibagikan kepada konsorsium jurnalis investigatif internasional (ICIJ), untuk kemudian diselidiki oleh lebih dari 100 grup media di dunia.

Dokumen yang diberi label "Panama Papers" itu mengarah kepada 214 ribu entitas perusahaan di banyak negara. Mossack Fonseca sendiri memiliki cabang di lebih dari 35 negara. Dokumen itu menyebutkan nama 140 tokoh politik, termasuk 12 pemimpin atau mantan pemimpin negara. Dalam dokumen itu disebut 2.960 nama wajib pajak Indonesia, yang tercatat sebagai klien

dari 43 perusahaan *offshore* yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca.

Perusahaan *offshore* adalah perusahaan yang beroperasi di mancanegara dan dibentuk guna mengkapitalisasi modal para kliennya. Dalam konteks Mossack Fonseca, dana yang dipercayakan para kliennya diputar oleh perusahaan *offshore* di negara-negara yang memberikan fasilitas perpajakan yang murah (*tax haven*). Fenomena *tax haven* tidak cuma dimanfaatkan individu untuk mendapatkan pajak murah perorangan, tapi juga untuk menghindari pajak pada perusahaan (*transfer pricing*).

Perspektif terhadap fenomena ini umumnya negatif. Namun, dengan menyimpan uang di luar negeri tidak lantas berarti melanggar hukum. Ada banyak alasan mengapa orang

menyimpan uangnya di luar negeri. Masalahnya, jika banyak orang Indonesia lebih suka mendirikan perusahaan serta menyimpan dananya di luar negeri, ada sejumlah potensi ekonomi yang hilang, yang mestinya dapat dimanfaatkan di dalam negeri.

Menggalakkan Penarikan Pajak

Negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki masalah besar berupa *saving-investment gap*, yakni mobilisasi dana masyarakat di dalam negeri (*saving* atau *funding*) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi (*loan* atau *lending*). Apalagi Indonesia sedang menggalakkan penarikan pajak, karena butuh dana besar-besaran untuk membangun banyak infrastruktur.

Bagi pemerintah Presiden Joko Widodo sendiri, pengungkapan data warga Indonesia yang menyimpan dana di luar negeri itu di satu segi bisa menimbulkan kekikukan, manakala ada nama pejabat atau keluarganya tertera di sana. Namun di sisi lain, terungkapnya data tersebut memberi momentum yang dibutuhkan untuk menggolkan rencana pembuatan undang-undang pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Wacana pengampunan pajak itu sendiri sudah muncul sudah sejak 15 Desember 2014, ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Menkeu Singapura Tharman Shanmugaratnam. Sesudah pertemuan itu, pada Januari 2015, Dirjen Pajak melontarkan rencana pengampunan pajak kepada Komisi XI DPR. Pengampunan pajak itu difungsikan untuk memperbaiki

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (ketiga kanan) berdiskusi dengan Ketua DPR Ade Komaruddin (keempat kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kelima kiri), Taufik Kurniawan (ketiga kiri), serta Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto (kedua kiri) saat pertemuan membahas RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan pemerintah optimistis jika pajak yang berhasil ditarik setelah UU itu diterapkan dapat mendukung kebutuhan APBN.

basis data pajak yang selama ini dimanipulasi, dan menjaring mereka yang selama ini di luar sistem administrasi.

Jumlah dana warga Indonesia di luar negeri itu sulit dihitung, karena dana itu berada di luar negeri tanpa permissi dan tidak tercatat dengan baik. Di masa lalu, banyak negara termasuk Indonesia belum peduli soal korupsi dan lalu lintas dana hasil kejahatan. Menurut konsultan manajemen internasional McKinsey, besarnya dana itu mencapai Rp 3.250 triliun, yang merupakan akumulasi dana dari 1990-an.

Sebagai pembandingan, jumlah dana masyarakat yang tersimpan di dalam sistem perbankan Indonesia saat ini sekitar Rp 4.500 triliun. Jika keduanya digabungkan, akan diperoleh dana Rp 7.750 triliun. Sementara itu, kredit yang diberikan bank-bank kita cuma Rp 4.100 triliun. Maka, jika dana warga Indonesia itu dapat ditarik masuk, suku bunga deposito dan kredit pasti akan turun di bawah 10 persen, seperti yang diharapkan pemerintah saat ini.

Keterbukaan Rekening Perbankan

Menkeu Bambang Brodjonegoro memperkirakan, dana orang Indonesia itu bahkan melebihi Produk Domestik Bruto Indonesia, yang pada akhir 2015 tercatat Rp 11.600 triliun. Fenomena orang Indonesia menyimpan uangnya di luar negeri sudah terjadi sejak 1970-an. Dengan asumsi rupiah sudah mengalami banyak devaluasi dan depresiasi, diperoleh angka yang jauh lebih besar, yakni di atas Rp 11.600 triliun.

Menkeu menyatakan, kebijakan pengampunan pajak diharapkan bisa diterapkan secepatnya. Untuk itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan DPR. Menkeu mengakui banyak pelaku usaha yang berminat terhadap kebijakan pengampunan pajak. "Ya, ada banyak," ujarnya.

Ada satu kendala dalam implementasi pengampunan pajak, yakni keterbukaan rekening perbankan milik wajib pajak, karena

terbentuk aturan rahasia bank. Tetapi, kata Menkeu, hal itu akan teratasi karena sudah ada kesepakatan internasional mengenai *automatic exchange of information* (AEOI), yang memungkinkan keterbukaan informasi data perbankan yang disepakati G20.

Selama ini, ketika ada kecurigaan pelanggaran pajak, pemerintah akan memeriksa data perbankan wajib pajak melalui permohonan tertulis Menkeu kepada ketua Otoritas Jasa Keuangan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki *internal revenue service* (IRS), yang mampu melacak data wajib pajak hingga ke perbankan, Direktorat Jenderal Pajak tidak didukung sistem seanggih itu. Itulah sebabnya perlu upaya ekstra, termasuk pengampunan pajak.

Rencana pengampunan atau amnesti pajak akan diatur dalam UU yang sekarang tengah difinalisasi DPR dan pemerintah. Dalam rancangan itu disebutkan, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan. Objek pengampunan pajak bukan hanya harta yang disimpan di luar negeri, tapi juga di dalam negeri yang tidak dilaporkan secara benar.

Orang pribadi atau badan yang memperoleh surat keputusan pengampunan pajak akan memperoleh fasilitas perpajakan berupa penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Memulangkan Dana ke Indonesia

Selain itu, terhadap wajib pajak tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, dalam masa pajak sebelum undang-undang ini berlaku. Dalam hal wajib pajak peserta amnesti pajak sedang menjalani pemeriksaan pajak atau

pemeriksaan bukti permulaan sebelum UU ini berlaku, pemeriksaan harus dihentikan.

Menkeu menilai, kebijakan pengampunan pidana pajak bisa menjadi alat untuk menindaklanjuti bocoran data investasi Mossack Fonseca atau Panama Papers. Karenanya, ia mengharapkan Rancangan UU Tax Amnesty bisa dibahas dan diundangkan segera oleh DPR. "(Tax amnesty) itu akan dijadikan pintu masuk agar mereka mau membawa uangnya kembali ke Indonesia," ujar Bambang, Selasa (5/4).

Menurutnya, pengampunan pajak akan menjadi prioritas utama pemerintah pada 2016 ini sebelum tindakan hukum benar-benar ditegakkan. Pasca tax amnesty berakhir, Menkeu memastikan, setiap upaya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan dikenakan sanksi, mulai dari denda atau pidana hingga kurungan penjara. "Kita punya ketentuan undang-undang, maksimum pidana (denda) 48 persen (dari total tunggakan pajak)," jelasnya.

Pengamat pajak Ronny Bako mengusulkan, tarif ideal untuk tebusan bagi dana yang ikut program pengampunan pajak adalah sebesar 1 persen. Tarif 3-8 persen dinilainya terlalu tinggi. "Kalau tarif tebusannya terlalu tinggi, mereka akan memilih hold di luar negeri. Di sana mereka masih mendapatkan bunga sekitar 5 persen," ujarnya.

Ronny lantas menunjuk sejumlah negara yang sukses menerapkan amnesti pajak karena tarif tebusan yang rendah, seperti Afrika Selatan sekitar 0,5-1 persen. "Indonesia jangan mengulangi kesalahan negara di Amerika Latin, yang gagal dalam menerapkan kebijakan ini karena menerapkan tarif 6-8 persen," tegasnya.

Terkait potensi dana yang diparkir di luar negeri yang bisa masuk ke Indonesia, Ronny memperkirakan sebesar Rp 4.000 triliun. Dengan tarif 1 persen, RI bisa mendapatkan pajak langsung sekitar Rp 40 triliun. "Dana besar itu akan memberikan *multiplier effect* luar biasa," katanya. • Satrio Arismunandar



KEMANA ISU PANAMA PAPERS HENDAK DILABUHKAN?

Seperti halnya ketika bocoran WikiLeaks yang dimotori Julian Assange beredar yang dipancarluaskan melalui media-media arus utama di Barat, sepertinya fenomena *Panama Papers* ada kesmiripan pola dengan gerakan *Arab Spring* yang pernah mengguncang Kawasan *Heartland* (Afrika Utara), sebagai prakondisi lengsernya Ben Ali di Tunisia,

Abdullah di Yaman, maupun Hosni Mubarak di Mesir.

Berarti, beredarnya bocoran *Panama Papers*, ibarat anak panah yang ditembakkan dari busurnya, yang tentunya ada maksud dan tujuan. Sehingga niscaya bakal muncul fragmen-fragmen atau episode-episode selanjutnya. Yaitu dimunculkannya tema, lalu ditancapkan sebuah skema di

negara-negara sasaran. Tak terkecuali Indonesia, mengingat beredarnya ratusan nama yang ikutan dalam *Panama Papers*.

Inilah pola-pola berulang kolonialisme secara asimetris. Jika *Arab Spring* dahulu diawali oleh isu kemiskinan, pemimpin tirani, korupsi, dan lain-lain yang ditebar sosok Julian Assange dengan kendaraan “Wikileaks”-nya. Tema dan agenda lanjutan usai isu disebar ialah gerakan massa non kekerasan (*Arab Spring*). Begitulah kira-kira cerita singkatnya. Manuver tersebut tergolong sukses pada tiga negara di atas kecuali Syria, dan ‘Libya’ yang hingga kini masih bergolak serta porak-poranda.

Adapun skema kolonial ternyata tidak berubah. Dalam skenario *Arab*

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menerima kunjungan delegasi Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China Xiong Tao (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/4). Pertemuan tersebut membahas kerja sama Indonesia dan China, diantaranya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan proyek lainnya bidang energi dan infrastruktur.

Spring pun tetap yakni kontrol ekonomi serta penguasaan sumber daya (alam)/SDA. Penggulingan kepemimpinan nasional (presiden di sebuah negara) hanya pintu masuk saja, untuk suatu tata-ulang, yang tentunya diupayakan agar selaras dengan semakin merembesnya kepentingan-kepentingan korporasi global ke dalam sektor-sektor strategis kenegaraan baik di eksekutif pemerintahan maupun beberapa komisi terkait di DPR.

Maka, kiranya *Panama Papers* hanyalah isu yang ditebar sebagaimana dahulu Wikileaks “menembak” negara-negara target secara asimetris hingga timbul huru-hara internal. Pada skala yang maksimal, bisa memicu pecahnya sebuah negara-bangsa seperti di Sudan, munculnya pergolakan kekuasaan hingga penggulingan presiden, namun ada pula yang semata-mata sekadar untuk menciptakan aksi destabilisasi internal negara sasaran, sehingga tercipta celah untuk tata-ulang kepentingan korporasi global melalui kemunculan pemerintahan baru.

Pertanyaannya, adakah kondisi obyektif tersebut sudah tersedia di Indonesia sehingga memungkinkan skenario terlaksana yang sudah dimulai dengan guliran isu *Panama Papers*? Revolusi Perancis 1848, mungkin bisa menjadi sebuah rujukan perbandingan. Sebagai anggota komisi parlemen dari partai oposisi terhadap pemerintahan Raja Charles X yang dijuluki Raja borjuis, Alexis De Toucqueville, dalam pidatonya pada 27 Januari 1848, telah memperingatkan adanya gejala-gejala ke arah munculnya revolusi:

“Orang mengatakan bahwa karena saat ini tak ada gangguan dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari, revolusi dianggap masih jauh. Tuan-Tuan, izinkan saya menyatakan keyakinan saya bahwa anda sekalian sedang menipu diri sendiri. Saya yakin, saat ini kita sedang tidur di atas gunung berapi.”

Frase Toucqueville “sedang tidur di atas gunung berapi” terbukti bukan khayalan atau ilusi belaka. Pada 22 Februari 1848, kurang dari satu bulan setelah pidato Toucqueville, Revolusi pecah di Perancis. Sebuah revolusi yang memang beda coraknya dengan Revolusi Perancis 1789 yang menandai peralihan kekuasaan dari monarki aristokrasi yang bercorak feodal ke arah pemerintahan yang didominasi kaum borjuis pengusaha. Namun dampak dari Revolusi Perancis 1848 bahkan membawa dampak yang meluas ke kawasan Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Karena di beberapa negara Eropa tersebut, yang kekuasaannya masih di tangan para aristokrat feodal dalam sistem monarki absolut, Revolusi 1848 telah menginspirasi gerakan-gerakan yang dimotori kelas menengah maupun kelompok-kelompok revolusioner dari buruh, untuk menuntut hal yang sama seperti yang sudah diraih Perancis.

Segi menarik dari Revolusi 1848 adalah terjadinya krisis ekonomi Perancis yang mendahului meletusnya Revolusi tersebut. Sejak 1840-an, adalah masa gagal panen di Eropa, dan kelangkaan pangan di berbagai wilayah. Bahkan terjadi bencana kelaparan di Irlandia. Pada 1847, terjadilah resesi ekonomi internasional sehingga berakibat sistem kapitalis yang sedang tumbuh rentan untuk bangkit kembali pada abad berikutnya.

Pengangguran dalam skala regional berlangsung di semua negara industri Eropa. Celaknya di Perancis, yang waktu itu masih peralihan dari era feodal ke era industri, belum muncul sebuah kelas buruh yang berbasis industri sebagaimana dibayangkan oleh Karl Marx. Buruh yang ada di Perancis kala itu, kebanyakan adalah kaum

buruh yang mencari nafkah di jalanan yang pada 1848 sebagian besar merupakan kaum pekerja mandiri (artisan), yang oleh Marx digambarkan sebagai “Borjuis Kecil.”

Begitupun, kelas menengah maupun Pekerja Mandiri itu sama-sama merasa terancam keamanan ekonominya tidak saja akibat resesi ekonomi yang melanda kawasan termasuk Perancis, melainkan juga oleh kemunculan industri-industri baru. Menariknya, seperti juga sekarang muncul keresahan akibat membanjirnya buruh-buruh Cina ke Indonesia. Pada era 1848 itu, buruh-buruh Perancis resah yang kemudian melakukan aksi protes menentang buruh Inggris yang saat itu direkrut untuk membangun jalan kereta api di Perancis.

Dalam tataran di arena perpolitikan nasional, Revolusi Perancis semakin dipercepat eskalasinya oleh oposisi dari partai-partai politik, yang mendorong aksi destabilisasi politik Perancis. Mereka ini tidak bermaksud secara serius untuk menggulingkan rezim atau dinasti yang berkuasa dalam skema revolusi, namun sebagai kekuatan-kekuatan yang merasa berada di luar lingkaran inti kekuasaan, berkeinginan dan berhasrat untuk mengambil giliran masuk ke sistem politik kekuasaan. Barang tentu, konfigurasi politik semacam ini sangat mudah untuk dimainkan dalam rangka melayani skema yang dirancang oleh para kapitalis berbasis korporasi baik asing maupun para kapitalis komprador lokal sebagai kaki tangannya.

Para Taipan Yang Semakin Menegara

Selain itu, ada tren yang tidak kalah mengkhawatirkan, sehingga patut dipertimbangkan sebagai salah satu faktor pemicu instabilitas politik beberapa waktu ke depan. Saat ini, para Taipan sebagai kekuatan Cina rantau, sudah semakin menegara, atau bahkan menjadi negara dalam negara, sehingga tidak saja di bidang ekonomi, tapi sudah berkembang jadi konsorsium politik. Dengan

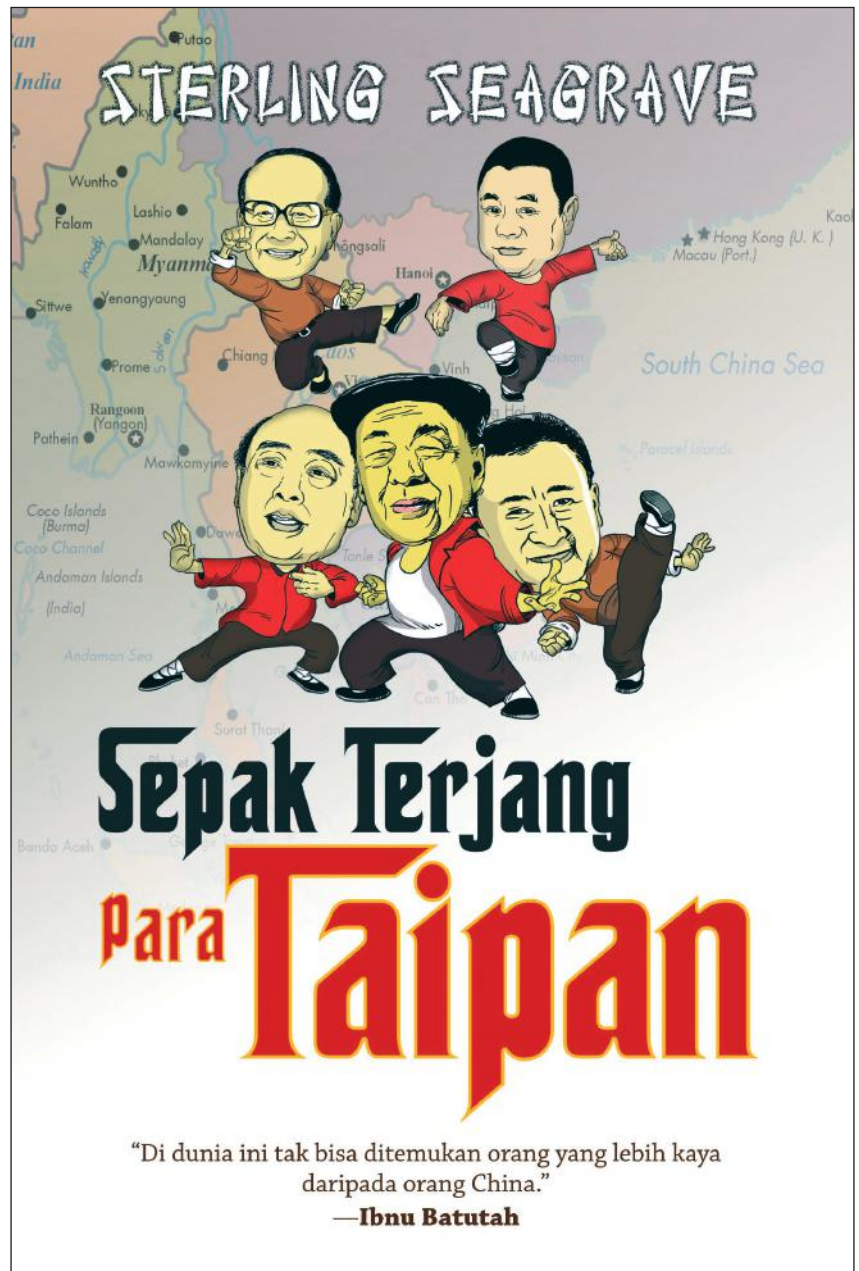
begitu, selain mengatur arah kebijakan strategis perekonomian, juga itu telah ikut mengatur politik luar negeri RI. Sehingga dalam mewarnai hubungan bilateral RI-RRC, para taipan sebagai kekuatan Cina rantai di Asia Pasifik, saat ini telah memainkan fungsi sebagai Daerah Penyangga antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC.

Para Taipan seberang laut yang sudah kaya raya beberapa generasi di berbagai kawasan dunia, pada 1979 melalui Special Economic Zone (SES) yang dikeluarkan Deng Xio Ping, berhasil menarik minat beberapa taipan investasi ke Cina, karena dalam skema SES, 14 kota di Cina Selatan yang diliberalisasi bagi investor asing (baca: Taipan), umumnya merupakan daerah kelahiran leluhur para taipan tersebut. Seperti Shensen, Guangzhu dan Fukien.

Namun dari awal, yang pegang skema ekonomi-politik adalah RRC. Dan RRC kebijakan ekonominya menganut Kapitalisme Negara. Bukan kapitalisme berbasis korporasi kayak para Taipan ini. Jadi selama para Taipan ini mau kerjasama sebatas kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan antara RRC dan Taipan, yang lancar-lancar saja. Ceng Li, kata orang Cina.

Tapi begitu coba mengatur-atur skema politik pemerintah RRC, pasti akan dengan mudah dipatahkan. Dan posisi tawar RRC gimanapun, jauh lebih besar. RRC bisa cari investor dari taipan klik yang lain, kalau katakanlah Klan Mochtar Riadi atau Liem mulai main atur-atur. Dalam kondisi RRC kayak sekarang, pemerintah Cina bisa nyari Riadi-Riadi baru atau Anthoni Salim baru dari kawasan manapun. Dan pasti dengan senang hati menerima tawaran pemerintah RRC.

Bahwa kemudian, pemerintah RRC mempersilahkan para taipan mengatur-atur negara lain demi kepentingannya, atau atas dasar klaim demi kepentingan Cina Raya atau apalah gitu, kan poinnya tetap. Bahwa RRC oke saja para taipan



bikin ulah di berbagai negara lain, asal jangan ganggu tatanan politik ekonomi RRC yang sudah dibangun sejak akhir 1970-an. dan yang sudah mulai berbuah sejak 1990-an dan era 2000-an sekarang ini.

Artinya, pemerintah RRC berhasil menjinakkan para Taipan sebagai Daerah Penyangga. Lha, pemerintah Indonesia, justru lemah ketika berhadapan dengan para taipan ini. Akibat dari gurita

pengaruh ekonomi-bisnis yang sudah merembes ke sektor-sektor strategis kenegaraan, dan pemerintahan, para taipan dengan mudah mendikte dan mengatur-atur kebijakan politik pemerintah, termasuk politik luar negeri.

Alhasil, jadi ketika pemerintah RI bermaksud jalin ikatan baru yang lebih solid dengan RRC seperti di era Bung Karno, khususnya ketika kedua negara bahu-membahu melawan

kolonialisme dan imperialisme AS dan Barat, sedari awal skema kerjasama RI-RRC diatur dan didikte oleh kepentingan para taipan.

Lebih celaknya lagi, para taipan yang sejatinya lebih menganut kapitalisme berbasis korporasi yang berorientasi liberalisme, kepentingan ekonomi dan bisnisnya justru cenderung lebih pro kepentingan korporasi-korporasi AS dan Eropa Barat.

Dengan begitu, pemerintah RRI justru gagal total memanfaatkan Taipan sebagai Daerah Penyangga dibandingkan RRC. Kalau RRC dengan adanya taipan, berhasil memanfaatkan aspek ekonomi dan sumberdaya manusia para Taipan ini demi kepentingan nasional RRC, pemerintah RI justru dengan adanya taipan sebagai daerah penyangga, malah kayak pagar makan tanaman.

Daerah Penyangga yang seharusnya dimanfaatkan pemerintah RI sebagai daerah yang melindungi kedaulatannya baik secara militer maupun ekonomi-politik, justru malah jadi daerah yang mengancam kedaulatan ekonomi dan mungkin juga nantinya militer dari NKRI.

Dalam kerangka pemikiran dan pandangannya tersebut, sekarang saya kira jadi jelas pola perang macam apa yang harus kita hadapi dalam skala prioritasnya.

Benar bahwa dalam jangka panjang, visi-misi RRC memang bisa juga membahayakan kedaulatan NKRI. Tapi dalam jangka pendek dan menengah, ancaman sesungguhnya adalah berasal dari para Taipan yang justru diproyeksikan oleh pemerintahan Jokowi-JK sebagai Daerah penyangga antara pemerintah RI dan RRC.

Buku karya Sterling Seagrave, wartawan Inggris, yang menulis buku membongkar sepak terjang para taipan di Asia Pasifik, bertajuk, *Lord of the Ring*. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia : *Sepak Terjang Para Taipan*, kiranya amat membantu mengungkap betapa mengguritanya

pengaruh para Taipan seberang laut ini. Di buku itu, terungkap genealogi atau asal-usul beberapa taipan mulai dari Robert Kwok sampai Liem Soe Liong. Maupun beberapa taipan yang sudah menacapkan kuku-kuku pengaruh kekuasaannya di beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Meskipun sejak era Deng Xio Ping pada 1979, para Taipan seberang laut ini mulai diundang masuk ke Cina untuk berinvestasi melalui skema Special Economic Zone di 14 kota di Provinsi Cina Selatan, namun tidak otomatis RRC dan para Taipan ini sudah menyatu dan bersenyawa dengan skema Kapitalisme Negara RRC. Karena bagaimanapun juga, para Taipan yang menganut Kapitalisme berbasis Korporasi ini, dalam pragmatisme ekonominya masih tetap menjalin aliansi strategis dengan para kapitalis global yang dari Amerika Serikat dan Eropa Barat yang kebetulan juga kapitalismenya berbasis korporasi.

Segi lain yang tak kalah penting, meskipun para Taipan seberang laut ini tumpuan kekuatannya semata sebagai orang-orang yang bermodal kuat dan berskala global, namun pada perkembangannya para Taipan tersebut telah menjelma menjadi Konsorsium Politik. Bukan sekadar klan ekonomi, keuangan maupun bisnis. Sehingga praktis para taipan tersebut telah menjadi negara dalam negara, dengan bertumpu pada skema Kapitalisme berbasis Korporasi.

Kapitalisme Berbasis Korporasi inilah yang justru lebih mengeratkan hubungan para taipan lintas negara tersebut dengan para kapitalis global di Amerika maupun Eropa Barat, ketimbang RRC. Karena RRC sama sekali menentang skema Kapitalisme berbasis Korporasi, dan lebih bertumpu pada Kapitalisme negara. Dimana Negara adalah subyek Ekonomi-Politik, Sosial-Budaya, dan Pertahanan–Keamanan. Sehingga RRC dalam visi dan misinya, sama sekali tidak dimungkinkan untuk

jadi obyek atau boneka para pelaku ekonomi asing, termasuk para Taipan Seberang laut sekalipun.

Dengan keadaan macam itu, maka dalam politik luar negerinya Indonesia akan selalu terkendala untuk menjalankan Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif, apalagi untuk menghidupkan kembali peran kepeloporannya seperti ketika menyponsori terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 maupun Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Beograd pada 1961. Khusus dalam KAA Bandung 1955 yang telah berhasil menghasilkan the Bandung Spirit atau DASA SILA BANDUNG, sejarah membuktikan bahwa Indonesia dan RRC telah bahu-membahu bekerjasama sehingga berhasil tercipta solidaritas bangsa-bangsa di kawasan Asia-Pasifik yang dipersatukan oleh ikatan bersama untuk melawan dan memerangi Imperialisme dan Kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Maka dari itu, kemungkinan para Taipan seberang laut untuk menyabotase politik luar negeri RI yang bertujuan untuk membangun konfigurasi dan kekuatan keseimbangan baru di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara, kiranya perlu dicermati dan diwaspadai. Mengingat potensinya untuk lebih condong bermain dan bekerja mewakili skema kapitalisme global Amerika Serikat dan Uni Eropa, dibandingkan mendukung skema alternatif Indonesia merangkul RRC dan Rusia dengan merujuk pada model Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan format kerjasama turunannya, (Brazil-Rusia-India-Cina dan Afrika Selatan (BRICS)).

Melalui konfigurasi dan kondisi obyektif yang tergelar di tanah air, maka mencuatnya fenomena *Panama Papers*, sama rentannya dengan bocornya WikiLeaks beberapa tahun yang lalu, untuk menciptakan aksi destabilisasi di negara sasaran, tak terkecuali di Indonesia. • Hendrajit

Mimpi Istri Sang Gubernur

Akhir-akhir ini, masyarakat disuguhkan aksi panggung yang kian memukau yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ya, Ahok mementaskan aksi 'serampangan' seolah tersudut dalam pusaran kasus yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ibarat orang yang sudah terpojok, Ahok berusaha menggunakan senjata apa saja yang ditemuinya. Karena, dia menyadari 'posisinya' saat ini kian tersudut. Tak hanya di korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, dia juga diduga terseret dalam pusaran kasus pemberian izin reperda reklamasi.

Seperti halnya dalam pusaran kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Ahok terus melakukan manuver ketimbang menyerahkan proses kasus tersebut ke penegak hukum. Entah, ini bagian strategi Ahok yang seolah-oleh bersih terhadap kasus tersebut atau sebaliknya. Padahal, jelas sikap Ahok yang 'serampangan' itu tak 'elok' atau sangat mengganggu proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait kasus tersebut.

Jika kita jeli saja pada hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, ada banyak faktor yang menyebabkan pembelian lahan Sumber Waras dinilai bermasalah.

Pertama, Proses pengadaan tanah Sumber Waras cacat prosedural karena bukan diusulkan oleh SKPD melainkan atas inisiatif, dan negosiasi langsung antara pemilik tanah dengan Plt Gubernur ketika itu Ahok. Kedua, disposisi Ahok yang memerintahkan Kepala Bappeda untuk menganggarkan

pembelian tanah Sumber Waras menggunakan APBD-P diduga telah melanggar UU Nomor 19/2012, Perpres Nomor 71/2012 dan Peraturan Mendagri Nomor 13/2006.

Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak melakukan studi kelayakan dan kajian teknis dalam penentuan lokasi. Terbukti tanah yang dibeli tidak memiliki akses untuk masuk, tidak siap bangun, langganan banjir dan bukan berada di Jl Kiai Tapa melainkan di Jl Tomang.

Keempat, Pembelian tanah masih terikat perjanjian jual-beli antara PT Ciputra Karya Unggul (CKU) dengan Sumber Waras dimana PT CKU telah menyerahkan uang muka senilai Rp 50 miliar kepada Sumber Waras. BPK juga menemukan fakta bahwa harga yang dibeli oleh PT CKU jauh lebih murah yaitu Rp 15,5 juta per m2. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta membeli dengan harga Rp. 20.755.000 per m2.

Kelima, Pihak Sumber Waras menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran sebelum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan

(PBB). Keenam, Ada kerugian keuangan sebesar Rp 191.334.550.000 (dari selisih harga beli antara Pemprov DKI dengan PT CKU) atau Rp 484.617.100.000 (dari selisih harga beli dengan nilai aset setelah dibeli karena perbedaan NJOP).

Saat beli dari pihak Sumber Waras, Pemprov DKI menggunakan NJOP di Jl. Kiai Tapa dengan harga Rp 20.755.000 per m2, tapi faktanya lokasi tanah berada di Jl Tomang Utara yang harga NJOP-nya Rp Rp 7,44 juta per m2.

Enam kejanggalan yang disebutkan BPK tentunya bukan tanpa dasar. BPK dalam hal ini telah melakukan audit investigatif terkait persoalan itu.

Menilik Cita-cita Sang Istri Ahok di RSSW

"RSUD khusus kanker ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2017 mendatang. Sambil menunggu pembangunan fisik dimulai, kita akan membangun sumber daya manusia dulu."





Kaditama Revbang BPK Bahtiar Arif (tengah) memberikan keterangan pers bersama Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara (kanan) dan Kaditama Binbangkum BPK Nizam Burhanuddin (kiri) terkait hasil pemeriksaan BPK atas pengadaan RS Sumber Waras di kantor BPK, Jakarta, Rabu (13/4).

Itulah sepenggal kutipan istri dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Veronica Tan dengan senyum khasnya yang menawan sering mengungkapkan mimpinya agar Jakarta memiliki rumah sakit khusus kanker sendiri.

Pernyataan Veronica itu disampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan (MoU) mengenai perawatan paliatif kanker antara YKI DKI Jakarta bersama Singapore International Foundation (SIF) dan Rachel House Foundation, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Tentunya sebuah mimpi dari sang isteri Ahok itu sangat mulia. Padahal, di Jakarta sendiri sudah ada lima rumah sakit yang mampu menangani pasien kanker. Tapi yaitu, Veronica Tan yang memiliki cita-cita

bahwa Jakarta tetap membutuhkan rumah sakit khusus kanker untuk mengurangi beban kelima rumah sakit yang sudah ada.

Tentunya, betapa bahagianya Veronica Tan, ketika mengetahui bahwa sang suami tercinta ingin segera mewujudkan mimpinya tersebut dengan membeli lahan Sumber Waras. Tak tanggung-tanggung Ahok bahkan berani melakukan pertemuan secara langsung dengan pemilik lahan Sumber Waras untuk negosiasi terkait pembelian lahan tersebut.

Menurut Veronica Tan, pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta memang khusus dipersembahkan oleh Ahok untuk membangun rumah sakit khusus kanker yang akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Disposisi Ahok untuk mengganggu pembelian lahan Sumber Waras dan pernyataan Veronica Tan tersebut terekam dengan sangat jelas dan terang benderang di Kompas.com pada Selasa, 20 Januari 2015 dengan judul berita "Veronica Ahok Ingin Pemprov DKI Bangun RSUD Khusus Kanker."

Dalam artikelnya, Kompas menyampaikan bahwa menurut Veronica Ahok sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memiliki RSUD khusus untuk melayani warga Jakarta yang terkena penyakit kanker. Bahkan yang sangat luar biasa, Veronica mampu mengetahui secara detail rencana pembangunan rumah sakit kanker oleh Pemprov DKI Jakarta lengkap dengan besaran anggarannya.

Veronica juga mengungkapkan bahwa RSUD khusus kanker tersebut akan dibangun diatas lahan seluas 3,7 hektare yang terletak tepat di sebelah RS Sumber Waras. Lahan tersebut telah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta seharga Rp755 miliar dengan anggaran tahun lalu (APBD 2014/pen).

Ketika mimpi Veronica untuk membangun RSUD khusus kanker hampir diwujudkan oleh suami tercintanya, namun demikian BPK dianggap Ahok menghadangnya. Dalam laporan hasil audit yang disampaikan di DPRD DKI Jakarta

dengan sangat jelas disebutkan bahwa pembelian lahan Sumber Waras diindikasikan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,334 miliar.

BPK pun ketika itu mengingatkan Ahok agar membatalkan pembelian itu. Bukan mendapatkan respons bagus, BPK dipandang Ahok sebagai penghalang untuk memberikan kado terindah untuk istrinya itu. Karena, menurut BPK jelas ada hal yang menyimpang dalam pembelian tersebut.

Seperti yang disampaikan BPK, Kamis (15/4) membeberkan sejumlah kejanggalan terkait transaksi pembelian lahan Rumah Sakit RS Sumber Waras, yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kejanggalan yang dirasa BPK, berasal dari transaksi yang tak lazim yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, ada transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Dinkas Pemprov DKI pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 atau lewat dari jam kerja.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, ada transaksi tunai senilai Rp 755,69 miliar melalui jenis belanja uang persediaan.

Padahal, transaksi melalui UP dilakukan untuk transaksi dengan nilai transaksi kecil. "Sudah nilai besar, lalu melalui UP dan transaksi dilakukan pukul 07.00 malam yang sudah lewat dari jam kerja," ujar Yudi di kantor BPK.

Auditor manapun, lanjut dia, dipastikan bakal mengkritik penggunaan UP tersebut. "Ini ada apa, transaksi apa, tetapi bisa salah bisa benar, kalau ada buktinya tidak masalah."

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ujar dia, auditor menuntut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembelian sebagian lahan milik Sumber Waras, yang dilakukan Pemprov DKI.

Kemudian, BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. "Jadi, dari sisi nilai, dari segi waktu, jenis belanja, siapa pun auditornya pasti bertanya ini transaksi apa sih? Kenapa

KRONOLOGIS PEMBELIAN LAHAN RS SUMBER WARAS

transaksinya mendadak, apa tidak ada waktu lain? Ini bukan masalah benar salah, tetapi auditor dilatih untuk mengetahui segala risiko.”

Berdasarkan perundang-undangan, kata Yudi, yang selanjutnya bisa melakukan proses lebih lanjut dari hasil pemeriksaan kemudian ditemukan indikasi yang telah ditelusuri penegak hukum.

Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Prof Romli Atmasasmita dalam sebuah acara diskusi meminta KPK untuk menelusuri aliran dana dari pemanfaatan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Romli, meski lahan di RS Sumber Waras telah dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun tetap saja tanah tersebut masih dimanfaatkan oleh pihak penjual dalam hal ini Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Saya lihat ini bukan hanya selisih (NJOP) tapi bagaimana pemanfaatan tanah setelah akta pelepasan hak yang seharusnya kembali kepada negara tapi masih dikuasai swasta. kemana nilai kemanfaatan dari hasil pemanfaatan tanahnya itu. Jadi KPK harus teliti, saya apresiasi KPK, sangat hati-hati KPK," ujar Romly dalam sebuah program televisi swasta, Selasa (12/4/2016).

Dalam Akta transaksi tanah yang dilakukan oleh pihak yayasan dengan Pemprov DKI, ujar dia jelas bahwa yang disepakati adalah pelepasan hak dan bukan jual beli. Menurut Romli, kesepakatan pelepasan hak antara pihak yayasan dan pemprov lantaran yayasan selama ini menguasai lahan dengan modal hak guna bangunan (HGB).

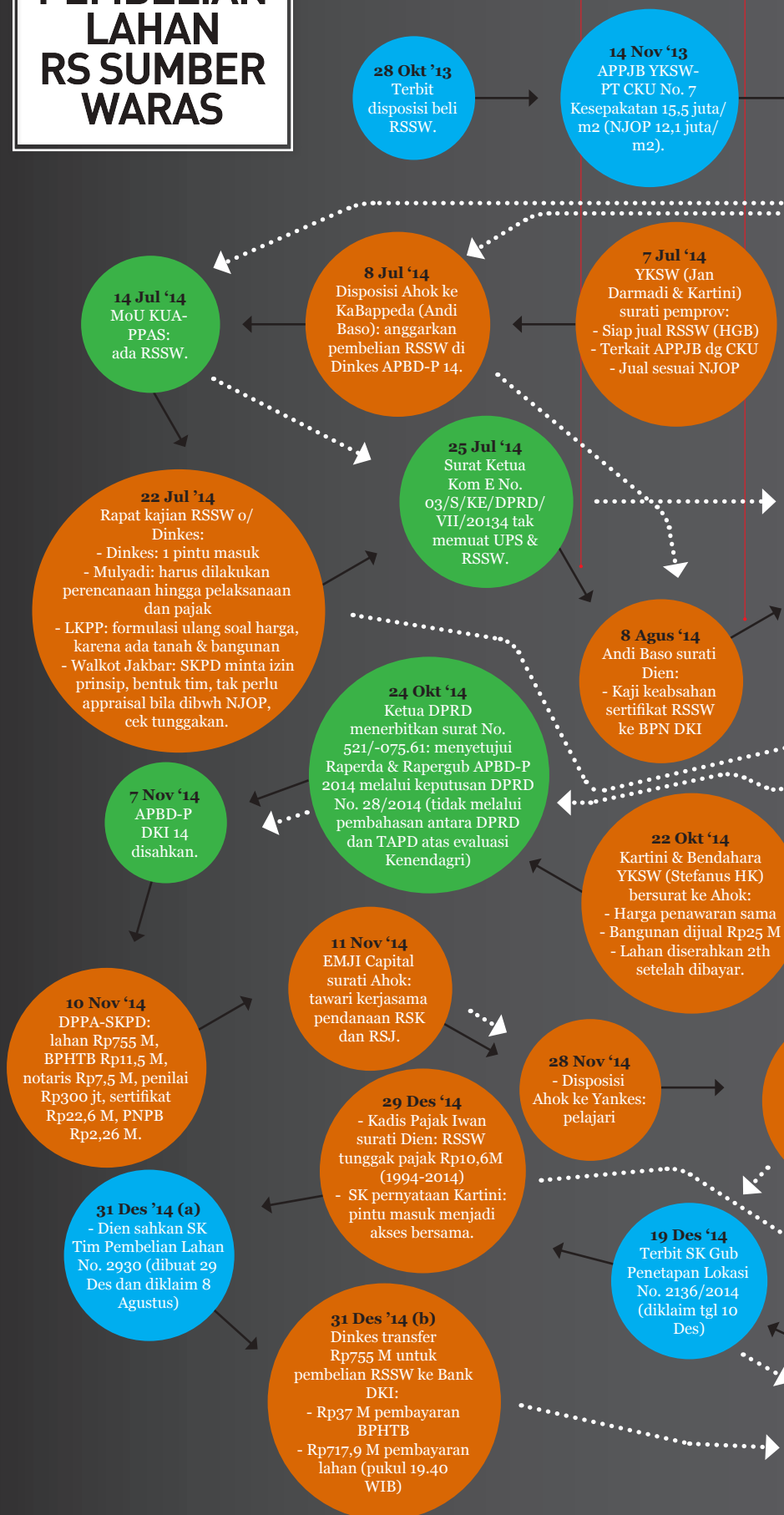
"Aktanya jelas dari saya baca dari depan ke belakang, tidak ada klausa pengusasan tanah setelah akta ditanda tangani, tidak ada klausa si penjual menguasai tanah 2 tahun setelah ditanda tangani akta, kalau sekarang masih dikuasasi penjual siapa yang rugi? siapa yang memanfaatkan hasil dari tanah itu, pasti penjual. Kemana uangnya? masuk ke negara kah karena sudah dilepaskan oleh negara atau masuk ke kantong pribadi kah, ini KPK harus telusuri."

Nebby Mahbubirrahman

Nebby Mahbubirrahman

Isu: Ahok-Saefullah lobi Ferrial (4-8/8), karena RSSW, KJP, KJS dihapus. Hasilnya, barter anggaran 1,6T

**11 Agus '14:
Terbit Pergub
No. 125/2014
(menggantikan
Pergub No.
175/2013)**



24 Apr '14:
Surat Kabiro
Tata Ruang
LH: pembelian
lahan sesuai
Perpres
71/2012



Samadikun Sudah Ditangkap, JK: Semoga Buronan BLBI Lain Menyusul

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersyukur atas tertangkapnya buronan korupsi Samadikun Hartono dan berharap buronan lainnya menyusul.

“Jadi kita bersyukur, berterima kasih pada aparat yang dapat menangkap Samadikun. Mudah-mudahan yang lain juga bisa,” kata Wapres usai mengantar keberangkatan Presiden ke Eropa di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (17/4).

Jusuf Kalla mengatakan pihak keamanan akan terus memburu para buronan yang hingga saat ini belum tertangkap.

“Itu kan masalah hukum. Namanya buronan akan diburu,” kata Wapres.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Samadikun yang merupakan mantan komisar utama Bank Modern itu ditangkap oleh agen Badan Intelijen Negara (BIN) di Tiongkok.

Samadikun telah divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan atau BLBI senilai sekitar Rp2,5 triliun yang digelontorkan kepada Bank Modern menyusul krisis finansial 1998.

Kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini adalah sebesar Rp169 miliar.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dihukum empat tahun penjara. /Arbie Marwan



BPK: Ini Kejanggalan dan Kerugian Pembelian Lahan Sumber Waras



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengatakan pembayaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk peralihan hak tanah seluas 3,6 hektar dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras, dianggap tidak lazim. Bukan hanya soal cara membayar yang menggunakan cek tunai, tapi waktunya pun dinilai janggal.

“Bahwa diakhir Desember, 31 Desember 2014, jam 7, ada bukti cek tunai, jam 7 sekian detik. Kenapa ini seperti dipaksakan?” ujar Harry di Jakarta, ditulis Minggu (17/4).

Selain proses pembayaran, BPK kata Harry juga mempertanyakan kenapa pembayaran peralihan lahan itu dilakukan diakhir Desember. Hal ini dinilai seakan dipaksakan.

“Kenapa (dipaksakan), memang itu kalau lewat dari jam 12, pembayaran setelah itu tidak sah. Tapi kenapa dibayar sebelum tutup buku? (Tutup buku) 25 Desember, artinya Pemprov DKI sudah pada posisi debit, tapi objek lahan belum

masuk asset DKI, karena sampai hari ini belum dikuasai Pemprov DKI” tegasnya.

Harry kemudian membandingkan antara transaksi PT Ciputra Karya Unggul (CKU) dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dengan yang terikat kontrak perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) No. 7 tertanggal 14 November 2013 tentang lahan RSSW seluas 3,6 ha berstatus hak guna bangunan (HGB), dimana pihak CKU hanya memberikan perikatan sebesar 8%, bandingkan dengan Pemprov DKI sudah melakukan pembayaran secara tunai 100%, padahal serah terima baru tahun 2018.

Lantas kata dia pertanyaan kemudian muncul, kemanfaatan dari pembelian lahan Sumber Waras sekarang siapa yang isi? Apakah sudah dipakai? Sekarang rumah sakit jalan tidak? Uang negara sudah terpakai tidak? Silahkan disimpulkan sendiri.

“Dari aktanya jelas dari saya baca dari depan ke belakang, tidak ada klausa penguasaan tanah setelah akta ditandatangani, tidak ada klausa si penjual menguasai tanah 2 tahun setelah ditandatangani akta, kalau sekarang masih dikuasai penjual siapa yang rugi?,” tanya Harry.

Anehnya juga kata dia meski lahan di RS Sumber Waras telah dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun tetap saja tanah tersebut sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh pihak penjual dalam hal ini Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras.

Adapun soal letak tanah dan kaitannya dengan NJOP, semestinya Pemprov DKI melakukan klarifikasi ke BPN, tentang letak posisi tanah yang benar.

“Apa sudah ada konfirmasi resmi dari BPN? Terkait letak posisi tanah? Sudah keluarkan surat belum? Ikut Kyai Tapa atau Tomang? Mestinya Pemprov DKI men-clear-kan soal ini, tidak terburu-buru langsung transaksi, apalagi ini menggunakan uang rakyat loh, ratusan milyar,” pungkas Harry. /Arbie Marwan

Bareskrim: Potensi Kerugian Kasus Pengadaan Solar PLN Capai Rp69 Miliar

Bareskrim Polri mentaksir potensi kerugian korupsi dari pengadaan bahan bakar jenis high speed diesel (HSD) atau solar dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai Rp69 miliar.

“Potensinya dari hasil hitungan sementara oleh tim BPK mencapai Rp69 miliar,” kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Adi Deriyanto Jayamarta, Selasa, (19/4).

Ia mengaku saat ini pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara (PKN) oleh BPK. Setelah didapatkan, maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara tahap pertama dengan tersangka eks Direktur Utama PLN, Nur Pamudji ke Kejaksaan Agung.

“Setelah didapat tinggal kita serahkan ke Kejagung. Pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai,” ucapnya.

Kasus ini bermula adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, menemukan kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi.

Karena harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar, dimana jauh lebih mahal dari gas, sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010.

Kedelapan pembangkit itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang dan Tanjungpriok (Jakarta Utara), PLTGU Tambak Lorok (Semarang), PLTGU Muara Tawar (Bekasi), PLTGU Gresik, PLTGU Grati (Pasuruan), PLTGU Teluk Lembu (Bali) dan PLTGU Bali.

Delapan unit pembangkit tersebut hanya mendapatkan pasokan gas sebanyak 785 BBTUD atau 49,03 persen dari total kebutuhan 1.601 BBTUD pada 2009. Pada 2010 pasokan gas menurun menjadi 778

BBTUD atau 48,78 persen dari kebutuhan sebanyak 1.595 BBTUD.

Dan hal ini mengakibatkan pembangkit-pembangkit harus dioperasikan dengan HSD yang harganya lebih mahal dari gas. Sehingga PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar.

Temuan angka fantastis itu kemudian dilaporkan ke Direktorat III/ Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri oleh Jaringan Advokat Publik, Selasa 8 Oktober 2014 lalu. Dirut PLN yang menangani proyek pembangkit listrik periode 2009-2010, Dahlan Iskan pun dilaporkan.

Sementara Nur saat itu menjadi Direktur Energi Primer PLN ditetapkan jadi tersangka pada 14 Juli 2015 lalu. Dirinya dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu. /Nebby

Baru Menang Praperadilan, Status La Nyalla Tersangka Lagi

Namanya belum dibersihkan dari status tersangka, La Nyalla Mattalitti kembali menyangang status pesakitan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kepala Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur itu kembali menyangang status tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan baru dengan nomor sprindik baru 397/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 April 2016.

Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti memenangi gugatan praperadilan yang diajukannya. Gugatan itu terkait penetapannya sebagai tersangka kasus Korupsi Dana Hibah Kadin tahun 2011 sampai 2014.

Dalam kasus ini, La Nyalla disebut menyalahgunakan dana hibah sebesar Rp 48 miliar untuk membeli saham perdana sebesar Rp 5,3 miliar di Bank Jatim.

Lalu bagaimana pendapat tim kuasa hukum La Nyalla menilik hal ini?

Kuasa hukum La Nyalla pun akan melaporkan ke Kejaksaan Agung hingga Presiden Jokowi terkait hal ini.



“Hari ini tim lawyer yang ada di Jakarta sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung, untuk menertibkan bawahannya yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata kuasa hukum La Nyalla, Amir Burhanudin terpisah.

Amir pun menilai, Jaksa Agung dalam hal ini tidak bisa menertibkan anak buahnya. “Kalau Kejaksaan Agung tidak bisa menertibkan anak buahnya, kita akan laporkan ke Presiden (Jokowi).”

Hal itu kata dia, tercermin dari dikeluarkan sprindik baru dan penetapan tersangka lagi terhadap kliennya.

“Kami sudah memprediksi kejadi akan mengeluarkan sprindik lagi. Kami sebagai masyarakat biasa, bisa apa, kecuali mempertahankan hak dan mencari keadilan. Kami tetap berupaya melakukan langkah-langkah hukum sesuai perundang-undangan. /Wisnu Yusep

Sengkarut Kucuran Dana CDB Menjerat Bank BUMN

Sedia payung sebelum hujan, pepatah ini terbersit dalam pikiran sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Komisi VI yang membidangi perbankan saat mendengar aksi ngeyel Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang ngotot melakukan peminjaman dana ke China Development Bank (CDB) melalui Bank BUMN sebesar USD3 miliar atau setara Rp42 triliun.

DPR pun dengan sigap menyikapi dan mengundang pihak pemerintah agar memberikan penjelasan atas pinjaman yang cukup fantastis itu, terlebih dipermukaan publik telah merebak kekhawatiran akan pinjaman itu menjebak dan menyandera bank kesayangan rakyat Indonesia.

Namun sangat disayangkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Senin (22/2) di Gedung DPR-RI, disembunyikan dari konsumsi publik atau diselenggarakan secara tertutup, usulan itu muncul dari Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN, Gatot Trihargo yang mewakili pihak pemerintah dengan didampingi para Direktur Utama Bank BUMN.

Beberapa saat kemudian, meluncur suara bahwa pemerintah melakukan manipulasi dan investasi semu. Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir menceritakan dalam rapat itu telah terungkap bahwa sebelum Bank BUMN tersebut melakukan utang ke China, ternyata Bank plat merah itu telah menentukan dan menunjuk bakal penerima atau debitur.

“Ini kontraktornya si A, si B, si C kemudian duitnya masuk dari China lalu bank kita menyalurkan kepada calon kontraktor tersebut. Kami memandang ini tidak baik bagi dunia perbankan, ini menunjukkan ada investasi semu dibalik semua

ini,” ungkap Tohir menunjukkan kekecewaannya.

Adapun aliran dana tersebut yang terpantau oleh Koalisi Anti Utang (KUA) ternyata masuk ke perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Arifin Panigoro. Bahkan ada satu perusahaan yakni, PT Indah Kiat yang bergerak disektor pulp and paper dengan nota bene jauh dari konteks pembangunan infrastruktur, seperti alasan pemerintah bahwa peminjaman dana tersebut akan digunakan untuk sektor infrastruktur.

“Memang portofolio kredit bank-bank BUMN sejak lama sudah terlalu didominasi oleh perusahaan besar, dan itu-itu saja. Kalau tidak perusahaan migas dan pertambangan ya perkebunan, atau properti. Nah, kita tahu siapa saja Taipan Indonesia yang menguasai sektor-sektor ini,” ujar Direktur Eksekutif KUA, Dani Setiawan.

PT Indah Kiat memang mendapat kucuran kredit dari BRI sebanyak USD175 juta, dari Mandiri sebesar USD50 juta. PT Indah Kiat merupakan salah satu anak perusahaan Sinarmas grup yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode INKP.

“Apabila melihat debitur bank BUMN tersebut, ada conflict of interest. Selama ini, sudah terlalu banyak konglomerat menikmati kucuran kredit perbankan BUMN,” jelasnya.

Dia menambahkan, perusahaan-perusahaan besar milik para Taipan tentu punya akses lebih baik untuk mendapatkan kredit.

“Para Taipan ini memiliki Jaringan, kapasitas, dan lobby yang menjangkau dari level direksi, komisaris, hingga pemegang saham (pemerintah). Tetapi tidak semua usaha mereka juga sebenarnya sehat. Bank-Bank BUMN juga sudah terlalu banyak memberikan keringanan-keringan

dalam pembayaran cicilan para Taipan ini, bahkan setiap tahun banyak diantara mereka yang mendapatkan pengampunan utang,” tegasnya.

Padahal mereka memungut tabungan dari masyarakat. Sementara kucuran kredit bagi usaha rakyat paling cuma 20-persen saja. Sementara, perlakuan bank terhadap usaha rakyat tidak kurang selayaknya rentenir yang menjerat rakyat.

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi kertas bermerek di Jakarta, Perusahaan ini didirikan





pada tahun 1981 yang produksi berbagai macam jenis kertas.

Kemudian perusahaan milik JK dan Arifin juga ada di daftar tersebut. Perusahaan PT Bosowa Energi mendapat kredit dari BRI sebanyak USD143 juta. Dan dari bank yang sama ada PT Semen Bosowa yang diberi pinjaman USD55,7 miliar.

Sementara perusahaan milik Arifin yakni PT Medco E&P Tomori Sulawesi yang dikucuri Mandiri sebanyak USD50 juta. Kemudian ada juga PT Medco Energi International Tbk mendapat kredit dari Mandiri

sebanyak USD245 juta.

Data diatas diperkuat dokumen otoritas jasa keuangan (OJK), bahwa terdapat aliran dana dari Bank BUMN mengucur ke berbagai perusahaan, diantaranya

PT. Poso Energy Satu Pamona, PT. Bosowa Energi, PT. Kartanegara Energi Perkasa, PT. Krakatau Steel (Persero).Tbk, PT. Pindo Deli, PT. Indah Kiat, PT. Semen Bosowa, PT. Tangki Merak, PT. Sugar Labinta dan berbagai perusahaan lainnya.

Dari sederetan nama perusahaan tersebut dapat tergambar bahwa

dana pinjaman dari CDB ke Bank BUMN terjadi penyalahgunaan peruntukan sebagai mana yang lazim dikemukakan pemerintah bahwa dana tersebut diperuntukan pada pembangunan infrastruktur.

Bahkan dana yang mengalir ke PT Medco group disinyalir akan digunakan untuk akuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui konsorsium. Adapun nama-nama yang bertindak sebagai konsorsium Akuisisi tersebut, tentu tidak asing lagi di telinga rakyat Indonesia.

Agus Projosamito

Dia adalah mantan Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas, memang bukan sejenis kutu loncat. Gaji tinggi serta berbagai fasilitas yang disediakan Danareksa boleh dibilang lebih dari cukup. Tapi, apa mau dikata, tawaran manis yang disodorkan Mandiri Sekuritas telah menggodanya untuk pindah ke lembaga keuangan milik Bank Mandiri tersebut.

Yang tak kalah menarik, bahwa sebagian besar dari 58 orang yang gabung pada program rasionalisasi di Danareksa ikut Agus hijrah ke Mandiri Sekuritas. Selain itu, Mandiri Sekuritas juga mendapat tambahan beberapa tenaga profesional dari PT Bahana. Jadi, Agus Projo mengajak profesional di Danareksa dan beberapa dari Bahana untuk 'bedol desa' ke Mandiri Sekuritas. Apalagi, para profesional itu sudah tidak betah di kantor lamanya akibat tak cocok dengan manajemen baru.

Setelah melalui proses tender terbatas, pilihan akhirnya jatuh pada proposal yang diajukan tim yang dipimpin Agus Projosamito. Tim Agus Projo efektif bekerja awal Desember 2001. Untuk memudahkan menjalankan program, Agus Projo menduduki kursi Direktur Utama Mandiri Sekuritas.

Sudjono Timan

Sudjono Timan (lahir di Jakarta, 9 Mei 1959) adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Dari tahun 1995 hingga 1997 ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Mahkamah Agung pada tahun 2013 lalu membebaskan Timan dari segala tuduhan terkait dugaan korupsi BPUI. Putusan tersebut juga menganulir putusan kasasi yang memvonis Timan 15 tahun dan denda Rp50 juta.

Sebelumnya, Timan dianggap menyalagunakan kewenangannya sebagai direktur utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta



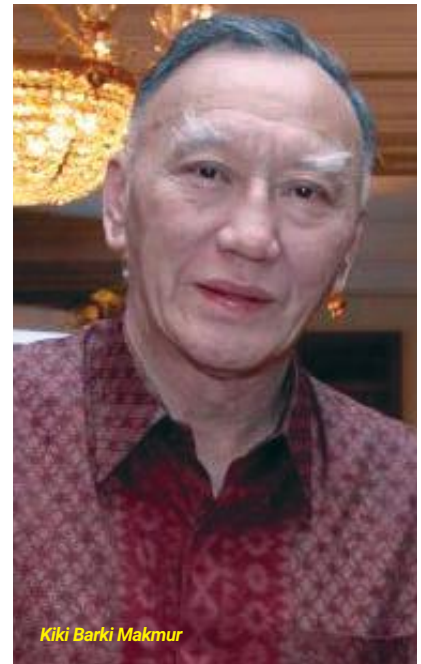
Sudjono Timan

Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98,7 miliar sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar 120 juta dolar AS dan 98,7 dolar singapura.

Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Timan dibebaskan dari tuntutan hukum karena perbuatannya dinilai bukan tindak pidana. Menanggapi vonis bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke tingkat MA.

Pada Jumat, 3 Desember 2004, Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang dipimpin oleh Ketua MA Bagir Manan memvonis Sudjono Timan dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp369 miliar.

Namun, kemudian istri Sudjono Timan selaku ahli waris mengajukan Peninjauan Kembali di tingkat MA. Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada 13 Juli 2013 menilai terdapat kekeliruan dalam putusan kasasi dan melepaskan Sudjono Timan dari segala tuntutan hukum.



Kiki Barki Makmur

Kiki Barki Makmur

Adalah Mertua dari Sudjono Timan. Ia juga merupakan pengusaha nasional batu bara yang akhir-akhir ini kegiatannya dikancah politik Indonesia patut ditelaah oleh kalangan dunia usaha Nasional ataupun International. Konon awalnya WNI Keturunan Tiongkok dari Kabupaten Hokcia itu tinggal di Bandung, saat MS Hidayat menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia, Kiki Barki Makmur ditunjuk selaku Ketua KIKC (Kadin Indonesia Komite China) organisasi underbound Kadin yang bergengsi, segera setelah itu Kiki Barki Makmur tiap saat dapat dipantau kegiatannya di media, dengan dukungan para sahabatnya kelompok Hokcia yang dikelola oleh Bandar SDSB Didi Dawis bersaudara dan kelompoknya

Ada yang mengatakan, Kiki Barki Makmur pernah memiliki Izin Tambang di Vietnam berkongsi dengan Sofian Wanandi (Tokoh CSIS-USA) dan Robby Sumampau (Pengusaha kepercayaan alm Jenderal Benny Murdhani) dan Pramono Anung sebagai profesional yang kini sebagai

politisi PDIP dan tengah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Karja. Kiki Barki Makmur juga memiliki menantu yang “hebat” Sudjono Timan (Yu Tjin), saat itu Direktur Utama BUMN PT Bahana (BPU) berhasil menggondol uang Negara USD126juta, dituntut 8 tahun penjara, diganjar Mahkamah Agung RI 15 tahun dan kabur, serta konon dipercayai sebagai rekayasa perkawinan dengan putri Kiki Barki Makmur “dicerai” untuk mengamankan aset keluarganya, demikian juga ada informasi Kiki Barki Makmur banyak membuat broken promise terhadap janji-janji tertulis dan lisan yang pernah diberikan kepada mitra bisnisnya.

Kiki Barki Makmur juga masuk daftar orang terkaya Indonesia 2014 peringkat 43 di Majalah Forbes, dengan kekayaan ditaksir USD680 juta (November 2013), perusahaan tambang batu baranya sudah go-public dan berprospek masa depan yang cerah, serta potensial menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi pengguna batu bara saat harga minyak mentah dunia lebih dari USD70/ Barel.

Membahas Kontroversial Kiki Barki Makmur ini karena kegiatan yang bersangkutan tersebut, telah bertentangan dengan asas filosofi dan budaya warga Tiongkok dimana dia berasal, kalau dikaji dari sejarah budayanya, Kegiatannya aktif di KIKC dan PERPIT (Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tiongkok) dan pernah menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, sesungguhnya bertentangan dengan filosofi kenyamanan dan pengamanan seorang pengusaha yang kayaraya, untuk dinasti keluarganya dan kerajaan bisnisnya.

Kembali kepada aliran dana yang digelontorkan kepada Medco Group, Arifin Panigoro sebagai pemilik saham membenarkan bahwa pinjaman dari Bank Mandiri akan ia gunakan untuk mengakuisisi PT Newmont Nusa

Tenggara (NNT), dia menjelaskan bahwasanya perusahaan Medco tengah menyiapkan finansial untuk mewujudkan akuisisi tersebut, sehingga ia bersama konsorsium mencari pinjaman ke berbagai bank, baik dalam maupun luar negeri, tak terkecuali Bank Mandiri.

“Dalam dan luar, banyak benar duit yang dibutuhkan, (Apakah Bank Mandiri termasuk?) Ya, itu salah satunya,” ujar Arifin.

Akan tetapi sangat disayangkan saat Aktual.com mengkonfirmasi pihak Bank Mandiri, Direktur Treasury and Markets, Pahala N. Mansury tidak mau berkomentar banyak atas indikasi penyalahgunaan peruntukan atas aliran dana dari CDB.

“Saya tidak mau berkomentar. Karena proses itu sudah betul dan dilakukan secara prudent,” jelas Pahala.

Ketika dibantah bahwa tujuan peminjaman dari CDB itu untuk pengembangan infrastruktur. Ia enggan untuk menjawab. “Coba tanya saja ke Medco-nya,” cetus Pahala.

Namun mantan Kepala Divisi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Iwan Ratman melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda, menurutnya ada kejanggalan dalam skema pendanaan tersebut.

Dia mempertanyakan kenapa PT Medco tidak meminjam secara langsung ke CDB namun malah melibatkan bank BUMN sebagai tameng dalam pendanaan. Kalau memang ini B2B (Business to Business) maka seharusnya Medco bisa langsung pinjam ke China, dan China juga bisa berikan pinjaman itu dengan jaminan aset Medco untuk mengakuisisi Newmont.

Pendapat itu memperkuat kecurigaan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang mengatakan sejak awal bahwa ada Szenario besar yang akan mengkooptasi Bank BUMN melalui peminjaman tersebut.

Cara yang digunakan yakni



menjebak Bank BUMN agar terikat pada utang, dengan begitu Bank BUMN akan dikuasai oleh pihak pemberi pinjaman.

“Ini peminjaman berdasarkan pesanan pihak tertentu, Bank BUMN dipaksa meminjam dengan alasan untuk infrastruktur, padahal ini merupakan upaya penguasaan Bank BUMN, ketika nanti ada permasalahan dalam pembayaran, mereka bisa menguasai itu,” kata Peneliti FITRA, Gufino Guevarra.

Namun tak kalah heboh ketika mengetahui ini semua, Ketua Komisi VI DPR-RI, Achmad Hafisz Thohir marah besar, ia berjanji akan memeriksa dan mempertanyakan kepada Bank BUMN terkait indikasi penyalahgunaan peruntukan dana pinjaman dari CDB tersebut.

“Saya akan cek kebenaran informasi ini,” kata Hafisz Thohir.

Lebih lanjut, tokoh dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu dengan tegas mengatakan bahwa dana tersebut tidak boleh disalahgunakan dari peruntukannya.

“Gak boleh!!! Kan itu untuk infrastruktur bukan untuk beli saham,” pungkasnya. • Dadang Syah

Bank Dunia dan AIIB Sepakati Pembiayaan Proyek Bersama

Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) lembaga keuangan yang dimotori pemerintah Tiongkok pada Rabu (13/4) menandatangani perjanjian kerangka kerja pembiayaan bersama pertama, membuka jalan bagi kerja sama mereka pada proyek-proyek bersama tahun ini.

Perjanjian tersebut menguraikan parameter pembiayaan bersama proyek-proyek investasi Bank Dunia dan AIIB, kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataan.

Pada 2016, AIIB mengharapkan untuk menyetujui sekitar 1,2 miliar dolar AS dalam pembiayaan, dengan proyek-proyek bersama Bank Dunia diharapkan memberikan pangsa yang

cukup besar, kata Bank Dunia. Tapi ia tidak memberikan rincian pangsa yang di proyek-proyek yang dibiayai bersama.

Menurut pernyataan itu, Bank Dunia dan AIIB sedang membahas hampir satu lusin proyek-proyek pembiayaan bersama di sektor yang meliputi transportasi, air dan energi di Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Timur.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Dunia akan mempersiapkan dan mengawasi proyek-proyek pembiayaan bersama di berbagai bidang seperti pengadaan, lingkungan dan perlindungan sosial.

“Saya sangat senang hari ini untuk menandatangani perjanjian pembiayaan bersama ini bersama-sama dengan Presiden Bank Dunia Kim,” kata Presiden AIIB Jin Liqun dalam pernyataan tersebut.

“AIIB sangat berterima kasih atas dukungan besar dan tepat waktu yang ditawarkan oleh Kelompok Bank Dunia selama proses pendirian kami, dan kami berharap untuk hubungan panjang dan berbuah dengan kerja sama yang sedang berlangsung dalam proyek pembiayaan bersama dan bidang-bidang lainnya.” Menurut Bank Dunia, sekitar 1,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses listrik dan 2,4 miliar orang tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi dasar.

“Penandatanganan perjanjian ini memungkinkan lembaga untuk membiayai proyek-proyek pembangunan bersama-sama, dan itu merupakan langkah penting pertama menuju pekerjaan dengan mitra baru untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur besar di dunia,” kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

/Wahyu Romadhoni

“Peraturan Pemerintah Tentang Holding BUMN Siap Terbit Akhir Juli”

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan realisasi pembentukan holding (induk usaha) enam sektor BUMN tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang ditargetkan diterbitkan sekitar akhir Juli 2016.

“Sebelum Lebaran tahun ini (2016), holding enam BUMN diharapkan sudah terbentuk,” kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut Rini, ke-6 holding tersebut meliputi holding BUMN Jasa Keuangan, BUMN Pertambangan, Holding Energi, Holding Perumahan, Holding Jalan Tol, dan Holding BUMN Infrastruktur.

“Saat ini proses pembentukan holding sudah memasuki tahap penyelesaian kajian di masing-masing sektor. Kajian dilakukan oleh tiga BUMN yaitu Mandiri Sekuritas, Danareka Sekuritas, dan Bahana Securities,” ujar Rini.

Meski begitu tambahnya, setelah melalui kajian tiga BUMN Sekuritas tersebut, kajian dilanjutkan kembali oleh pihak ketiga agar mendapat hasil yang terbaik.



“Setiap kajian juga disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian terkait sektor yang bersangkutan,” ujarnya.

Misalnya, Holding BUMN Tambang harus mendapat input dari Kementerian ESDM, Holding Jalan Tol mendapat masukan dari Kementerian PUPERA, selain tentunya Kementerian Hukum dan HAM karena terkait dengan PP.

Rini menjelaskan, dalam pelaksanaannya BUMN yang menjadi induk usaha kepemilikan saham Pemerintah di dalamnya harus 100 persen.

“Bisa saja dalam satu holding ada perusahaan berstatus terbuka (Tbk), namun yang menjadi induk harus 100

persen milik negara,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam Holding BUMN Energi, PT Pertamina (Persero) menjadi induk usaha dan anak usahanya adalah PT PGN (Persero) Tbk.

“Dengan payung hukum PP, perusahaan terbuka bisa menjadi anak usaha melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),” ujarnya.

Pertamina menjadi induk membawahi PGN, Hutama Karya holding BUMN Jalan Tol, Perumnas induk usaha BUMN Perumahan, Inalum induk usaha BUMN Pertambangan. Selebihnya perusahaan yang akan menjadi induk usaha Holding BUMN lainnya masih dalam finalisasi.

“Intinya, Pemerintah mempercepat pembentukan Holding BUMN agar tercipta efisiensi terutama dalam operasional dan keuangan, serta menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi serta menjunjung transparansi,” tegasnya.

/Arbie Marwan

Defisit Anggaran Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Pangkas Anggaran Hingga Rp50 T

Difisit anggaran memaksa pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga negara sebesar Rp50 triliun guna menyesuaikan APBN-Perubahan 2016.

“Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja yang tidak prioritas,” kata Presiden Jokowi di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4).

Presiden menilai kementerian dan lembaga negara dapat memotong anggaran dari sejumlah pengeluaran



yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas.

Pada awal Maret sejumlah menteri dipanggil oleh Presiden yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menlu Retno LP Marsudi dan Seskab Pramono Anung.

Pertemuan itu membahas persiapan RAPBNP 2016 dan masalah kemudahan berusaha atau *easy doing business* dan rencana

kerja pemerintah jangka menengah dan panjang.

Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah akan melakukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2016 yang melebar.

“Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja 40 triliun (rupia),” kata Bambang.

Kendati pemerintah telah memangkas belanja negara, namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah.

Bambang menyebutkan di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun, menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non-kementerian dan lembaga naik Rp9,6 triliun. /Wahyu Romadhoni

Pertamakalinya, Pendapatan Telkom Tembus Rp100 Triliun

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPST) mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 Telkom membukukan pendapatan konsolidasi Rp102,47 triliun atau tumbuh 14,2 persen.

“Ini pertamakalinya pendapatan Telkom menembus angka Rp100 triliun. Sehingga Telkom dapat membagikan Dividen senilai Rp9,29 triliun,” ujar Alex Sinaga di Jakarta, Jumat (22/4).

Pencapaian kinerja perseroan ditopang dari pertumbuhan segmen data, internet dan IT service sebesar 37,5 persen. Perseroan juga mencatat pertumbuhan EBITDA sebesar 12,6 persen menjadi Rp51,42 triliun dengan margin EBITDA sebesar 50,2 persen. Sedangkan anak perusahaan Telkom, Telkomsel menyumbang kontribusi yang besar mencapai 57 persen.

“Biaya operasi naik 15,8 persen



menjadi Rp70,01 triliun sepanjang 2015 seiring dengan pembangunan infrastruktur dan segmen bisnis,” tambahnya.

Terkait Capex (Belanja modal), sepanjang tahun 2015 Telkom membelanjakan Rp26,4 triliun atau sekitar 26 persen dari pendapatan untuk membangun infrastruktur dan fokus mendukung layanan data.

Sedangkan untuk kuartal

pertama 2016, Telkom membukukan pendapatan Rp27,54 triliun bertumbuh 16,6 persen, EBITDA Rp14,66 triliun bertumbuh 18,8 persen dan laba bersih Rp4,59 triliun bertumbuh 20,2 persen.

“Segmen data, internet dan IT Service menyumbang Rp10,3 triliun meningkat 45,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” pungkasnya. /Ismed

Kelompok Abu Sayyaf: Dari Separatis Idealis Jadi Tukang Culik

Kelompok Abu Sayyaf semula adalah sempalan dari gerakan separatis Moro, yang ingin merdeka dari Filipina. Namun, karena kebutuhan ekonomi dan operasional, mereka akhirnya terpecah-pecah dan menjadi pelaku kriminal biasa, termasuk menculik untuk minta tebusan.

Drama penculikan terhadap 10 warga negara Indonesia telah mengangkat nama kelompok Abu Sayyaf (Jamaah Abu Sayyaf), kelompok militan yang berbasis di kepulauan Julu dan Basilan, Filipina selatan. Selama lebih dari empat dasawarsa, kelompok-kelompok Muslim Moro ini telah berjuang untuk meraih kemerdekaan dari Filipina.

Kelompok-kelompok ini kemudian bersilang jalan. Ada yang setuju berdamai dengan pemerintah Filipina dengan imbalan otonomi daerah, misalnya, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang mayoritas. Tetapi tetap ada yang menolak tunduk pada otoritas Filipina dan terus menuntut kemerdekaan bagi “negara Islam Moro.” Salah satunya adalah kelompok Abu Sayyaf.

Drama 10 warga negara Indonesia, yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dengan motif minta tebusan, bermula pada 26 Maret 2016. Waktu itu kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 dalam perjalanan dari Sungai puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina. Pelayaran dimulai sejak 15 Maret 2016.

Kedua kapal membawa 7.500 metrik ton batubara curah dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kapal-kapal itu milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, yaitu PT. Patria

Maritime Lines. Pembajakan terhadap dua kapal itu dan penyanderaan terhadap 10 awaknya terjadi di perairan Tawi-Tawi, Filipina.

Pemilik kapal baru mengetahui ada pembajakan pada 26 Maret 2016, ketika ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf. Pembajak meminta uang tebusan 50 juta peso (setara 14,3 miliar) dengan batas waktu 31 Maret 2016. Tapi batas waktu ini kemudian terlewat dan diperpanjang sampai 8 April 2016, terus tidak jelas lagi batas waktunya.

Kapal Brahma 12 kemudian sudah dilepas pembajak dan berada di tangan otoritas Filipina. Namun, 10 WNI tetap disandera. Pemilik tongkang Anand 12 bernegosiasi dengan pembajak, dan bersedia membayar tebusan demi pembebasan para awak kapal yang disandera. Tetapi hingga artikel ini ditulis, belum jelas bagaimana akhir drama penyanderaan tersebut.

Berawal dari Afghanistan

Pembajakan kapal dan penculikan 10 WNI ini menimbulkan

Sejumlah warga dan keluarga Bayu Oktavianto melakukan doa bersama di Miliran, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (2/4). Doa bersama tersebut ditujukan untuk Bayu Oktavianto serta seluruh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf saat melintas di perairan Filipina pada Sabtu (26/3/2016) lalu, agar diberi keselamatan serta kelancaran saat proses pembebasan.



kehebohan dan kesibukan di jajaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mabes Polri. Mereka pun aktif berhubungan dengan pihak Filipina dan pihak-pihak lain, untuk menyelamatkan WNI tersebut. Segala perkembangan tentang penyanderaan ini dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Kasus ini pun mengangkat nama kelompok Abu Sayyaf, yang di Filipina sudah sangat terkenal dengan



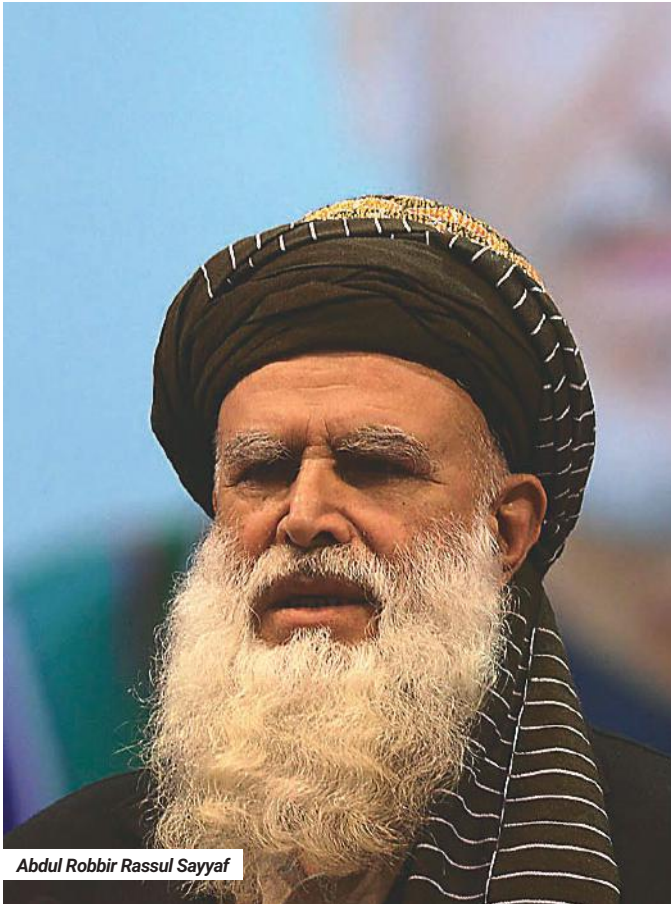
berbagai aksi penculikannya. Publik Indonesia beberapa bulan terakhir ini lebih memperhatikan kelompok ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) yang berbasis di Timur Tengah, dengan berbagai aksi terornya yang dipublikasikan meluas di media. Siapa nyana, serangan penculikan terhadap WNI justru berasal dari kelompok yang lebih dekat secara geografis, di wilayah tetangga kita Filipina, yang selama ini kurang diperhatikan oleh publik

Indonesia.

Nama kelompok Abu Sayyaf dicuplik dari nama Abdul Robbir Rassul Sayyaf, seorang etnis Pashtun berpengaruh dan pejuang Mujahidin di Afganistan, yang berperang melawan pasukan Uni Soviet pada 1980-an. Abu Sayyaf, yang berarti “bapak ahli pedang” dalam bahasa Arab, memiliki banyak anak buah dan pengikut di medan perang Afganistan. Banyak pejuang dari negara lain, termasuk dari Indonesia

dan Filipina, ikut berjihad di Afganistan.

Mereka berlatih militer di Tanzim Ittihad-e-Islamy yang dikelola oleh Abdul Robbir Rassul Sayyaf. Di kamp ini ada peserta asal Filipina, yakni Abdurajak “Jack” Abubakar Janjalani. Janjalani adalah guru dari Pulau Basilan, yang pernah belajar teologi Islam dan bahasa Arab di Libya, Suriah, dan Arab Saudi pada 1980-an. Tokoh Muslim Moro ini terkesan pada sosok Abdul Robbir



Abdul Robbir Rassul Sayyaf



Abdurajak "Jack" Abubakar Janjalani

Rassul Sayyaf dan mengambil nama idolanya itu menjadi nama kelompok, yang didirikan pada 1991 di Filipina Selatan, yaitu Abu Sayyaf.

Kelompok ini awalnya adalah kelompok separatist yang idealis, yang menjadi bagian dari pasukan bersenjata Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), yang dipimpin Nur Misuari. Namun kelompok ini lalu menentang langkah MNLF, yang bersedia melakukan perundingan perdamaian dengan pemerintah Filipina. Perundingan yang berlangsung di Jakarta itu dimediasi oleh Indonesia. Perdamaian antara pemerintah Filipina dan MNLF melahirkan Kawasan Otonomi di Mindanao Muslim atau ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao), dengan Nur Misuari sebagai gubernurnya yang pertama.

Kelompok Abu Sayyaf, yang kukuh

dengan tuntutan kemerdekaan penuh, pun memisahkan diri dari MNLF. Sejak pemisahan diri dari MNLF, Abu Sayyaf gencar memerangi aparat Filipina. Dalam tindakannya, Abu Sayyaf berbeda dengan MNLF dan faksi pecahan lain, Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Dibandingkan MNLF dan MILF, jumlah anggota Abu Sayyaf tidak banyak. Awalnya ia beranggota sekitar 1.250 orang, namun saat ini diperkirakan hanya sekitar 400 orang.

Bandit dan Penjahat Biasa

Meskipun sama-sama memeluk Islam dan memperjuangkan kemerdekaan dari Filipina, Abu Sayyaf lebih liar dan tidak terkontrol. Banyak anggotanya yang bergabung karena "solidaritas." Mereka umumnya kurang berpendidikan dan minim pengetahuan, dan bergerak melakukan perlawanan

karena merasa terintimidasi dan didiskriminasi oleh pemerintah Filipina. Mereka tidak kompak dalam satu kesatuan komando, tetapi terpecah-pecah seperti gerombolan-gerombolan dengan banyak sel.

Mereka tidak mendapat sumbangan atau dukungan dana dari luar negeri. Anggota kelompok ini juga bukan orang kaya dan bukan pengusaha. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlengkapan senjata, mereka pun melakukan tindak kriminal. Inilah salah satu hal yang mendorong Abu Sayyaf melakukan perampokan, pemerasan, penculikan, dan meminta tebusan dalam setiap aksinya. Tidak mustahil, di dalam kelompok ini juga ada yang bandit dan penjahat biasa.

Pendiri Abu Sayyaf, Abdurajak Janjalani, tewas dalam baku tembak dengan polisi nasional Filipina di Basilan pada Desember 1998.



Khadaffy Janjalani



Isnilon Totoni Hapilon

Abu Sayaf lalu dipimpin oleh adik kandungnya, Khadaffy Janjalani, yang terbunuh pada 2007. Sejak pergantian kepemimpinan ke Khadaffy inilah, Abu Sayyaf bergeser, dari kelompok separatis yang ideologis menjadi sekadar pelaku kriminal. Komandan Abu Sayyaf saat ini ialah Isnilon Totoni Hapilon. Karena menganggap Abu Sayyaf sebagai kelompok teroris, pemerintah Amerika Serikat menawarkan uang hadiah sebesar 5 juta dollar AS (setara Rp 66 miliar) bagi informasi yang berujung pada penangkapan Hapilon.

Persenjataan kelompok ini adalah senapan otomatis, mortir, dan bahan peledak rakitan. Sejak terpecah dari MNLF, Abu Sayyaf telah menculik ratusan orang. Mayoritas yang disandera adalah orang Filipina dan orang kulit putih. Tidak jarang sandera tersebut dibunuh, terutama yang tidak memenuhi permintaan tebusan.

Karena pola penculikan terhadap 10 WNI itu tidak biasa, pengamat Haris Abu Ulya di Jakarta mengatakan, penyanderaan terhadap warga Indonesia ini mungkin salah sasaran, karena biasanya kelompok Abu Sayyaf tidak pernah menyandera orang Islam. “Saya kira ini salah target,” ujar Haris.

Pada Juli 2009, staf Palang Merah Internasional dari Italia, Eugenio Vagni, disandera Abu Sayyaf selama enam bulan. Vagni dilepas di Jolo, setelah ditebus 10.000 dollar AS (sekitar Rp 130 juta). Pada November 2015, kelompok Abu Sayyaf memenggal Bernard Ghen Ted Fen, turis asal Malaysia, karena keluarganya gagal memenuhi tebusan 40 juta peso (setara Rp 12 miliar).

Abu Sayyaf juga pernah melakukan pengeboman. Pada Desember 1994, kelompok itu mengebom pesawat Philippines

Airlines jurusan Manila-Tokyo dan menewaskan seorang penumpang. Serangan lain adalah serbuan ke Kota Ipil pada 1995, yang menewaskan 50 orang, serta serangan granat ke sebuah pusat perbelanjaan di Zamboanga pada 1998, yang mencederai 60 orang. Sebagian besar aksi itu terjadi di Mindanao selatan. Serangan teror terburuk yang dilakukan kelompok ini adalah pemboman Superferry 14 pada tahun 2004, yang menewaskan 116 orang.

Pada 23 Juli 2014, pimpinan Abu Sayyaf, Isnilon Totoni Hapilon, disebut-sebut telah berbaiat kepada pimpinan ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Namun, menurut pengamat terorisme Nasir Abbas, Abu Sayyaf hanya ikut-ikutan saja bergabung dengan ISIS. “Masalah menculik, membunuh, mereka sudah lebih dulu dari ISIS,” kata Nasir. ■

Satrio Arismunandar

Marxisme-Leninisme ala Indonesia

Ada sebuah adagium menyatakan bahwa sejarah hanya untuk orang-orang yang menang. Artinya, sejarah ditulis oleh pihak punya kuasa. Sementara, pihak yang kalah tak mendapat tempat dalam penulisan sejarah. Apabila mereka ditulis, tentu saja dianggap pesakitan atau pemberontak.

Hal inilah yang dialami oleh orang-orang kiri—penganut ajaran Marxisme-Leninisme. Sejak dianggap melakukan kudeta pada 1965. Pemerintah Soeharto kemudian melarang aktivitas yang dianggap kiri dan kemudian kiri dianggap berbahaya. Hingga saat ini pun, kita masih melihat pelarang-pelarangan kegiatan yang dianggap kiri. Tanpa kita memahami apa itu kiri dan apa yang diperjuangkan untuk Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penulis coba membahas ide dan pemikiran Dipa Nusantara Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui film pengkhiantan G30S/PKI (1982) Aidit digambarkan sebagai seorang berbahaya, pembunuh, dan atheis. Tapi, siapa yang menyangka bahwa Aidit sewaktu kecil adalah seorang muazin dan sudah tamat membaca Al-Qur'an sebanyak tiga kali (hlm.35).

Buku yang terdiri dari enam bab ini coba menjelaskan perbedaan pemikiran Aidit tentang Marxisme-Leninisme dengan Marxisme-Leninisme yang berkembang di dunia. Perbedaan pertama tentang gerak sejarah perkembangan struktur masyarakat Indonesia atau dapat dikatakan matrealisme historis.

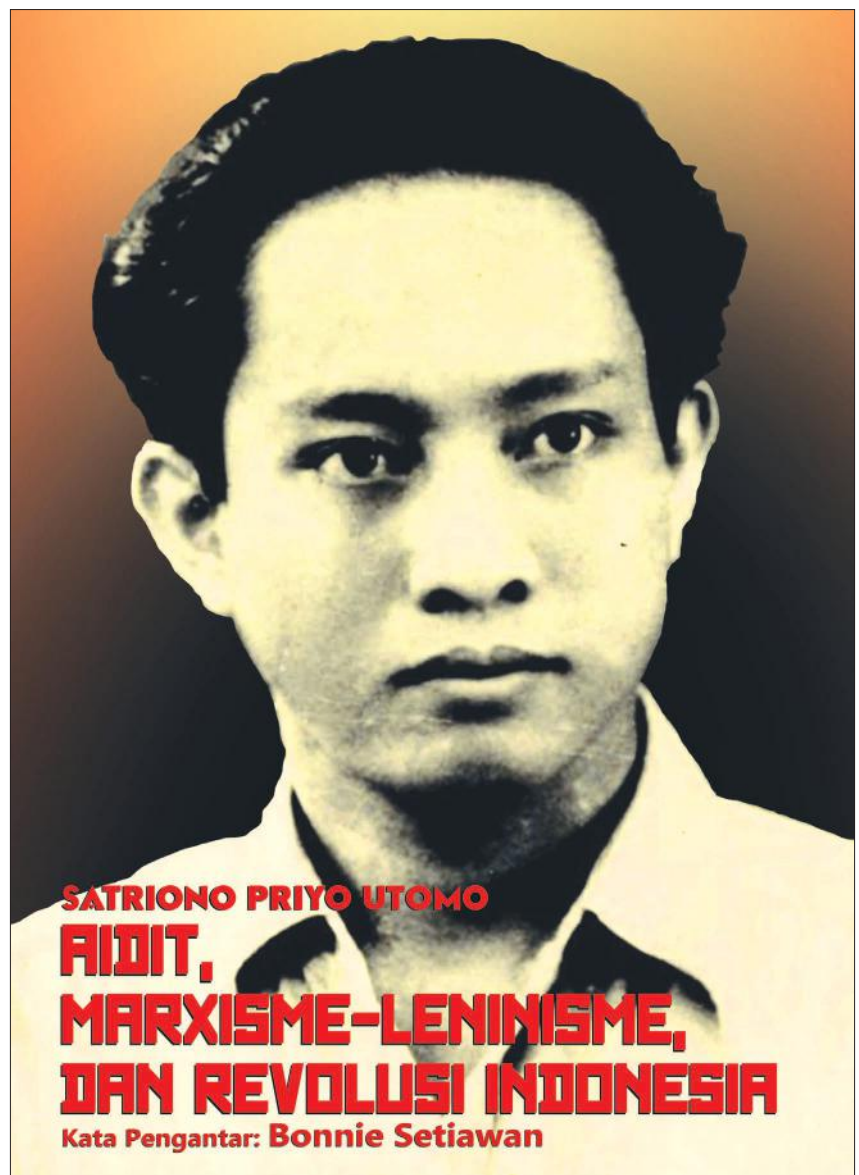
Menurut Marx dalam German Ideology (1846), matrealisme historis adalah eksistensi manusia dimulai saat mereka bisa memproduksi alat-alat hidup, suatu ruang hidup yang dikondisikan oleh organisasi fisik mereka. Dengan memproduksi

alat produksi, manusia secara tak langsung memproduksi kehidupan materialnya. Intinya, cara produksi suatu masyarakat akan merepresentasikan cara hidupnya.

Marx membagi sejarah perkembangan struktur masyarakat terdiri atas tahapan masyarakat komunal, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapital, masyarakat sosialis, dan

masyarakat komunis. Kemudian, Marx membagi manusia menjadi dua kelas yakni kelas borjuis dan kelas proletar (buruh).

Marx melanjutkan dalam Manifesto Komunis (1848) bahwa yang terjadi saat itu adalah ketidakadilan dalam masyarakat. Musababnya, penguasaan alat produksi oleh Kaum Borjuis dan menghisap nilai lebih dari hasil kerja



buruh. Oleh sebab itu, buruh harus merebut alat produksi dari kaum Borjuis.

Sedangkan, Aidit membagi sejarah perkembangan struktur masyarakat Indonesia menjadi masyarakat komunal primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat feodal dan kolonial, masyarakat kolonial dan setengah feodal, masyarakat merdeka dan setengah feodal, dan masyarakat setengah kolonial dan setengah feodal (hlm.57).

Menurut Aidit, realitas masyarakat Indonesia tidak sejalan dengan gagasan Marxisme-Leninisme di Eropa. Sebab, Indonesia mengalami dua ketertindasan. Pertama feodalisme, sistem penguasaan tanah oleh raja ini yang sangat menindas rakyat Indonesia terutama kaum tani. Kedua kapitalisme, pada masyarakat Eropa terutama revolusi Prancis, kapitalisme dapat menumbangkan feodalisme.

Sedangkan, di Indonesia, kapitalisme justru memanfaatkan struktur feodalisme untuk bersama-sama menindas rakyat. Dan, oleh sebab itu, menurut Aidit basis tenaga revolusi Indonesia bukan buruh, melainkan petani (hlm.64). Praksisnya, PKI mendukung adanya Land Reform untuk petani dan berhasil mewujudkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960). Ini yang dinamakan Aidit, Marxisme-Leninisme yang di-Indonesia-kan.

Perbedaan kedua yakni Aidit mendorong terciptanya, borjuasi nasional. Menurut Aidit, borjuasi nasional merupakan kelas yang juga tertindas oleh kapitalisme asing dan

dikekang perkembangannya oleh feodalisme (hlm.67). Kapitalisme yang berkembang adalah adanya perusahaan multinasional milik asing yang beroperasi di Indonesia.

Hal ini tentu saja menegaskan bahwa Indonesia belum independen secara ekonomi. Munculnya borjuasi nasional dianggap penting sebagai tahap awal mewujudkan ekonomi. Oleh sebab itu, cara untuk mewujudkannya adalah dengan menasionalisasikan seluruh perusahaan asing (hlm.73).

Perbedaan ketiga adalah tentang partai dan jalannya revolusi. Jika Marx menuliskan bahwa buruh harus merebut alat produksi, maka Lenin mengejutkannya dengan mendirikan sebuah partai komunis bernama Bolshevik yang dipimpin oleh kaum buruh. Caranya dengan menggulingkan kekuasaan yang ada. Partai revolusioner, menurut Lenin dalam Negara dan Revolusi (2000) harus bisa membongkar sistem lama seperti hukum, pemerintahan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan harus menyusun ulang agar mencerminkan kebutuhan kaum buruh.

Aidit justru sangat berbeda, PKI yang ia pimpin menginginkan revolusi secara damai dan melalui jalur konstitusional. Tak hanya itu, strategi revolusi PKI pun menjunjung adanya persatuan nasional untuk melawan kapitalisme-imperealisme. Ini kemudian yang membuat kedekatan antara PKI dan Soekarno untuk tetap menjalankan revolusi Indonesia (hlm.109).

Sementara itu, mengenai jalannya revolusi. Aidit mewacanakan revolusi Indonesia berlangsung secara dua tahap yakni revolusi nasional kemudian revolusi sosial. Hal ini tentu saja sama dengan gagasan Soekarno, dalam buku Sarinah (1947). Soekarno menerangkan bahwa revolusi Indonesia terbagi atas dua tahap yakni Revolusi Nasional dan dilanjutkan dengan revolusi sosial. Revolusi Nasional melepas belenggu penjajahan, setelah itu menjalankan revolusi sosial dengan

mengempaskan feodalisme dan kapitalisme.

Sebenarnya, buku mengenai Aidit sebelumnya sudah dituliskan oleh Peter Edman, Komunisme ala Aidit (2005). Bedanya, Edman hanya menjelaskan sekak terjang Aidit di dunia politik serta gagasannya dengan komunisme tanpa ada pembahasan mengenai kondisi masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, Edman menyatakan tidak ada kesamaan visi serta misi antara Aidit dan Soekarno, yang tentu saja terbentahkan oleh buku yang ditulis oleh Satriono ini.

Sayangnya, buku ini hanya memaparkan kritik dari musuh politik Aidit seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Masyumi. Kritik terhadap Aidit dari sesama anggota PKI semestinya juga dapat dimuat. Ini penting untuk menjelaskan bahwa saat itu sulit membedakan antara kebijakan Aidit dengan kebijakan PKI yang menjunjung tinggi kolektivitas partai. Tak hanya itu, penulis juga menggunakan referensi sekunder dalam mengutip Marx, Engels, dan Lenin. Mungkin saja ini disebabkan keterbatasan penulis dalam menguasai bahasa. Tapi, itu penting untuk lebih mengetahui pemahaman utuh tentang pemikiran Marx, Engels, dan Lenin.

Kendati demikian, buku ini layak untuk dibaca dan menambah khazanah keilmuan pemikiran tokoh-tokoh penting Indonesia periode awal kemerdekaan. Sebab, selama ini penulisan sejarah pemikiran tokoh Indonesia masih didominasi oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. Pemikiran Aidit tentang petani dan kondisi perekonomian Indonesia yang tidak independen masih relevan hingga saat ini. Lihat bagaimana petani rembang terancam tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan adanya korporasi yang akan menggusur dan merusak lahan pertaniannya. ◻

Judul Buku: **Aidit, Marxisme-Leninisme, dan Revolusi Indonesia**

Penulis: **Satriono Priyo Utomo**

Penerbit: **Indie Book Corner**

Tahun Terbit: **Cetakan I, April 2016**

Tebal: **176 halaman**

ISBN: **978-602-3092-3091-60-7**

*Viridika Rizky Utama
(Mahasiswa Jurusan Sejarah, Pemimpin Umum Lembaga
Pers Mahasiswa Didaktika, Universitas Negeri Jakarta)*

Kasus Siyono, seorang warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2016. Meski ia adalah tersangka, namun pengadilan belum memutuskan bahwa Siyono bersalah. Namun ia harus merenggang nyawa dengan kondisi mengenaskan yang diduga dilakukan oleh Pasukan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 yang merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia.

Benarkah Siyono teroris? Penangkapan Siyono pada 8 Maret 2016 lalu, merupakan serangkaian penangkapan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di Pamanukan, Yogyakarta, Klaten dan Semarang pada Mei 2014 silam. Sembilan terduga teroris ditangkap dan seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti antara lain bunker di Parangtritis, pabrik senjata api rakitan di Klaten, beberapa pucuk senjata api, lebih dari enam blok peledak TNT, dan sejumlah unsur bahan kimia untuk bahan peledak.

Tak lama kemudian, Densus 88 kembali menangkap empat terduga teroris jaringan JI di Mojokerto dan Gresik pada 19 Desember 2015. Mereka adalah bagian dari sembilan teroris yang ditangkap 2014 silam.

Selanjutnya, pada 7 Maret 2016, Densus 88 kembali menangkap terduga teroris lain yang disebut "Awang" di Desa Greget, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.

Dari Awang-lah, Densus 88 memperoleh keterangan bahwa senjata api miliknya telah diserahkan kepada rekan JI lainnya bernama Siyono. Senjata yang diserahkan itu yakni dua pucuk senjata api laras pendek, dua magazin dan beberapa butir peluru.

Atas dasar itu pada 8 Maret 2016, Densus 88 menangkap Siyono di sebuah rumah di Dusun Pogung, Desa Brengkungan, Kecamatan



Siyono Salah Satu Kasus Penggangan HAM 2016!

Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Tewasnya Siyono. Pasca penangkapan Siyono pada 8 Maret 2016 lalu, tak berselang lama, pada tanggal 11 Maret 2016, Siyono dikabarkan telah meninggal dunia. Kabar terkait kematian Siyono, bahwasanya Siyono tewas akibat kelelahan setelah berkelahi dengan Densus 88 di dalam mobil. Melihat hal tersebut merupakan sebuah keganjalan,

Pengamat terorisme, Mustofa B Nahrawardaya menyampaikan tanggapannya kepada Majalah Aktual. Ia mengatakan, bahwa dirinya tidak percaya bahwa Densus 88 menjadi tidak ganas karena Siyono bisa sampai lepas.

"Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto, korban tewas karena kelelahan setelah berkelahi dengan Densus 88 di dalam mobil, Namun menurut saya, tidak ada ceritanya, ada terduga yang dapat lolos dari kawalan Densus. Setelah ditangkap dengan cara kasar, biasanya terduga langsung diborgol, dilakban mukanya. Bahkan, kaki dan

tangan terduga, 100 persen tidak mungkin dapat bergerak bebas, karena memborgol kaki dan tangan adalah standar baku mereka," kata Mustafa baru-baru ini, di Jakarta.

Sehingga, lanjut Mustafa, "Ini adalah fenomena baru, *boro-boro* berkelahi, Terduga menggerakkan tangan saja, kemungkinan sudah ditembak mati karena dianggap melawan.

Ada 12 kejanggalan

Mustafa mengungkapkan, bahwa setelah melakukan autopsi terhadap jenazah Siyono, Ia menemukan ada 12 kejanggalan yang tidak bisa dijawab oleh Densus maupun pihak Polri.

"Ada 12 kejanggalan yang sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh Densus dan pihak Polri," ujar Mustofa.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM, Prof. DR. Hafidz Abbas kepada Majalah Aktual.

Prof Hafidz mengungkapkan bahwa adanya kerjasama dengan Muhammadiyah, perlahan kasus kematian Siyono mulai terkuak.

"Kami ucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah atas kerjasamanya yang begitu intensif dan profesional sehingga kasus kematian Siyono mulai terungkap," Prof Hafidz di Jakarta.

Hafidz memaparkan, dari hasil autopsi yang dilakukan pihak Muhammadiyah, ditemukan sejumlah luka cukup parah di tubuh Siyono.

"Siyono meninggal karena ada luka dari sejumlah tubuhnya, ada bekas pukulan benda tumpul, ditemukan patah tulang pada bagian dada juga di bagian kepala," ungkap Hafidz.

Audit untuk Densus. Terkait dengan tewasnya Siyono yang diduga dilakukan oleh Densus 88 saat penangkapannya Maret lalu, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya, menilai kematian terduga teroris Siyono, menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan audit total terhadap Densus 88.

"Kematian Siyono, jelas menyisakan banyak pertanyaan. Oleh karena itu, patut dilakukan pengusutan serius terhadap operasi Densus ini. Jika perlu, dilakukan audit total terhadap satuan khusus anti terorisme ini," tegas ia kepada Majalah Aktual.

Mustafa menambahkan, audit ini diperlukan karena jika uang rakyat, maka harus lebih transparan (terbuka).

"Kenapa harus diaudit, karena kenaikan anggaran Rp1,9 triliun untuk Densus 88, diakui Luhut Panjaitan adalah untuk kenaikan gaji 400 anggota densus, peremajaan alat, penguatan intelijen, dan sebagainya," bebernya.

"Namun jika kenaikan tersebut tidak menambah keahlian Densus dalam dinas, maka anggaran tersebut perlu diaudit dan kalau perlu, selama audit, operasi Densus 88 sementara dikembalikan ke Brimob terlebih dahulu," tegasnya lagi.

"Menurut saya ke depannya harus ada pengawas Densus dari beberapa lembaga masyarakat, karena tidak



mudah mengaudit jumlah tersebut dalam satu tahun. Itu kan termasuk uang rakyat, jadi harus jelas juga," imbuhnya.

Hasil autopsi dokter. Hasil autopsi Komnas HAM, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan PP Muhammadiyah terhadap jenazah terduga teroris Siyono menunjukkan bahwa Siyono meninggal karena patah tulang di bagian dada yang mengarah ke jaringan jantung.

Dalam keterangan resminya kepada Majalah Aktual, Komisioner Komnas HAM Siane Indriani menjelaskan, hasil autopsi terhadap jenazah terduga teroris Siyono memperlihatkan bahwa jenazah mengalami patah di lima iga bagian kiri, patah satu iga bagian kanan, dan tulang dada yang patah akibat benda tumpul di rongga dada mengarah ke jaringan jantung.

"Ini yang menyebabkan kematian yang lumayan fatal. Titik kematian ada di bagian itu," kata Siane kepada Majalah Aktual.

Hasil forensik juga tak menunjukkan ada tanda-tanda perlawanan atau tangkisan dari Siyono. Tim forensik yang diketuai oleh Gatot Suharto juga menemukan luka ketukan di kepala, tapi hal itu tidak menyebabkan perdarahan atau kematian.

Padahal sebelumnya, polisi mengklaim Siyono meninggal setelah berkelahi dengan anggota Detasemen Khusus Antiteror 88 dan menyatakan Siyono tewas akibat perdarahan di

kepala yang disebabkan benturan dengan benda tumpul.

Hasil autopsi lainnya menunjukkan ada memar di bagian belakang tubuh seperti bersandar pada permukaan keras.

Kontrol negara. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan, "Yang jelas ini bagian dari kontrol dari masyarakat sipil terhadap negara, kami sepakat kasus Siyono ini terakhir lah, terakhir sekali, jangan sampai ini terus-menerus dan tidak ada ending-nya."

Busyro bahkan menilai bahwa, "Sudah lama tidak ada indikasi turunnya frekuensi, kualitas, atau volume" tindakan terorisme dan "tidak pernah diungkap dengan lebih transparan karena (terduga) langsung meninggal dunia", maka menurut ia upaya melakukan otopsi dan membukanya pada publik sebagai bentuk kontrol terhadap Densus 88 dalam penanganan terduga terorisme.

Koordinator KontraS Haris Azhar menuturkan, selama ini "tidak pernah dengar" polisi melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang meninggal dalam operasi penanggulangan terorisme.

"Yang utama proses penegakan hukum dulu, soal nanti dilengkapi pelanggaran etik atau disiplinernya, itu terserah internal mereka (polisi). Ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi kerja negara melakukan pemberantasan terorisme, BNPT harus diperiksa, diuji, itu kan kerja pakai duit negara, Densus juga seperti itu, termasuk bantuan-bantuan asing."

PP Muhammadiyah bersama Komnas HAM juga membuka dua paket uang yang menurut mereka diberikan pada istri dan saudara laki-laki mending Siyono oleh petugas polisi saat keduanya membesuk di tahanan, walaupun kemudian Siyono sudah meninggal. Ketika dibuka di hadapan Majalah Aktual, terlihat bahwa uang tersebut berjumlah Rp100 juta. ■ Leonina K Lahama-Ferro Maulana

Film Muhammadiyah 'Si Anak Kampoeng' Sabet Penghargaan di Kanada

Film 'Si Anak Kampoeng' (atau "The Village Boy") yang disutradarai Damien Dematra memperoleh penghargaan untuk kategori "The Best Family Film" pada ajang festival film bergengsi 'Canada International Film Festival'.

Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan *award* berlangsung di auditorium Edgewater Casino, Vancouver, Kanada, demikian kata Konsul Penerangan KJRI Vancouver, Yudhono Irawan di London, Selasa (12/04).

Film berdurasi 108 menit menceritakan tentang kehidupan masa kecil tokoh Muhammadiyah, Syafii Maarif yang pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP) dan pendiri Maarif Institute, Film 'the Village Boy' masuk dalam 2016 official selections bersama sekitar 22 film lainnya dari berbagai belahan dunia.

Beberapa kategori yang turut dikompetisikan dalam festival film tersebut antar lain 2016 Write Brothers Screenplay Competition, 2016 Rising Star Award, 2016 Royal Reel Winners dan 2016 Award of Excellence.

CIFF merupakan salah satu festival film di Kanada yang diselenggarakan setiap tahun di Vancouver, BC, diikuti sineas dari berbagai belahan dunia, yang tahun 2016 ini menampilkan film-film lebih dari 90 negara di dunia.

Keberhasilan Film 'Si Anak Kampoeng', menyusul setelah di tahun



2015 tiga film Indonesia berhasil memperoleh penghargaan yaitu film Danum Baputi untuk kategori Environmental Film Competition, "Let's Play Ghost", kategori Foreign Film Competition dan "I'm Star" untuk kategori Family Film Competition.

Penyelenggaraan festival film berlangsung selama dua hari dari tanggal 8 hingga 9 April diawali dengan pemutaran film yang masuk nominasi dan resepsi sebagai sarana interaksi dan pertukaran pengalaman antara pelaku dan pemerhati film. Kategori penghargaan yang diberikan beragam mulai dari film, sutradara dan penulis skenario terbaik.

Dalam acara penganugerahan award di Vancouver, KJRI Vancouver diwakili Konsul Penerangan dan Konsul Sosial Budaya menerima piagam penghargaan mewakili pihak

P.T Damien Dematra Production yang berhalangan.

Atas nama Damien Dematra, KJRI Vancouver menyampaikan terima kasih kepada organisasi CIFF atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan sehingga film Indonesia meraih penghargaan sebagai kategori Best Family Film. Dalam malam penganugerahan award tersebut hadir beberapa pemenang yang berasal dari Malaysia, India, Inggris, Italia dan Amerika Latin.

Vancouver sendiri tidak asing bagi para sineas dunia, baik karena keindahan alamnya yang sering dijadikan sebagai tempat pengambilan gambar maupun keberadaan Vancouver Film School menghasilkan lulusan handal dan berkiprah di kancah perfilman internasional. /Ferro Maulana

Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 6 Juni dan Idul Fitri 6 Juli

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa 1 Ramadhan 1437 Hijriah pada 6 Juni 2016 setelah melakukan penghitungan (atau hisab) untuk hari-hari besar keagamaan Islam seperti Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.

Penetapan itu dipublikasikan lewat Maklumat Muhammadiyah

di laman resmi Muhammadiyah. or.id yang dipantau Aktual.com dari Jakarta, Senin (18/04).

Maklumat tersebut adalah Nomor: 01/MLM/I.O/E/2016 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1437 Hijriah. Penetapan itu ditandatangani Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'thi.

Sementara itu, Muhammadiyah

menetapkan Idul Fitri (atau 1 Syawal 1437 Hijriah) akan jatuh pada hari Rabu, 6 Juli 2016.

Puasa Arafah ditetapkan (9 Zulhijah) Minggu, 11 September 2016 dan Idul Adha ditetapkan pada hari Senin, 12 September 2016.

Penetapan itu sendiri telah dipublikasikan dan mendahului keputusan pemerintah menilik Muhammadiyah menggunakan metode dan kriteria yang berbeda. /Ferro Maulana

Menkes: Indonesia Perlu 42 Ribu Tenaga Kesehatan di Wilayah Terpencil

Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek, menilai perlu adanya penambahan 42 ribu tenaga kesehatan untuk disebar ke masing-masing daerah terpencil se-Indonesia.

“Tenaga kesehatan itu seperti dokter, perawat, sanitasi lingkungan, ahli gizi yang sangat minim untuk daerah pelosok, karena banyak lulusan kesehatan yang belum tertarik mengabdikan ke daerah terpencil,” ujar ia, kepada wartawan, dalam kunjungan kerja di Kuta, Bali, pada Rabu (13/04).

Setelah membuka lokakarya dan rapat kerja nasional Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), ia menjelaskan mereka yang mau ke daerah terpencil akan langsung diangkat menjadi pegawai



negeri sipil (PNS).

“Itu untuk menggugah minat tenaga kesehatan guna mengabdikan ke daerah pelosok dan puskesmas.

Kami mencatat sebanyak 9.532 puskesmas di Indonesia akan didata jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Yang jelas, jumlah petugas kesehatan lingkungan masih sangat kurang dibandingkan dengan profesi kedokteran,” ujar ia menambahkan.

Ke depannya, untuk memenuhi kekosongan petugas kesehatan lingkungan di masing-masing daerah, kata Menteri Kesehatan, akan mencoba menjaring lulusan dari sekolah perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut menjadi petugas sanitarian sukarela di daerah pelosok.

Didampingi Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dari Kemenkes dr Anung Sugihantono dan Anggota

Dewan Jaminan Sosial nasional (DJSN) Usman Sumantri, Nila meminta kepada HAKLI untuk mendata petugas kesehatannya agar ikut mengisi kekosongan petugas sanitarian (Kesling) di daerah pedalaman.

Selain tenaga kesehatan lingkungan, pihaknya juga mendorong para lulusan kedokteran dan keperawatan agar mau mengabdikan di daerah pelosok.

Pihaknya juga meminta, kepada Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia dan perhimpunan kesehatan lainnya untuk mendata kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan di daerahnya.

“Upaya ini dilakukan, agar serapan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Kita akan petakan dulu jumlah keseluruhan tenaga kesehatan ini sehingga dapat diketahui berapa kebutuhannya,” kata ia menutup pembicaraan. /Ferro-Ant

Lindungi Jemaah Indonesia, OJK Diminta Tetapkan Skema Bisnis Haji & Umrah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk segera menetapkan skema bisnis penyelenggaraan Haji dan Umrah yang tepatnya untuk melindungi masyarakat dari praktek penipuan yang berkedok Haji dan Umrah.

“Bukan Kementerian Agama yang membuat skema bisnis, tapi OJK. Kalau kita bisanya membuat skema metodologi berpikir secara nash. Hukum positif kita hanya terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, terkait ekonomi bukan kerjaan kita,” tutur Kasubag Informasi Haji dan Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Affan Rangkuti kepada wartawan, pada Jumat (22/04).

Menurut Affan, masalah di dalam bisnis penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak terlepas dari tiga poin, yakni investasi, cicilan, dan multi level marketing (MLM). Semua

pengaturan usaha tersebut berada di instansi lain yakni OJK.

“Pengaturan ini semua dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, khususnya jemaah Haji dan Umrah,” tutur ia menambahkan.

Oleh karena itu, Affan kembali menegaskan, jika persoalan Haji dan Umrah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Agama. Ada banyak instansi yang terlibat di dalamnya antara lain OJK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Kemenag Pusat, sejak awal musim Umrah hingga saat ini tercatat sudah ada 10.790 calon jemaah yang tertipu oleh penyelenggara Umrah nakal. Kebanyakan mereka tertipu karena tawaran Umrah murah dari travel tak berizin.

“Mereka hanya modal janji-janji dan semata-mata untuk

mengumpulkan uang masyarakat dan tidak berniat memberangkatkan jemaah. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang, ini akan jadi bom waktu,” tutur Kasubdit Pembinaan Umrah Kemenag Arfi Hatim di Bandung, Kamis (21/04) lalu.

Terkait masalah Umrah tersebut, menurut Arfi, kewenangan Kemenag hanya sebatas pada pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara serta perlindungan kepada konsumen. Salah satu aksinya yakni melakukan sosialisasi “5 pasti umrah” ke berbagai daerah agar masyarakat terhindar dari penipuan berkedok Haji dan Umrah.

Kemenag juga sudah melakukan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Polri soal pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah Haji khusus dan Umrah. MoU ini yang sekarang sedang diimplementasikan di tingkat daerah dengan pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgaskum) Haji dan Umrah. /Ferro

Socrates dan Kita

Hendrajit

Bagaimana dirimu jadinya sekarang dan nanti, tergantung seberapa dalam akar pengetahuanmu tentang diri dan kehidupan. Begitu kira-kira penglihatan tembus pandang filosof Yunani Socrates.

Ini ada ceritanya kenapa Socrates sontak dapat pencerahan seperti itu. Suatu ketika, Chaerepon, sahabat setia Socrates, pergi ke kuil dewa Apollo untuk bersua dengan peramal (orakel) si kota Delphi dan bertanya apakah ada orang yang lebih arif bijaksana daripada Socrates. orakel Delphi merupakan sekelompok imam wanita yang bekerja melayani di kuil dewa Apollo dan terkenal dengan sebutan Pythia. Jawaban Orakel, tak ada yang lebih bijaksana ketimbang Socrates. "Sophocles bijaksana, Euripides lebih bijaksana, namun yang paling bijaksana dari semuanya adalah Socrates," begitu pernyataan orakel Delphi.

Seandainya kita yang dibilang begitu, mungkin sudah langsung ke-GR-an atau malah jadi sombong. Merasa paling tahu dan paling benar. Tapi tidak bagi Socrates.

Selain terkejut, malah tiba-tiba dia mendapat sebuah kesadaran baru dan pencerahan. Bahwa yang dimaksud Orakel bahwa dirinya orang yang paling bijaksana, karena dia adalah orang yang tahu bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang dia tidak tahu atau belum tahu.

Namun dari kesadaran itu pula, dia pun menyadari, bahwa kesadaran bahwa dia tahu bahwa ada banyak hal yang belum dia ketahui, justru mendorongnya untuk menggali pengetahuan lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Socrates menyadari bahwa dengan mengetahui kekurangannya ia terus belajar dan mencari kebenaran tanpa akhir. Ia belajar pada siapa saja dan mendapatkan manfaat dari hal tersebut.

Ketika merenungkan kembali pemikiran dan renungan cemerlang Socrates di abad sebelum masehi, barang tentu mengundang saya untuk bertanya apa yang salah atau tidak beres dengan masyarakat dan bangsa kita sekarang.

Jangan-jangan, karena cara pandang kita dan kesadaran spiritual kita, justru berkebalikan dengan kearifan dan kebijaksanaan seorang Socrates.

Kalau Socrates sontak tersadar bahwa dia tahu dan menyadari bahwa ada banyak hal yang dia belum tahu atau tidak tahu, maka kita di era globalisasi dan serba digital ini, justru tidak tahu bahwa kita belum tahu atau tidak tahu.

Bahkan parahnya lagi, ada banyak dari kita,

menyangka bahwa kita tahu segala hal atau tahu banyak hal. Yang kita sangka tahu, ternyata kita tidak tahu sama sekali.

Bahkan di lapis golongan menengah terpelajar kita, ada gejala yang lebih berbahaya lagi. Meskipun tahu, tapi pura-pura tidak tahu, atau malah, tidak mau tahu sama sekali. Maka ketika kita mencermati krisis multi-dimensi seperti sekarang ini, terungkap sebuah tren yang cukup menarik meskipun menyedihkan. Ada banyak orang yang bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan atau lakukan sekarang ini. Bahkan lebih celaknya lagi, tidak peduli nilai dirinya dan martabat dirinya.

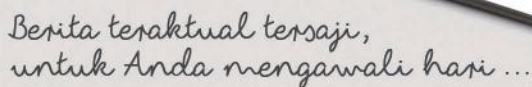
Terungkapnya Panama Papers, Pengusutan Daerah-Daerah yang merupakan mata-rantai Sunda Kelapa, maraknya penangkapan terhadap para pejabat pemerintahan dari pusat maupun daerah maupun anggota DPR/DPRD karena terlibat tindak kejahatan korupsi, hanyalah rangkaian episode dan fragmen sebagai akibat hal tersebut tadi.

Kembali kepada Socrates, kata kuncinya adalah, betapa takdir hidup kita sangat ditentukan seberapa dalam akar pengetahuan yang kita kuasai. Karena pada perkembangannya kemudian, takdir hidup seseorang ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Keputusan-keputusan yang kita ambil, sangat tergantung pada sudut pandang kita. Dan sudut pandang kita, sangat ditentukan oleh kedalaman akar pengetahuan yang kita kuasai dan kita hayati.

Ya benar. Mengambil keputusan secara matang dengan pemikiran yang mendalam. Utamanya ketika menyangkut hal-hal yang berisiko tinggi--entah dalam urusan keluarga, karir, pekerjaan, dan sebagainya. Apalagi ketika keputusan itu akan berdampak luas dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepala Negara, Kepala Daerah dan para pemimpin politik di tingkat nasional maupun daerah, membutuhkan kedalaman dan kematangan dalam berpikir untuk segala macam keputusan.

Itulah para pemimpin yang arif dan bijaksana. Sebuah kualitas yang muncul dari proses berpikir secara mendalam. Keputusan mendalam berarti meninjau permasalahan dari berbagai sudut pandang dengan segala implikasi dan risiko yang ditimbulkannya. Sehingga akan melahirkan keputusan yang matang.

Saatnya kita sebagai anak bangsa, peka terhadap perasaan kita sendiri. Kemampuan memahami suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan serta kekuatan dan keterbatasan diri kita. ◦



 www.aktual.com

memberi anda
perspektif
yang berbeda ...



aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

AKTUAL
MAGAZINE

aktual 

Info Dan Pemasaran :

☎ **081517933376** (Dedy) **081280941009** (Rhiza)

✉ **iklan@aktual.com** | **marketing@aktual.com** | **sirkulasi@aktual.com**

🌐 **www.aktual.com**